

PROFIL ANAK

PROVINSI DKI JAKARTA

2023



PROFIL ANAK

PROVINSI DKI JAKARTA

2023

<https://jakarta.bps.go.id>



PROFIL ANAK PROVINSI DKI JAKARTA 2023

Nomor Publikasi : 31000.24024
Katalog BPS : 4103005.31
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xiv+173 halaman

Naskah:

BPS Provinsi DKI Jakarta

Penyunting:

BPS Provinsi DKI Jakarta

Desain Sampul oleh:

BPS Provinsi DKI Jakarta

Penerbit:

©BPS Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

TIM PENYUSUN
PROFIL ANAK PROVINSI DKI JAKARTA 2023

Pengarah	: Nurul Hasanudin SST., M.Stat
Penanggung Jawab	: Rini Apsari, S.Si, M.Si.
Penyunting	: Rini Apsari, S.Si, M.Si.
Penulis naskah	: 1. Rini Apsari, S.Si, M.Si. 2. Mega Cahya Kristianti, SST 3. Dimas Hafizh, SST
Pengolah Data	: 1. Dimas Hafizh, SST 2. Mega Cahya Kristianti, SST 3. Tri Pramujiyanti, SST
Infografis	: 1. Ria Dini Hanifah 2. Khuzaimah Putri 3. Inggid Utami 4. Muhammad Fajar Siddiq
Penata Letak	: Galuh Permata Sari, S.Tr.Stat.

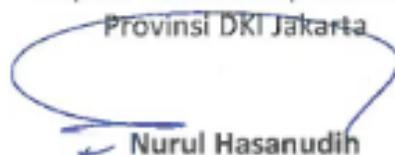
KATA PENGANTAR

Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia dalam pembangunan, perlu terus dibina dan dikembangkan potensinya yang dilakukan secara terarah, menyeluruh dan terpadu. Anak sebagai generasi penerus pembangunan bangsa perlu disiapkan sedini mungkin agar dapat menjadi sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk menjamin agar setiap anak memiliki peluang terbaik untuk tumbuh sehat, memperoleh akses pendidikan yang layak dan pada gilirannya menjadi SDM yang produktif di masa depan.

Publikasi "Profil Anak Provinsi DKI Jakarta 2023" bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai kondisi dan situasi tentang anak di DKI Jakarta yang dilihat dari berbagai aspek penting, seperti struktur demografis, kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi serta lingkungan sosial dan fisik anak. Publikasi ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun kebijakan pemerintah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak.

Kami menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya sehingga publikasi ini dapat disajikan. Kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat diharapkan.

Jakarta, Juli 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta



Nurul Hasanudin

DAFTAR ISI

Profil Anak Provinsi DKI Jakarta 2023

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
B A B I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	5
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Konsep dan Definisi	6
1.5. Sistematika Penyusunan	10
B A B II DEMOGRAFI	13
2.1. Program Kependudukan di DKI Jakarta	16
2.2. Komposisi Penduduk Anak	20
2.3. Kelangsungan Hidup Anak	27
2.4. Kesejahteraan Hidup Anak	34
BAB III STATUS KESEHATAN ANAK	43
3.1 Status Kesehatan Anak	45
3.2 Imunisasi Balita	63
3.3 Pemberian Air Susu Ibu	65
3.4 Penolong Persalinan Pada Balita	69
BAB IV PENDIDIKAN	71
4.1 Angka Melek Huruf	74
4.2 Partisipasi Pendidikan Prasekolah	80
4.3 Partisipasi Sekolah	83
4.3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	86
4.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)	90
4.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM)	95
4.4 Angka Melanjutkan	99
BAB V EKONOMI	103
5.1 Kemiskinan Anak	105
5.2 Partisipasi Ekonomi Anak	117

5.3 Kepemilikan Kartu Jaminan Kesehatan	123
BAB VI LINGKUNGAN SOSIAL DAN FISIK	127
6.1 Aktivitas Sosial	129
6.2 Lingkungan Sosial	133
6.3 Lingkungan Fisik	140
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN RSE	153

<https://jakarta.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta, 2020–2025	17
Tabel 2.2	Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2020-2023	24
Tabel 2.3	Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama di Provinsi DKI Jakarta, 2022-2033	33
Tabel 2.4	Persentase Rumah tangga yang Memiliki Anak 0-17 tahun Menurut kelompok Pengeluaran dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023	38
Tabel 2.5	Persentase Anak Usia 0-17 tahun yang Memiliki akte Kelahiran Menurut Provinsi di Indonesia, 2021-2023	40
Tabel 3.1	Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari di DKI Jakarta menurut Kelompok Umur, 2023	53
Tabel 3.2	Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Menurut Kelompok Umur di DKI Jakarta, 2023 ..	56
Tabel 3.3	Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Kelompok Umur di DKI Jakarta, 2023	58
Tabel 3.4	Persentase Anak yang Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir DKI Jakarta Menurut Tempat Rawat Jalan dan Kabupaten/Kota, 202	60
Tabel 3.5	Persentase Anak yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Imunisasi di DKI Jakarta, 2023	64
Tabel. 3.6	Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023	66
Tabel 3.7	Persentase penduduk berumur 0-23 bulan (Baduta) yang Disusui/Diberi ASI Menurut Lamanya Pemberian ASI Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2023	68
Tabel 3.8	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Persalinan ALH yang Terakhir, 2023	69

Tabel 5.1 Persentase Anak Miskin di Indonesia Menurut Karakteristik Wilayah, 2019-2022	109
Tabel 5.2 Persentase Anak Miskin di DKI Jakarta menurut Karakteristik Demografi, 2023	111
Tabel 5.3 Kemiskinan Anak di DKI Jakarta menurut Karakteristik Pendidikan, 2023	113
Tabel 5.4 Persentase Anak Miskin di Indonesia menurut Karakteristik Perumahan, 2019-2022	116
Tabel 5.5 Persentase Anak Miskin di DKI Jakarta menurut Karakteristik Perumahan, 2023	117
Tabel 5.6 Persentase anak usia 0-17 tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenisnya di DKI Jakarta, 2023	124
Tabel 5.7 Persentase anak usia 0-17 tahun yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan di DKI Jakarta, 2023	125
Tabel 6.1 Banyaknya Tempat Peribadatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023	134
Tabel 6.3 Banyaknya Panti Asuhan Menurut Jenis Binaan, DKI Jakarta, 2023	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Persentase Penduduk Usia Anak (0-17 tahun) terhadap total Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023	21
Gambar 2.2	Persentase Anak (0-17 tahun) menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023	23
Gambar 2.3	Persentase Anak (0-17 tahun) menurut kelompok umur dan Kabupaten/Kota, DKI Jakarta, 2023	25
Gambar 2.4	Rumahtangga yang Memiliki yang Memiliki Anak (0-17 tahun) Menurut Kabupaten/Kota, DKI Jakarta, 2023	28
Gambar 2.5	Rumahtangga yang Memiliki yang Memiliki Anak (0-17 tahun) Menurut Jenis Kelamin KRT dan Kabupaten/Kota DKI Jakarta, 2023	30
Gambar 2.6	Angka Kematian Bayi (AKB) Penduduk, DKI Jakarta, 1971-2025	31
Gambar 2.7	Persentase Penduduk Usia Anak (0-17 tahun) Menurut Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota, DKI Jakarta, 2023	32
Gambar 2.8	Persentase Rumahtangga yang Memiliki yang Memiliki Anak (0-17 tahun) Menurut Status Kawin Kepala Rumahtangga (KRT) dan Kabupaten/Kota, DKI Jakarta, 2023	35
Gambar 2.9	Persentase Rumahtangga yang Memiliki Anak (0-17 tahun) Menurut Umur Kepala Rumahtangga (KRT) dan Kabupaten/Kota, DKI Jakarta, 2023	36
Gambar 2.10	Persentase Anak Usia 0-17 tahun yang Memiliki akte Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota, DKI Jakarta, 2023	41
Gambar 3.1	Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir di DKI Jakarta, 2023	46
Gambar 3.2	Persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023	47
Gambar 3.3	Persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir menurut Kelompok Umur, 2023	49
Gambar 3.4	Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari di Indonesia dan DKI Jakarta, 2020-2022	51

Gambar 3.5 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari di DKI Jakarta menurut Jenis Kelamin, 2023	52
Gambar 3.6 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir, 2023	55
Gambar 3.7 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Indonesia dan DKI Jakarta, 2020-2022	57
Gambar. 3.8 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2023	58
Gambar. 3.9 Persentase Anak yang Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir DKI Jakarta Menurut Tempat Rawat Jalan, 2023	60
Gambar 3.10 Persentase Anak yang Tidak Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir DKI Jakarta Menurut Alasan Tidak Rawat Jalan, 2023	61
Gambar 3.11 Persentase Anak yang Rawat Inap di DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2023	62
Gambar. 3.12 Persentase Anak yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2023	63
Gambar 3.13 Persentase penduduk berumur 0-23 bulan (Baduta) yang Disusui/Diberi ASI selama Sehari-hari kemarin menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023	67
Gambar 4. 1 Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Karakteristik, 2023	75
Gambar 4. 2 Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023	76
Gambar 4. 3 Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Jenis Huruf, 2023	77
Gambar 4. 4 Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Jenis Huruf dan Jenis Kelamin, 2023	78
Gambar 4. 5 Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Jenis Huruf dan Kelompok Umur, 2023	79
Gambar 4. 6 Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Jenis Huruf dan Kelompok Pengeluaran, 2023	80

Gambar 4. 6	Anak Usia 0-6 Tahun yang yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah, 2021-2023	81
Gambar 4. 7	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Kelompok Umur, 2023	82
Gambar 4. 8	Persentase Anak Usia 5-17 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2023	84
Gambar 4. 9	Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Sedang Bersekolah menurut Kelompok Umur dan Jenjang Pendidikan, 2023	85
Gambar 4.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, 2018-2023	87
Gambar 4.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023	88
Gambar 4.12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2023	89
Gambar 4.13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2023	90
Gambar 4.14	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, 2018-2023	92
Gambar 4.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2023	93
Gambar 4.16	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran, 2023	94
Gambar 4.17	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2023	95
Gambar 4.18	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, 2018-2023	96
Gambar 4.19	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2023	97
Gambar 4.20	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran, 2023	98
Gambar 4.21	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2023	99
Gambar 4.22	Angka Melanjutkan ke Jenjang SMP/Sederajat menurut Karakteristik, 2023	100

Gambar 4.23	Angka Melanjutkan ke Jenjang SM/Sederajat menurut Karakteristik, 2023	101
Gambar 5.1	Persentase Anak Menurut Kegiatan Utama yang Dilakukan Seminggu yang Lalu di DKI Jakarta, 2023	120
Gambar 5.2	Persentase Anak yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2023	121
Gambar 6. 1	Persentase Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Menonton Siaran TV, Mendengarkan Radio, dan Membaca Koran dalam Seminggu Terakhir, 2021	130
Gambar 6. 2	Persentase Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Menonton Siaran TV, Mendengarkan Radio, dan Membaca Koran dalam Seminggu Terakhir Menurut Frekuensi Mengakses, 2021	131
Gambar 6. 3	Persentase Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Melakukan Kegiatan Olahraga dalam Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2021	132
Gambar 6. 4	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Mengikuti Kegiatan Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kegiatan, 2021	133
Gambar 6. 5	Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Menurut Kabupaten/Kota, DKI Jakarta, 2023	139
Gambar 6. 6	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Rumah Layak Huni menurut Karakteristik, 2023	142
Gambar 6. 7	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Rumah Layak Huni menurut Dimensi Pembentuk Rumah Layak Huni, 2023	143
Gambar 6. 8	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan Akses Hunian yang Memenuhi Kriteria Ketahanan Bangunan menurut Karakteristik, 2023	144
Gambar 6. 9	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan Akses Hunian yang Memenuhi Kriteria Kecukupan Luas Bangunan menurut Karakteristik, 2023	145
Gambar 6. 10	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan Akses Air Minum Layak menurut Karakteristik, 2023	146
Gambar 6. 11	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan Akses Sanitasi Layak menurut Karakteristik, 2023	147

PENTINGNYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL



Peningkatan kesejahteraan meliputi seluruh golongan masyarakat termasuk **kesejahteraan anak**. Untuk membentuk SDM yang handal dan berkualitas di masa mendatang, anak perlu memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan tingkatan usianya.



Namun, *masih ditemui anak-anak yang tidak memperoleh hak dasarnya secara wajar*. Fenomena pekerja anak, anak terlantar, anak jalanan, dan anak "rawan" yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan hidupnya masih ditemui di ibukota Jakarta.

Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".

MASA DEPAN YANG CERDAS TUMBUH DARI PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS!

Sumber/ Source:

- Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B A B I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu strategi dalam pembangunan nasional. Peningkatan kesejahteraan ini meliputi seluruh golongan masyarakat termasuk kesejahteraan anak. Dalam pembangunan nasional, generasi muda termasuk anak didalamnya, merupakan sumber potensi pembangunan bangsa serta penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada anak saat ini akan sangat berperan bagi keberhasilan cita-cita pembangunan nasional di masa mendatang.

Untuk membentuk SDM yang handal dan berkualitas di masa mendatang, anak perlu memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan demikian mereka dapat mengembangkan potensi dirinya yang positif. Namun demikian secara faktual masih ditemui anak-anak yang tidak memperoleh hak dasarnya secara wajar. Fenomena pekerja anak, anak terlantar, anak jalanan, dan anak "rawan" yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan hidupnyak masih ditemui dalam kehidupan anak di ibukota Jakarta.

Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia dalam pembangunan, perlu terus dibina dan dikembangkan potensinya yang dilakukan secara terarah, menyeluruh dan terpadu. Pembinaan terhadap anak merupakan bagian dari upaya terpadu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai insan manusia sejak dalam kandungan hingga usia dewasa.

Dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dalam UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Artinya secara implisit pendidikan bagi anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Tentunya negara harus menyiapkan pendidikan yang berkualitas bagi anak, sebagaimana ungkapan bahwa masa depan yang cerdas berawal dari pendidikan yang berkualitas. Tidak diragukan lagi, Pendidikan merupakan human capital yang mampu mendorong peningkatan kualitas SDM.

Di Era digitalisasi dan globalisasi saat ini, Jakarta sedang mempersiapkan diri dalam peralihan dari ibukota negara menuju kota global dan kota perekonomian. Tentunya hal ini harus selaras dalam menyiapkan generasi muda yang akan tumbuh dan berkembang di masa tersebut. Kemampuan anak dalam menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di era digitalisasi, menuntut pembangunan bidang pendidikan harus mampu berkelas dunia sehingga mampu mencetak SDM yg handal dan berkualitas sesuai dengan tuntutan jaman. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas hidup anak, dari aspek kesehatannya. Dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai serta pola hidup sehat di masyarakat, kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan. Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut anak sebagai generasi muda, mampu menjadi SDM yang handal dan berkualitas sehingga mampu bersaing dengan SDM kota-kota global lain di manca negara dalam berbagai aspek pembangunan.

Publikasi ini merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan data yang akan digunakan dalam pembangunan SDM, khususnya penduduk usia anak. Untuk itu dibutuhkan data yang berkualitas, baik sebagai perencanaan pembangunan ataupun sebagai monitoring evaluasi atas berbagai program pembangunan kependudukan yang melibatkan anak-anak sejak dalam kandungan hingga usia 17 tahun. Publikasi ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi anak di Jakarta, kendala dan tantangannya untuk meningkatkan kualitas anak sebagai generasi penerus pembangunan bangsa, dan upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah bersama-sama pihak terkait

dari unsur swasta, akademisi, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup anak sehingga mampu menghasilkan SDM yang handal dan berkualitas di masa mendatang.

1.2. Tujuan

Penyusunan publikasi Profil Anak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 bertujuan:

1. Memberikan gambaran situasi dan kondisi anak di Provinsi DKI Jakarta sampai tahun 2023.
2. Untuk mengetahui indikator hasil pembangunan di bidang kependudukan, Pendidikan, kesehatan, khususnya untuk anak yang telah dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.
3. Untuk memberikan gambaran program-program pemerintah yang dilaksanakan dalam menunjang aktivitas anak sebagai manifestasi kota Jakarta yang layak anak dan mempersiapkan anak menjadi SDM yang siap berpartisipasi dalam menyongsong Jakarta Kota Global.

1.3. Ruang Lingkup

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk memperkaya analisis, dilengkapi dengan sumber data lain dari instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, serta Dinas lainnya.

Beberapa data dan indikator lain yang telah memenuhi standar kelayakan penyajian, yakni dengan melihat *Relative Standard Error (RSE)* disajikan hingga level kabupaten/kota. Sementara untuk data dan indikator yang datanya hanya mampu disajikan hingga level provinsi, dengan melihat kelayakan representasinya, hanya disajikan pada level provinsi.

1.4. Konsep dan Definisi

Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan dalam publikasi ini diuraikan berikut ini :

Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama satu tahun atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari satu tahun.

Definisi Anak. Di Indonesia, **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan **anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun.** Definisi ini sejalan dengan pengertian anak menurut WHO.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini mencakup semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial, dan kecacatan. Dengan demikian, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang baik.

Umur dalam Susenas dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir. Misal umur 11 bulan dicatat sebagai 0 tahun. Umur 17 tahun 8 bulan dicatat sebagai umur 17 tahun.

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga.

Rumah Tangga Anak adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya merupakan anak (0-17 tahun).

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-

hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari satu tahun dan tidak berniat pindah.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas kependudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili (Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019).

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/ MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh berbagai institusi, yaitu: (1) Taman Kanak-Kanak (TK), (2) Raudhatul Athfal (RA), (3) Kelompok Bermain (KB), (4) Taman Penitipan Anak (TPA), (5) Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), (6) Satuan PAUD Sejenis (SPS) misalnya PAUD Terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, contoh: Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA).

Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

Dapat membaca dan menulis, artinya dapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

- **Huruf latin**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin;
- **Huruf lainnya**, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina, kanji, dan sebagainya;
- **Huruf latin dan huruf lainnya**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya;
- **Tidak dapat membaca dan menulis**, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya.

Angka Putus Sekolah (APTs) adalah persentase siswa/murid dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut.

Kartu Menuju Sehat (KMS) adalah suatu kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Dengan KMS, gangguan pertumbuhan atau risiko kelebihan/kekurangan gizi dapat diketahui lebih dini.

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya sakit ringan.

Berdasarkan Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 jenis-jenis imunisasi dasar untuk balita mencakup imunisasi polio, campak, DPT, hepatitis B, dan BCG.

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI).

Penolong persalinan adalah penolong terakhir dalam proses persalinan sampai dengan kala tiga (keluarnya plasenta/ari-ari bayi)

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.

Pekerja keluarga atau tidak dibayar adalah ART yang bekerja membantu KRT/ART lain/orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per hari. GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, Pendidikan dan kesehatan.

1.5. Sistematika Penyusunan

Publikasi Profil Anak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dikelompokkan dalam 6 bagian, yaitu: pendahuluan yang berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan publikasi Profil Anak di DKI Jakarta 2023, tujuan, ruang lingkup, konsep dan definisi serta sistematika penulisan. Selanjutnya Bab 2 membahas tentang Demografi penduduk usia anak, Bab 3 menguraikan tentang kesehatan. Bab 4 menguraikan Tingkat Pendidikan Anak. Selanjutnya pada Bab 5 menguraikan gambaran aktivitas ekonomi Anak. Terakhir di Bab 6 akan dipaparkan Lingkungan sosial dan Fisik yang terkait dengan aktivitas anak.

Secara sistematis, penulisan Publikasi Profil Anak Provinsi DKI Jakarta 2023 diuraikan ke dalam 6 bab, yakni sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan menceritakan tentang bagaimana peran anak dalam pembangunan bangsa, kesiapan dalam menjadi generasi penerus cita-cita bangsa di era globalisasi dan digitalisasi. Hak anak dalam mendapatkan Pendidikan yang layak serta kesehatan yang memadai apakah sudah terpenuhi. Konsep dan definisi yang diuraikan memberikan gambaran beberapa istilah yang digunakan dalam publikasi ini.

Bab 2 Kependudukan, menguraikan tentang komposisi penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan wilayah kabupaten/kota. Bagaimana kelangsungan hidup anak yang digambarkan melalui indikator angka kematian bayi di Jakarta dan Indonesia. Serta upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak.

Bab 3 memaparkan data dan indikator kesehatan pada anak di Jakarta. Termasuk di dalamnya indikator kesehatan anak dengan menggunakan indikator imunisasi balita, pemberian asi pada balita serta penolong persalinan pada balita.

Bab 4 Pendidikan Anak yang memaparkan Angka Melek Huruf, Partisipasi Pendidikan Prasekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan, serta Pendidikan Angka Melanjutkan Sekolah.

Pada Bab 5 Aktivitas Ekonomi berisi informasi terkait, Kemiskinan Anak, dan Partisipasi Ekonomi Anak, dan Kepemilikan Kartu Jaminan Kesehatan.

Bab 6 Aktivitas sosial yang dilakukan anak seperti keterlibatan anak dalam kegiatan olah raga, organisasi, menonton televisi, dan lainnya. Selanjutnya, lingkungan sosial seperti keberadaan tempat ibadah, banyaknya panti asuhan anak, dan banyaknya korban penyalahgunaan narkoba. Pada lingkungan fisik diuraikan sarana dan prasarana perumahan serta sarana air bersih, sanitasi dan lainnya.

Estimasi *Sampling Error*. Bagian ini menjelaskan hasil penghitungan *sampling error* guna melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel.

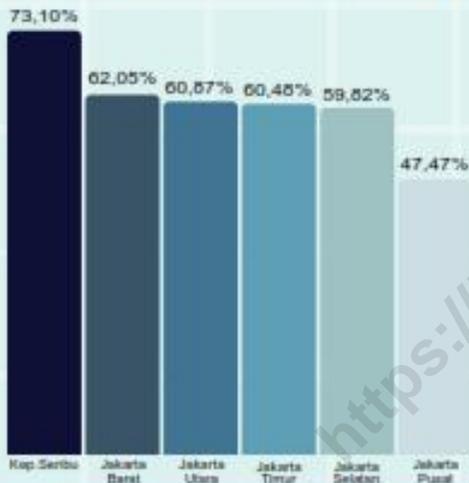
<https://jakarta.bps.go.id>

KELANGSUNGAN HIDUP ANAK DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang mencerminkan salah satu hak utama anak, yaitu hak kelangsungan hidup. Anak dalam proses tumbuh kembangnya berada dalam lingkaran *konsentris* yang mana setiap lingkaran mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung bagi perkembangan hidupnya dan keluarga merupakan lingkaran pertama yang mengelilingi kehidupan anak.



Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Anak (0-17 tahun) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023



Persentase rumah tangga yang memiliki anak usia 0-17 tahun di Jakarta sebesar **59.51%**

Lebih dari separo rumah tangga di Jakarta memerlukan perhatian lebih, khususnya kesejahteraan anak-anaknya

Indikator lain terkait kelangsungan hidup anak adalah **Angka Kematian Bayi (AKB)**.

AKB 2020

10,76

AKB 2025*

9,05*

Kematian bayi tidak terlepas dari **pernikahan dini pada perempuan**.

Dari seluruh penduduk usia 17 tahun ke bawah di Jakarta, sekitar

0,01%

berstatus kawin

Proyeksi AKB Indonesia dan DKI Jakarta Tahun 1970 - 2030



B A B II DEMOGRAFI

Sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengakui hak-hak anak secara absolut dan mendorong terciptanya usaha pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Sebuah janji untuk menghormati, melindungi dan mempromosikan hak-hak semua anak, memastikan semua anak bebas dari diskriminasi, kekerasan dan penelantaran. KHA juga mengakui peran sentral orang tua dan keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak serta mengingatkan kewajiban Negara untuk membantu orang tua dalam mewujudkannya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen besar terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komitmen tersebut dibuktikan dalam berbagai hal, baik aspek regulasi, kelembagaan, program dan sejumlah upaya lain. Masuknya aspek perlindungan anak dalam konstitusi, terbitnya sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, beragamnya kelembagaan terkait anak serta semakin masifnya kebijakan dan program terkait perlindungan anak, telah meneguhkan betapa *spirit* pemajuan perlindungan anak di Indonesia semakin baik

Sejumlah permasalahan yang melibatkan anak masih terus terjadi di tanah air, termasuk di DKI Jakarta. Berdasarkan data terbuka (*open data*) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2017 hingga 2019, sejumlah persoalan, seperti: anak yang tidak bersekolah/berpendidikan, anak korban kekerasan yang ditangani P2TP2A, anak disabilitas, anak jalanan, anak terlantar, anak korban narkoba, anak dengan HIV/AIDS, anak adopsi, anak berhadapan dengan hukum, hingga anak berkebutuhan khusus masih kerap terjadi.

Pemenuhan hak anak belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaporan yang diterima Komisi Perlindungan anak Indonesia terkait pelanggaran hak anak berupa pembatasan bertemu keluarga, pengabaian terhadap tumbuh kembang anak,

menjadi pelaku tindak kekerasan, dan eksploitasi ekonomi maupun seksual (Setyawan, 2016).

Dari uraian di atas tampak bahwa permasalahan anak di Indonesia masih perlu penanganan yang serius, khususnya anak yang ada di Jakarta sebagaimana cakupan pembahasan pada publikasi ini. Untuk mengukur pencapaian pemenuhan hak-hak anak secara parsial maupun keseluruhan, diperlukan data dan indikator dari berbagai aspek pembangunan yang melibatkan anak. Untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan anak pada bab ini akan diuraikan kondisi kependudukan/demografi anak di DKI Jakarta pada tahun 2023.

2.1. Program Kependudukan di DKI Jakarta

Jumlah penduduk Jakarta setiap tahun semakin bertambah. Berdasarkan data hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 mencapai 10,67 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Jakarta selama Periode 2020-2025 diperkirakan sebesar 0,21 persen per tahun, yakni dari 10,567 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 10,672 juta jiwa pada tahun 2023, dan turun sedikit menjadi 10,678 juta jiwa pada tahun 2025.

Asumsi proyeksi yang mempertimbangkan isu hangat beralihnya ibukota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memengaruhi perpindahan penduduk Jakarta ke IKN. Hal ini menyebabkan terjadi penurunan proyeksi jumlah penduduk di Jakarta sepanjang Tahun 2025 hingga 2035 mendatang. Namun penurunan tersebut terjadi secara bertahap dari tahun ke tahun. Sehingga laju pertumbuhan penduduk diprediksi mengalami penurunan hingga *minus* 0,12 persen per tahun pada periode 2025-2030 dan turun lagi menjadi *minus* 0,17 persen per tahun pada periode 2030-2035.

Tabel 2.1 Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta, 2020—2025

Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0—4	804,5	787,35	770,76	754,74	739,28	724,37
5—9	815,14	807,82	800,75	793,91	785,5	775,68
10—14	826,95	820,2	813,33	806,24	798,12	788,87
15—19	840,78	834,67	828,36	822	814,43	805,73
20—24	856,81	849,12	841,21	833,57	823,54	811,99
25—29	869,85	857,33	846,52	837,34	825,66	811,13
30—34	897,91	885,2	869,75	852,94	833,96	813,59
35—39	877,6	873,94	870,76	867,03	859,53	846,65
40—44	857,01	857,84	855,03	849,92	843,23	835,98
45—49	772,25	786,31	799,17	810,12	817,59	820,77
50—54	658,36	676,22	693,6	710,36	725,84	739,71
55—59	535,48	554,87	573,21	590,85	608,01	624,94
60—64	396,36	416,08	437,04	458,54	479,46	499,06
65—69	277,89	296,15	311,88	326,38	341,33	357,86
70—74	135,78	153,97	175	197,09	218,16	236,82
75+	144,39	148,37	153,66	161,09	171,31	184,84
Total	10.567,06	10.605,44	10.640,01	10.672,10	10.684,95	10.677,98

Sumber : Badan Pusat Statistik, Proyeksi hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Penduduk anak-anak usia 0–17 tahun yang memiliki proporsi cukup besar, dalam hal ini menggunakan pendekatan sampai dengan usia 19 tahun, karena data yang tersedia dikeompokkan dalam usia 5 tahunan, yakni sekitar 30 persen dari total penduduk Jakarta atau sekitar 3 juta jiwa, tentu perlu mendapatkan perhatian khusus, baik sebagai subyek pembangunan maupun obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, penduduk anak merupakan SDM potensial yang akan menjadi pelaku pembangunan. Oleh karenanya upaya pengembangan potensi pada anak perlu mendapatkan

perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah maupun masyarakat luas. Sementara sebagai obyek pembangunan, penduduk anak seharusnya menjadi pemanfaat hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, baik dalam aspek kehidupan sehari-hari, dalam Pendidikan, kesehatan, dan lainnya, sehingga anak mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (*human rights*). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Menyikapi jumlah penduduk anak hasil proyeksi di atas, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan atau strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi. Perubahan demografi terjadi, karena penduduk yang masuk generasi baby boomer dan generasi X mengalami pengurangan jumlah penduduk, sebaliknya terjadi penambahan pada generasi millennial, generasi Z dan pasca generasi Z (generasi alfa). Tentunya perubahan ini memerlukan perhatian tersendiri mengingat setiap generasi memiliki, karakteristik, nilai-nilai, dan kecenderungan perilaku yang berbeda. Salah satu generasi yang saat ini sedang mendapatkan perhatian adalah Generasi Z dan generasi Alfa, yang dikenal sebagai generasi yang lahir setelah tahun 1997 hingga 2024. Generasi ini merupakan kelompok yang tumbuh dalam era teknologi digital dan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari generasi sebelumnya. Mereka telah akrab dengan dunia digital dan teknologi komunikasi dan informasi sejak dilahirkan.

Dalam era digital yang terus berkembang, kompetensi digital menjadi kunci utama bagi individu dan masyarakat. Keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, memahami keamanan siber, dan berinteraksi secara bijaksana dengan internet semakin relevan. Oleh karena itu,

pengembangan kompetensi digital menjadi sangat penting. Diharapkan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa, khususnya di Jakarta memiliki literasi digital yang memadai untuk mewujudkan Jakarta Kota Global. Meskipun ekonomi digital mempunyai pengaruh yang besar melalui digitalisasi, kurangnya keterampilan dan literasi digital dapat menghambat adopsi ekonomi digital.

Pemerintah perlu memastikan tidak adanya kesenjangan kualitas SDM antar generasi, bahkan diharapkan pada generasi penerus dapat ditingkatkan kualitas SDMnya dibandingkan generasi sebelumnya. Pemerintah juga perlu menyusun kebijakan keluarga berencana era baru. Kebijakan tersebut perlu memastikan bahwa pasangan muda siap dalam membangun keluarga. Sehingga pasangan muda dapat mempersiapkan diri secara sosial dan ekonomi untuk menghasilkan anak yang berkualitas. Implikasinya anak akan menjadi SDM yang handal dan berkualitas yang dapat berkontribusi positif dalam pembangunan.

Dalam upaya memenuhi hak-hak anak di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berkomitmen menghadirkan tempat beraktivitas yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Saat ini sudah ada 322 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di lima wilayah kota hingga Kabupaten Kepulauan Seribu. Keberadaan RPTRA tersebut memberikan banyak manfaat, terutama bagi anak-anak. RPTRA menjadi wahana meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam implementasi 10 Program Pokok PKK, sekaligus mendukung terpenuhinya 31 indikator Kota Layak Anak (DPPAPP, 2020).

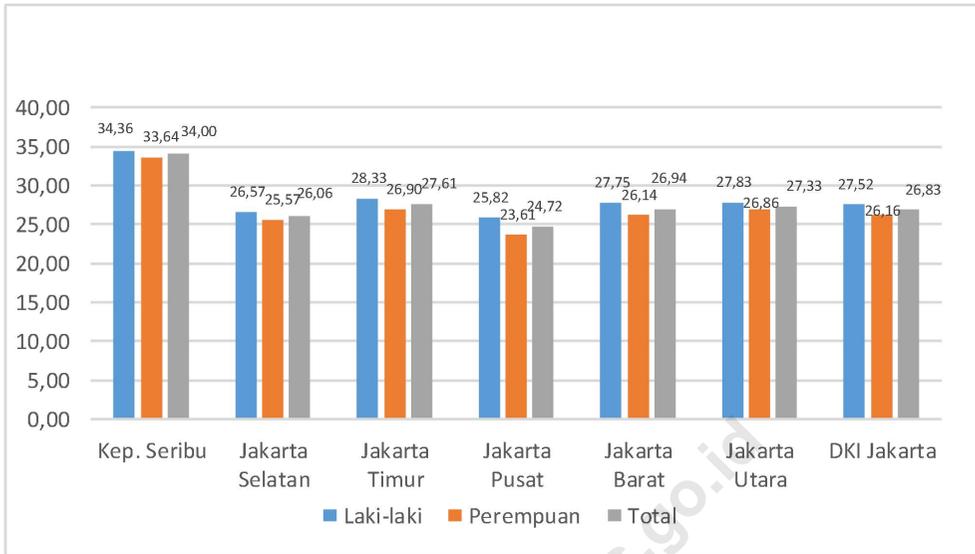
Pembangunan RPTRA dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki banyak fungsi yakni, sebagai sarana pemberian layanan maupun kegiatan bagi anak dan warga, tempat bermain yang edukatif untuk anak-anak, dan tempat kegiatan sosial warga sekitar. RPTRA juga dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran, pelatihan, pengembangan dan rujukan dari berbagai kelompok kegiatan.

Sebagaimana diuraikan di atas, pembangunan RPTRA merupakan salah satu upaya menuju terwujudnya Jakarta sebagai **Kota Layak Anak (KLA)**. KLA merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mengutip KemenPPPA, Terdapat 6 (enam) kriteria Kota Layak anak, yakni Penguatan Kelembagaan, Hak Sipil dan Kebebasan anak, Hak lingkungan keluarga dan Pengasuhan, Hak Kesehatan Dasar dan kesejahteraan, Hak Pendidikan dan Seni Budaya, serta Hak Perlindungan Khusus.

Untuk mengetahui sejauh mana gambaran anak di Jakarta dalam memperoleh hak-hak dasarnya, akan diuraikan dalam publikasi ini pada bab-bab selanjutnya.

2.2. Komposisi Penduduk Anak

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa populasi penduduk anak-anak (usia 0-17 tahun) di Jakarta relatif tinggi, yakni lebih dari seperempat penduduk dari total penduduk di DKI Jakarta. Kondisi ini dapat dilihat dari Gambar 2.1, dimana persentase penduduk anak di Jakarta sebesar 26,83 persen. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, tampak bahwa persentase penduduk anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan, dengan perbandingan 27,52 persen laki-laki dan 26,16 persen perempuan.



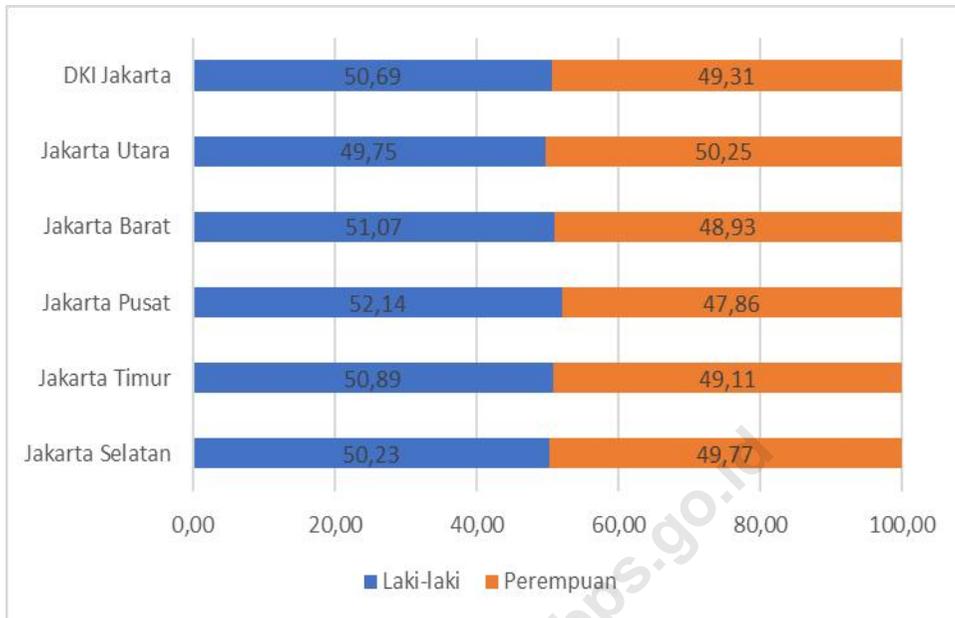
Gambar 2.1 Persentase Penduduk Usia Anak (0—17 tahun) terhadap total Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Apabila diamati menurut wilayah kabupaten/kota, tampak bahwa dari Gambar 2.1, terlihat bahwa persentase tertinggi penduduk anak di DKI Jakarta pada tahun 2023 berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu sebesar 34,00 persen. Sama halnya dengan provinsi, persentase penduduk anak laki-laki di Kepulauan Seribu lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Pola ini terlihat merata di seluruh kabupaten/kota se-DKI Jakarta. Kota Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan persentase penduduk anak terendah, yakni 24,72 persen. Persentase penduduk anak di wilayah lainnya berkisar antara 26 persen hingga 28 persen.

Implikasi dari data ini adalah pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan anak, sesuai dengan keberadaan anak di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Selain itu, pola pengasuhan dan pendidikan yang sesuai dengan umur anak dan karakter anak di masa digital ini, membutuhkan perlakuan yang berbeda pula dalam menyiapkan SDM yang berkualitas sejak dini, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun negara.

Penduduk usia anak yang merupakan bagian dari Generasi Z dan post generasi Z atau Generasi Alfa, terlahir antara tahun 1997 hingga 2024. Mereka lahir dari orang tua yang merupakan generasi X (kelahiran era 1965-1980) dan generasi millennial (kelahiran era 1981-1996). Setiap generasi yang tumbuh dan dibesarkan pada periode yang berbeda tentunya juga memiliki karakternya masing-masing. Karakter ini dipengaruhi oleh politik, budaya, atau peristiwa yang terjadi pada periode tersebut. Sebagai contoh anak-anak generasi Alfa ini memiliki kelihaihan dalam menggunakan teknologi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi orangtua mereka, termasuk juga bagi pemerintah dalam upaya menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas yang diawali dengan membangun karakter, kemandirian dan potensi positif sejak anak. Bagaimana pemerintah menyiapkan fasilitas bermain, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas seni, budaya dan olah raga, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan anak untuk menunjang proses tumbuh kembangnya dengan baik.

Jika diamati proporsi penduduk anak menurut jenis kelamin, terlihat bahwa sebagian besar penduduk anak, lebih banyak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Hanya Jakarta Utara yang proporsi anak perempuannya lebih banyak dari anak laki-laki. Hal ini terjelaskan dari rasio jenis kelamin (*sex ratio*) anak yang nilainya berada di atas 100 (Tabel 2.2).



Gambar 2.2 Persentase Anak (017 tahun) menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Gambaran di atas yang menunjukkan banyaknya penduduk anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, tentunya sangat diperlukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait dalam menyediakan sarana dan prasarana edukasi yang sesuai dengan jenis kelamin anak. Dalam membangun area bermain anak, menyediakan fasilitas Pendidikan, fasilitas kesehatan, transportasi, dan lainnya sangat terbantu dengan data terpilah menurut jenis kelamin. Dalam lingkup keluarga juga pemilahan gender ini akan mempengaruhi pola pengasuhan anak, artinya ada perbedaan pendekatan parenting antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

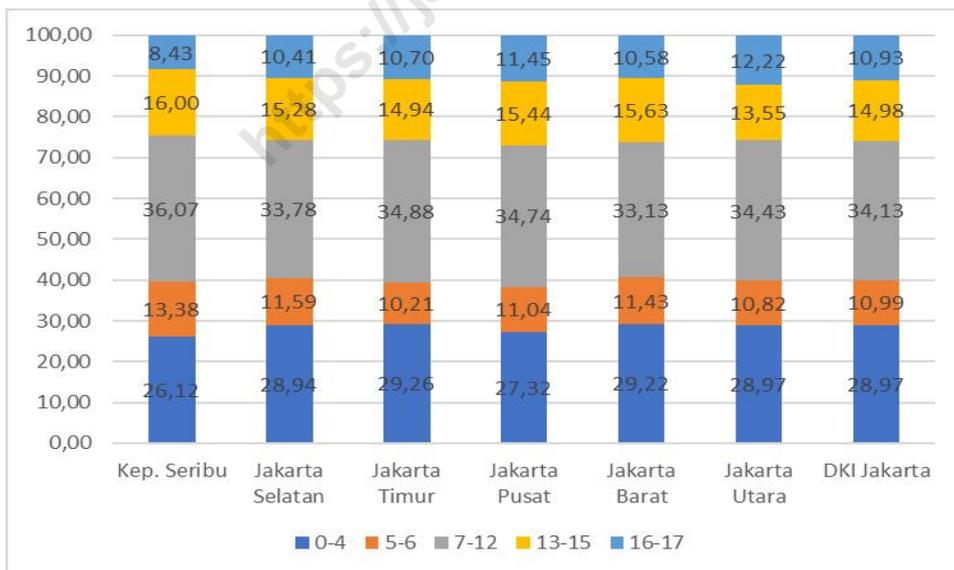
Tabel 2.2 Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2020—2023

Umur	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0—4	105,09	104,89	104,68	104,46
5—9	105,02	104,94	104,91	104,92
10—14	105,66	105,61	105,48	105,32
15—19	104,94	105,04	105,13	105,21
20—24	103,51	103,51	103,56	103,66
25—29	102,75	102,64	102,53	102,40
30—34	102,03	101,85	101,70	101,58
35—39	101,86	101,56	101,28	101,01
40—44	102,13	101,85	101,54	101,20
45—49	101,92	101,59	101,31	101,06
50—54	101,61	101,36	101,08	100,76
55—59	100,54	100,30	100,05	99,81
60—64	97,84	97,54	97,34	97,17
65—69	95,02	94,75	94,31	93,80
70—74	86,59	87,63	88,48	89,00
75+	74,57	73,98	73,46	73,14
Total	102,06	101,82	101,59	101,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Meskipun setiap anak adalah individu unik dengan karakteristiknya sendiri, ada beberapa perbedaan gender yang umumnya terlihat dalam perkembangan anak-anak. Beberapa ilustrasi yang menggambarkan perbedaan jenis kelamin tersebut antara lain, cara berkomunikasi, minat dan kegiatan yang berbeda, pendekatan Pendidikan yang berbeda, pengelolaan emosi yang berbeda, role model panutan yang berbeda, pendekatan terhadap lingkungan perteman yang berbeda dan lainnya. Dengan mengetahui perbedaan ini, maka perlakuan terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan perlu disesuaikan dengan kebutuhan gendernya.

Penduduk anak sendiri dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yakni kelompok umur 0-4 tahun, atau yang dikenal dengan istilah Balita (di bawah usia 5 tahun, kemudian kelompok 5-6 tahun, yang dikenal juga sebagai anak usia pra sekolah, selanjutnya kelompok 7-12 tahun yang merupakan kelompok usia sekolah dasar (SD), berikutnya kelompok usia 13-15 tahun, atau kelompok usia SMP/SLTP, dan terakhir kelompok usia 16-17 tahun, yakni kelompok usia SLTA/SMA.



Gambar 2.3 Persentase Anak (0—17 tahun) menurut kelompok umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dari Gambar 2.3, terlihat bahwa secara umum penduduk anak di Jakarta mayoritas berada pada kelompok usia sekolah SD, yaitu sebesar 34,13 persen. Selanjutnya diikuti kelompok balita, yaitu sebesar 28,97 persen. Urutan berikutnya adalah kelompok usia sekolah SLTP, yaitu sebesar 14,98 persen. Penduduk anak usia pra sekolah sebesar 10,99 persen dan yang terendah persentasenya pada kelompok usia SLTA sebesar 10,99 persen.

Jika diamati antar wilayah kabupaten/kota, terlihat pola yang sama dengan provinsi. Pada kelompok mayoritas anak yang berada di kelompok usia SD, tampak bahwa proporsi tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu sebesar 36,07 persen. Sebaliknya proporsi anak kelompok usia SD terendah terdapat di Jakarta Barat. Begitu pula dengan proporsi kelompok anak usia pra sekolah, persentase tertinggi terdapat di Kepulauan Seribu (13,38 persen), dan proporsi terendah terdapat di Jakarta timur (110,21 persen). Pada kelompok usia sekolah SLTP, Kepulauan Seribu juga memiliki proporsi tertinggi, sementara proporsi terendah ada di Jakarta Utara. Sebaliknya pada kelompok usia balita dan usia SLTA, Kepulauan Seribu memiliki proporsi terendah dibandingkan wilayah lainnya.

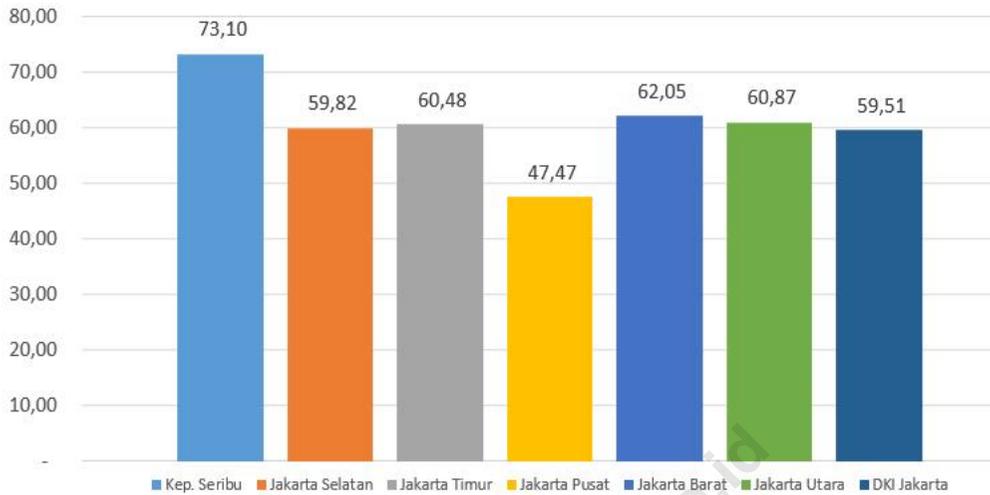
Dengan mengetahui komposisi penduduk anak menurut kelompok usia anak dan wilayah kabupaten/kota, akan diperoleh gambaran penduduk dalam berbagai kriteria. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam merancang strategi dan kebijakan untuk pembangunan bangsa, memudahkan pemerintah daerah dalam mengklasifikasikan penduduk sebagai arah pencapaian pembangunan daerah. Selain itu dengan mengetahui komposisi anak di suatu wilayah, akan diketahui potensi sumber daya manusia berdasarkan umur, jenis kelamin dan spasial. Karena usia dini merupakan fase emas pertumbuhan anak ketika kapasitas otak berkembang secara maksimal pada dimensi intelektual, emosi, dan sosial anak. Menjadi tagging jawab bersama, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk mengembangkan potensi anak ini agar menjadi asset pembangunan yang handal dan berkualitas.

2.3. Kelangsungan Hidup Anak

Sebagaimana diungkap di awal bab ini, bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini mengikat Indonesia baik ke dalam maupun keluar untuk bersungguh-sungguh melaksanakan KHA tersebut. Dalam KHA tercermin 4 (empat) hak utama anak, yaitu : hak kelangsungan hidup (survival), hak tumbuh kembang (development), hak perlindungan (protection), dan hak partisipasi (participation).

Pada bagian ini akan diulas beberapa data dan indikator terkait kelangsungan hidup anak, seperti angka kematian bayi, status perkawinan anak, dan lainnya. Hal menarik yang dapat diulas mengawali analisis keberlangsungan hidup anak, adalah keberadaan rumahtangga yang memiliki anak. Hal ini menjadi penting, karena anak dalam proses tumbuh kembangnya berada dalam lingkaran konsentris, dimana setiap lingkaran mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung bagi perkembangan hidupnya, dan keluarga merupakan lingkaran pertama yang mengelilingi kehidupan anak. Dengan demikian mengulas keberadaan rumah tangga yang memiliki anak menjadi bagian penting dalam melihat gambaran situasi anak di suatu wilayah.

Dari beberapa penelitian ditemukan adanya hubungan antara kondisi ekonomi rumah tangga dengan tingkat kesehatan atau status gizi anak khususnya pada bayi dan balita, yang tentunya dapat memengaruhi keberlangsungan hidup anak. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa pendapatan keluarga dan ketahanan pangan memiliki hubungan dengan status gizi balita (Dwi hidayati, 2023). Begitu pula dengan kondisi stunting anak, dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan keterbatasan ekonomi.



Gambar 2.4 Rumahtangga yang Memiliki yang Memiliki Anak (0—17 tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

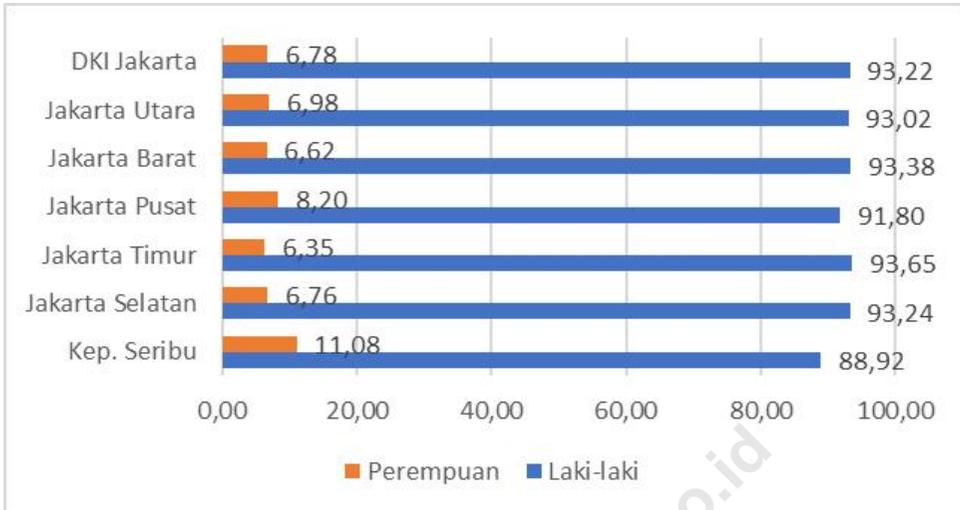
Dari Gambar 2.4, terlihat bahwa secara umum persentase rumah tangga yang memiliki anak usia 0-17 tahun di Jakarta sebesar 59,51 persen. Artinya lebih dari separo rumah tangga di Jakarta memerlukan perhatian lebih, khususnya dalam mensejahterakan keluarganya terutama kesejahteraan anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa, yang akan menjadi SDM sebagai asset pembangunan. Perhatian pemerintah tidak hanya kepada anak-anak yang sudah dilahirkan, namun juga kepada janin yang ada di kandungan calon ibu.

Dengan mengamati wilayah kabupaten kota, tampak bahwa persentase rumah tangga yang memiliki anak 0-17 tahun sangat bervariasi, dengan kisaran antara 47,47 persen hingga 73,10 persen. Persentase terbanyak rumah tangga yang memiliki anak 0-17 tahun terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, yakni sebesar 73,10 persen. Sementara persentase terendah terdapat di Kota Jakarta Pusat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Hal menarik untuk dianalisis adalah keberadaan rumahtangga yang memiliki anak 0-17 tahun dengan jenis kelamin kepala rumah tangganya.

Secara umum, kepala rumah tangga biasanya adalah laki-laki, hal ini dapat dimaklumi karena kepala rumah tangga merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Laki-laki, sebagai bapak atau suami umumnya menjadi pencari nafkah utama dalam rumahtangga. Dalam kondisi tertentu, sebuah rumah tangga dikepalai oleh perempuan, misalnya karena suaminya sudah meninggal, mengalami sakit kronis, atau bercerai. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa kepala rumahtangga perempuan, kemungkinan dapat memengaruhi ketahanan keluarga, karena kondisi-kondisi yang telah disebut di atas.

Pada Gambar 2.5, terlihat bahwa dari seluruh rumahtangga yang meemiliki anak usia 0-17 tahun di Jakarta, 93,22 persen kepala rumah tangganya adalah laki-laki, sedangkan 6,78 persennya dikepalai oleh perempuan. Kapala rumahtangga perempuan yang cenderung memiliki kerentanan dalam ketahanan keluarga, baik dari sisi sosial maupun ekonomi, paling banyak terdapat pada keluarga dengan anak 0-17 tahun di Kepulauan Seribu. Sementara yang terendah persentase rumah tangga dengan anak 0-17 tahun yang dikepalai oleh perempuan terdapat di Jakarta Timur, yaitu 6,35 persen. Gambaran rinci kepala rumahtangga dengan anak usia 0-17 tahun menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Rumahtangga yang Memiliki yang Memiliki Anak (0-17 tahun) Menurut Jenis Kelamin KRT dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Indikator lain yang terkait dengan kelangsungan hidup anak adalah angka kematian bayi (AKB) atau infant mortality rate (IMR). Angka kematian bayi penduduk Jakarta relatif rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia, bahkan yang terendah dari seluruh provinsi. AKB penduduk Jakarta pada Tahun 2020 sebesar 10,76 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini diproyeksikan mengalami penurunan pada Tahun 2025 menjadi 9,05 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Rendahnya AKB di Jakarta tentunya tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota hingga ke kelurahan-kelurahan. Fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat ini tidak hanya di lokasi tetap namun juga ada fasilitas keliling atau mobile, baik yang berada di daratan Jakarta maupun di kepulauan.

Berbagai upaya pemerintah, baik pusat maupun Pemprov DKI dalam menyediakan fasilitas pelayanan dan peningkatan kualitas SDM di bidang pelayanan masyarakat terungkap mampu menurunkan angka kematian bayi di Jakarta. Angka kematian bayi di Jakarta sesungguhnya telah terjadi penurunan yang cukup menggembirakan selama lima dekade terakhir. Dari

rata-rata 129 kematian bayi pada tahun 1971, turun tajam menjadi 82 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di tahun 1980. Selanjutnya di dekade berikutnya turun lagi menjadi 43 kematian bayi dan di tahun 2000, turun lagi menjadi 25 kematian bayi, hingga di tahun 2020 AKB mencapai 10,76 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2025 diproyeksikan AKB penduduk Jakarta turun menjadi 9,05 kematian bayi.



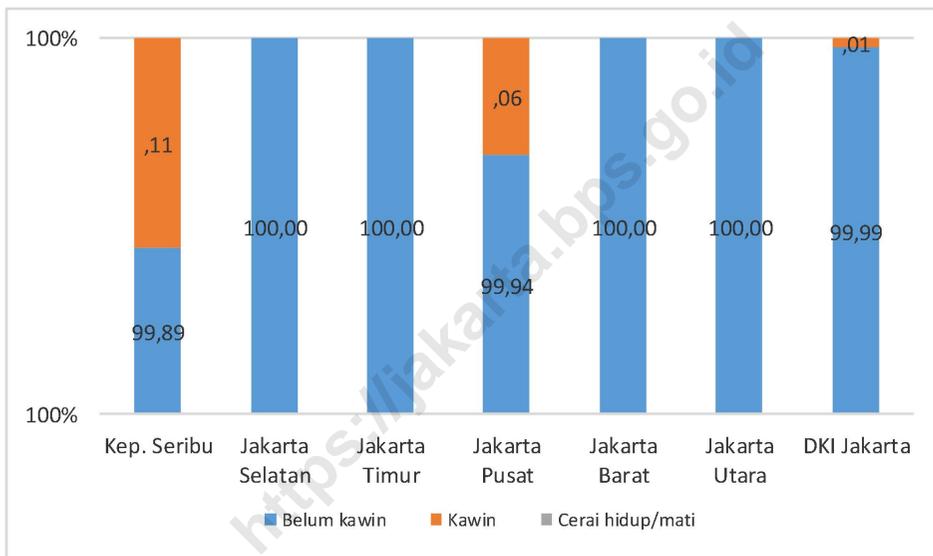
Sumber : Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk dan Proyeksi Penduduk Hasil LF SP2020

Gambar 2.6 Angka Kematian Bayi (AKB) Penduduk di Provinsi DKI Jakarta, 1971-2025

Dibandingkan penurunan yang terjadi pada dekade 1971-1990, penurunan AKB selama tiga dekade terakhir (1990-2020) relatif lambat. Hal ini dapat dipahami, karena sebagaimana yang diungkap dalam teori demografi bahwa nilai AKB di bawah 40 dikategorikan sebagai “*hard rock*” (batu karang yang keras) artinya sangat sulit diupayakan penurunannya. Berbeda jika AKB di atas 70 yang dikategorikan “*soft rock*” yang relatif lebih mudah menurunkan angkanya.

Kematian bayi sendiri tentunya tidak terlepas dari salah satu factor penyebab, yakni pernikahan dini pada perempuan. Hasil Susenas 2023 menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk usia 17 tahun ke bawah di

Jakarta, ada sekitar 0,01 persen yang berstatus kawin. Meskipun persentasenya sangat kecil, hal ini tentu patut mendapatkan perhatian pemerintah dan masyarakat luas, karena perkawinan pada usia dini memiliki dampak negatif secara sosial dan ekonomi, seperti rentannya anak putus sekolah, kemiskinan, meningkatnya peluang penularan penyalit seksual, rentan terjadi KDRT, keguguran janin rentan terjadi, meningkatkan risiko kematian pada ibu muda dan bayi, risiko terjadi perceraian, risiko stunting, dan meningkatkan risiko depresi, trauma dan stress pada pasangan muda.



Gambar 2.7 Persentase Penduduk Usia Anak (0—17 tahun) Menurut Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Umur perkawinan pertama pada perempuan juga dapat memengaruhi keberlangsungan hidup seorang anak, terutama bagi perempuan yang menikah pada usia anak-anak (kurang dari 18 tahun). Hasil penelitian secara empiris menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya memicu munculnya banyak masalah kesehatan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun seksual. Meskipun praktik ini terus menurun selama dekade terakhir, pernikahan dini masih tersebar luas. Menurut data United Nations Children’s Fund (UNICEF)

pada Juli 2023, sekitar satu dari lima anak perempuan menikah pada masa kanak-kanak di seluruh dunia. Bahkan pernikahan dini sering kali merupakan akibat dari ketidaksetaraan gender yang sudah mengakar. Alhasil, anak perempuan terkena dampak yang tidak proporsional dari praktik ini

Tabel 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama di Provinsi DKI Jakarta, 2022-2023

Umur Perkawinan Pertama	2022	2023
(1)	(2)	(3)
< 17 tahun	6,44	5,25
17-18 tahun	10,34	9,75
19-20 tahun	19,65	19,80
> 20 tahun	63,57	65,20
Total	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Hasil Susenas tahun 2023 menunjukkan terdapat lebih dari 15 persen perempuan yang melangsungkan pernikahan pertama pada usia 18 tahun ke bawah. Namun demikian, terlihat adanya sedikit penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022. Masih adanya perkawinan pada usia anak ini, dapat mengindikasikan beberapa hal diantaranya pergaulan bebas, kawin paksa, kebutuhan ekonomi atau kemiskinan, putus sekolah hingga kurangnya pemahaman akan kesehatan reproduksi pada anak dan remaja. Tampaknya pemerintah perlu mensosialisasikan secara gencar untuk meningkatkan usia kawin pada remaja, sehingga dampak negatif dari pernikahan dini dapat dihindarkan, salah satunya pada kematian bayi dan anak.

2.4. Kesejahteraan Hidup Anak

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan yang mencakup aspek kualitas hidup anak di dalam keutuhan satuan keluarga dan budaya bangsa yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial ke arah perkembangan pribadi untuk terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Upaya pembinaan kesejahteraan anak hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Untuk melihat pencapaian sasaran pembangunan terkait kesejahteraan anak akan diuraikan indikator demografi kepala rumah tangga yang memiliki anak usia 0—17 tahun, kondisi ekonomi rumahtangga yang memiliki anak 0—17 tahun berdasarkan kelompok pengeluarannya, serta status perkawinan kepala rumah tangga.

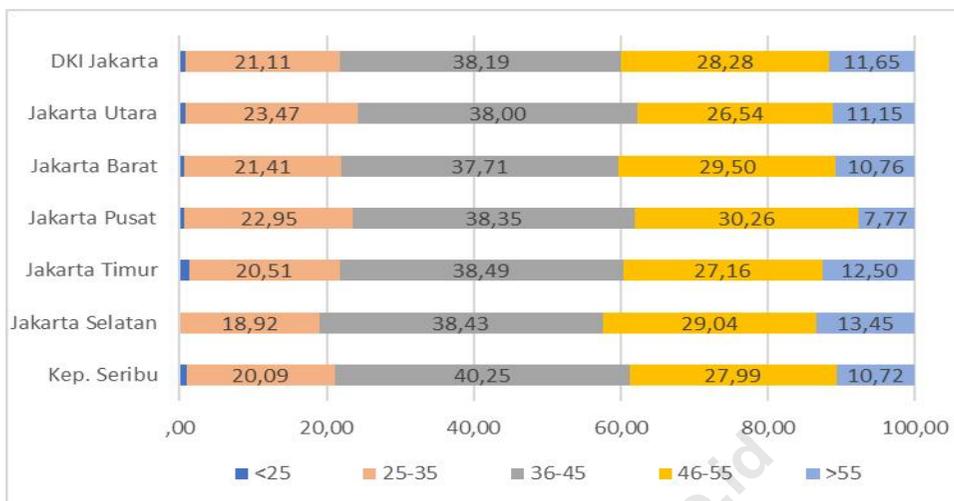
Pada Gambar 2.8 dapat dilihat bahwa sebagian besar KRT pada rumah tangga yang memiliki anak usia 0—17 tahun berstatus kawin, artinya mereka memiliki pasangan dalam rumah tangganya. Persentase KRT yang berstatus kawin sebanyak 91,89 persen. Sisanya sebanyak 5,60 persen berstatus cerai mati, 2,31 persen status cerai hidup dan 0,20 persen berstatus belum kawin. Idealnya anak berada dalam pengasuhan orangtua lengkap, yakni memiliki ibu dan ayah dalam rumahtangganya. Namun demikian, dengan berbagai sebab masih ditemui anak-anak yang diasuh hanya oleh salah satu dari orangtuanya, atau bahkan tidak diasuh oleh orangtuanya, namun oleh kerabatnya atau orang lain.

Menurut sebuah informasi yang dirilis oleh Census Bureau di tahun 2012, semakin banyak anak yang dibesarkan oleh single parent atau orang tua tunggal. Dibandingkan dengan anak yang memiliki dua orang tua yang tinggal di dalam satu rumah, anak-anak dengan single parent cenderung rentan mengalami kondisi finansial dan edukasi yang lebih buruk. Selain itu, terdapat pula pengaruh psikologis lain yang turut membentuk perilaku anak dan pencapaiannya dalam kehidupannya.



Gambar 2.8 Persentase Rumahtangga yang Memiliki yang Memiliki Anak (0-17 tahun) Menurut Status Kawin Kepala Rumahtangga (KRT) dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Gambar 2.8 menunjukkan bahwa terdapat 7,91 persen anak-anak yang tinggal dalam pengasuhan KRT dengan status *single parent*. Hal ini tentu menjadi salah satu permasalahan anak tersendiri di Jakarta. Kebanyakan orang tua *single parent* didominasi oleh sosok ibu tanpa ayah, dengan penghasilan yang di bawah rata-rata. Kondisi ini dapat memberikan pengaruh pada perkembangan sosial anak, diantaranya adalah pendidikan anak di sekolah. Ibu tunggal harus bekerja lebih banyak dan lebih lama, membuat anak merasakan dampak langsung dalam hal kurangnya perhatian dan bimbingan untuk pembelajaran di rumah. Selain itu, anak dengan *single parent* cenderung kurang mendapatkan perhatian, atau bahkan *over protected*, anak kehilangan figur salah satu dari orang tuanya, sehingga dapat berdampak pada perilaku yang tidak wajar dalam pergaulan maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pada gilirannya hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Gambar 2.9 Persentase Rumahtangga yang Memiliki Anak (0—17 tahun) Menurut Umur Kepala Rumahtangga (KRT) dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Indikator lain yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan anak adalah umur KRT dalam rumahtangga yang memiliki anak usia 0—17 tahun. Pada Gambar 2.9, terlihat bahwa secara umum rumah tangga yang memiliki anak usia 0—17 tahun di Jakarta memiliki KRT dengan usia 36—45 tahun, yaitu sebesar 38,19 persen. Sisanya sebanyak 28,28 persen KRT berusia antara 46—45 tahun, usia 25—35 tahun sebanyak 21,11 persen, dan KRT yang berusia di atas 55 tahun sebanyak 11,65 persen. Hal menarik untuk diamati adalah usia KRT dari rumah tangga yang memiliki anak 0—17 tahun pada usia kurang dari 25 tahun dan yang usianya di atas 55 tahun.

Apabila orangtua dalam hal ini diasumsikan sebagai KRT berusia relatif muda, maka dikhawatirkan orang tua belum siap dan belum cukup matang membangun rumahtangga. Kondisi ini dapat berdampak pada kehamilan usia dini, pola pengasuhan anak yang belum matang, risiko kematian bayi, serta risiko lain seperti kurangnya pemenuhan gizi dan kebutuhan anak lainnya. Dengan usia KRT yang relatif muda, dikhawatirkan mereka belum cukup pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, dan lainnya yang dapat memicu tidak hanya munculnya banyak masalah kesehatan, tetapi

juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun seksual.

Di Indonesia, terdapat batas usia minimal menikah yang diatur Undang-Undang. Sesuai dengan aturan perundangan Nomor 1 Tahun 1974, negara mengizinkan perkawinan pada pria minimal berumur 19 tahun dan wanita minimal berusia 16 tahun. Undang-undang ini telah dirubah pada tahun 2019 yang menyebutkan batas minimal usia menikah adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Namun demikian, secara factual masih ditemui masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut dan tetap melakukan praktek pernikahan dini.

Kekhawatiran lainnya adalah ketika orangtua, dalam hal ini diasumsikan sebagai KRT rumahtangga dengan anak usia 0-17 tahun yang usianya mendekati lansia atau sudah lansia. Hal ini dikarenakan, usia tersebut sudah memasuki masa pensiun atau purna bhakti ataupun sudah mulai mengalami penurunan produktivitas, sehingga memengaruhi pendapatan dan kondisi ekonomi rumahtangga. Dengan kondisi yang demikian, dikhawatirkan kebutuhan anak menjadi terkendala untuk dapat dipenuhi, baik kebutuhan Pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya.

Tabel 2.4 Persentase Rumahtangga yang Memiliki Anak 0—17 tahun Menurut kelompok Pengeluaran dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kabupaten/Kota	Kelompok Pengeluaran					Total
	Kuintil1	Kuintil	Kuintil	Kuintil	Kuintil	
Kep. Seribu	49,45	28,27	11,75	6,40	4,14	100,00
Jakarta Selatan	15,49	18,83	23,85	21,29	20,55	100,00
Jakarta Timur	29,50	19,68	13,98	16,84	20,00	100,00
Jakarta Pusat	22,61	26,98	24,06	16,49	9,86	100,00
Jakarta Barat	14,99	18,11	19,31	22,66	24,93	100,00
Jakarta Utara	15,28	21,22	24,60	21,51	17,39	100,00
DKI Jakarta	20,00	19,99	20,02	19,97	20,03	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2023

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan anak adalah status ekonomi rumahtangga. Dalam hal ini status ekonomi rumahtangga menggunakan pendekatan kelompok pengeluaran yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama adalah kuintil 1 yang merupakan kelompok pendapatan 20 persen terendah dari total rumah tangga yang memiliki anak 0-17 tahun. Selanjutnya kuintil 2 merupakan kelompok pengeluaran 20 hingga 40 persen terendah, dan seterusnya hingga kelompok pendapatan tertinggi pada kuintil 5.

Dari Tabel 2.5 terlihat bahwa secara umum, rumahtangga yang memiliki anak usia 0—17 tahun relatif merata pada seluruh kuintil, yakni sekitar 20 persen. Namun demikian pola ini tidak berlaku jika dilihat diferensiasi antar kabupaten/kota. Di Kepulauan Seribu, sebagian besar rumahtangga anak, berada pada kuintil 1, yaitu hampir separonya (49,45 persen). Hanya sedikit yang berada pada kelompok kuintil 4 dan 5, dimana masing-masing sebesar 6,40 persen dan 4,14 persen. Berbeda dengan Jakarta Selatan, dimana mayoritas rumahtangga anak berada pada kuintil 3, dan persentase terendahnya berada di kuintil 1. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga anak di Jakarta Selatan jauh lebih baik

dibandingkan dengan Kepulauan Seribu. Gambaran selengkapnya terkait kondisi ekonomi rumah tangga anak dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Indikator terakhir yang akan diulas dalam bab ini terkait dengan kesejahteraan anak adalah kepemilikan Akte Kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran sangat penting sebagai identitas anak sebagai penduduk. Tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan hak-haknya, terutama dalam mengakses layanan dasar. Agar dapat tercatat sebagai penduduk suatu negara, seseorang terlebih dahulu harus dicatat identitas kependudukannya. Di sinilah peran dari akta kelahiran, yaitu sebagai salah satu media pencatatan penduduk. Akta kelahiran lebih khusus berfungsi sebagai bukti kelayakan anak untuk kewarganegaraan dengan membuktikan negara tempat mereka dilahirkan, umur, dan identitas orangtua mereka.

Di banyak negara, akta kelahiran diperlukan untuk mendapatkan akses ke layanan dasar dan untuk memperoleh hak asasi manusia yang mendasar. Tanpa akta kelahiran, keberadaan anak akan menjadi transparan bagi negara. Anak tersebut mungkin tidak dapat mengikuti ujian sekolah, menerima imunisasi atau perawatan kesehatan gratis, memperoleh pekerjaan ketika dewasa, serta menuntut hak atas warisan ataupun perlindungan hukum di pengadilan. Bukti usia anak juga penting untuk menuntut pelaku apabila terjadi kejahatan pada anak, seperti perdagangan anak, pelecehan seksual, perekrutan dini ke dalam angkatan bersenjata, pernikahan dini, dan pekerja anak.

Begitu penting memiliki akta kelahiran, namun sangat disayangkan hingga kini satu dari empat anak di bawah usia 5 tahun secara global tidak terdaftar saat lahir. UNICEF memperkirakan sekitar 237 juta anak di bawah lima tahun di dunia saat ini tidak memiliki akta kelahiran.

Di Indonesia, berdasarkan data Susenas dari Badan Pusat Statistik (BPS), 88,11 persen anak usia 0—17 tahun sudah memiliki akta kelahiran. Hal ini menandakan kurang dari 15 persen anak di Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Akan tetapi, angka ini ketika diuraikan menurut provinsi, terlihat ada ketimpangan yang mencolok terkait kepemilikan akta kelahiran.

Sebagai gambaran Di Jogjakarta yang memiliki persentase tertinggi anak usia 0-17 tahun yang memiliki akte kelahiran, yaitu 98,78 persen memiliki gap yang tajam dengan provinsi Papua yang memiliki persentase sebesar 50,85 persen pada Tahun 2023. DKI Jakarta sendiri menempati posisi kedua tertinggi persentase anak usia 0—17 tahun yang memiliki Akte Kelahiran.

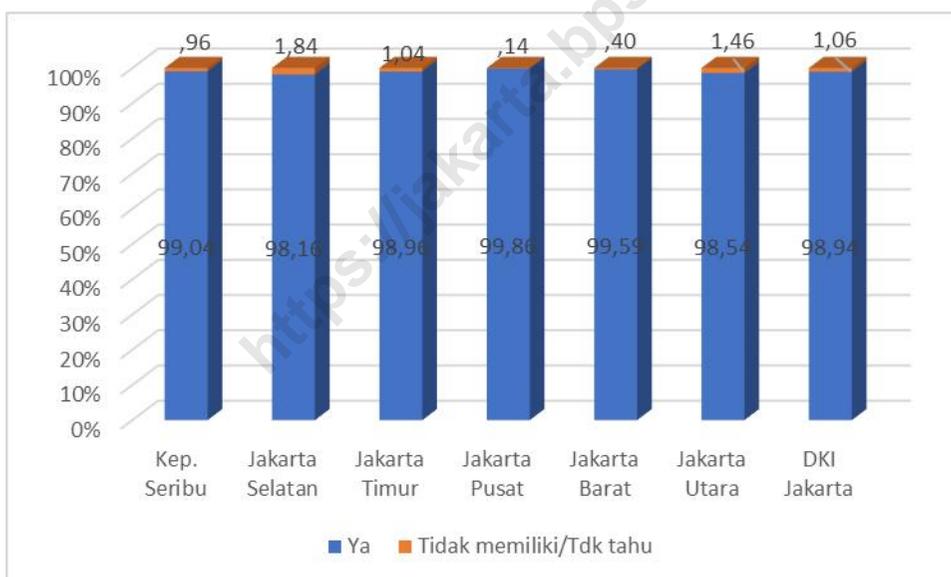
Tabel 2.5 Persentase Anak USia 0—17 tahun yang Memiliki akte Kelahiran Menurut Provinsi di Indonesia, 2021—2023

No.	PROVINSI	2021	2022	2023
1	Aceh	94,52	95,59	96,40
2	Sumatera Utara	83,02	85,14	87,68
3	Sumatera Barat	91,38	92,96	94,24
4	Riau	84,25	88,31	90,46
5	Jambi	93,37	94,62	95,06
6	Sumatera Selatan	90,05	91,93	92,90
7	Bengkulu	94,52	94,62	94,77
8	Lampung	93,51	94,49	95,05
9	Kep. Bangka Belitung	96,05	96,06	97,67
10	Kep. Riau	94,20	94,97	95,32
11	Dki Jakarta	96,93	97,83	98,66
12	Jawa Barat	84,76	88,44	90,00
13	Jawa Tengah	96,03	96,63	97,32
14	Di Yogyakarta	98,14	98,17	98,78
15	Jawa Timur	91,00	92,20	93,86
16	Banten	84,56	87,51	88,42
17	Bali	93,28	95,55	96,22
18	Nusa Tenggara Barat	88,70	88,42	89,29
19	Nusa Tenggara Timur	65,66	69,47	73,94
20	Kalimantan Barat	90,01	89,59	92,99
21	Kalimantan Tengah	86,96	88,13	91,58
22	Kalimantan Selatan	91,49	92,63	94,71
23	Kalimantan Timur	93,16	95,24	96,38
24	Kalimantan Utara	92,96	94,96	95,13
25	Sulawesi Utara	90,15	92,87	92,74
26	Sulawesi Tengah	85,11	87,68	89,42
27	Sulawesi Selatan	91,47	92,49	93,92
28	Sulawesi Tenggara	90,58	89,83	92,07
29	Gorontalo	94,02	94,81	95,95

30	Sulawesi Barat	91,83	92,77	93,66
31	Maluku	81,63	85,84	87,66
32	Maluku Utara	84,42	87,81	86,61
33	Papua Barat	74,74	77,76	79,34
34	Papua	45,19	53,77	50,85
INDONESIA		88,42	90,41	91,79

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas

Dari gambar 2.9, tampak bahwa Jakarta dengan persentase kedua tertinggi di Indonesia, anak 0—17 tahun yang memiliki akte kelahiran, sebesar 98,94 persen. Persentase ini relatif merata antar wilayah kabupaten/kota, dimana angka tertinggi berada di Kepulauan Seribu (99,04 persen) dan persentase terendah terdapat di wilayah Jakarta Selatan (98,16 persen).



Gambar 2.10 Persentase Anak Usia 0—17 tahun yang Memiliki akte Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Walaupun persentase anak 0-17 tahun yang tidak memiliki akte kelahiran relatif rendah, yaitu sebesar 1,06 persen, namun hal ini perlu mendapat perhatian pihak-pihak terkait. Hal ini mencerminkan masih belum terpenuhinya hak dasar anak, yakni hak anak atas identitas pribadinya. Faktor yang menyebabkan anak tidak memiliki akte kelahiran, salah satunya adalah

ketidapahaman orangtua atas pentingnya kepemilikan akte kelahiran bagi anak-anaknya.

Fenomena ini terutama terjadi pada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu atau anak-anak yang rentan. Anak-anak dari kalangan rentan memiliki tantangan yang lebih untuk memperoleh akta kelahiran karena rendahnya pemahaman di kalangan orang tua dan pemerintah lokal serta faktor kombinasi yang diperparah oleh kemiskinan. Pada lingkup nasional, peraturan adopsi yang belum lumrah di kota-kota kecil dan pedesaan menjadikan banyak anak kecil yang diserahkan kepada sanak saudara ataupun masyarakat sekitar tanpa dokumen yang memadai. Dampaknya anak yang tidak memiliki akte kelahiran berisiko untuk tidak mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh, seperti hak menerima waris, hak mendapatkan pekerjaan formal, hak mendapatkan Pendidikan yang layak, dan hak-hak dasar lainnya, karena identitas pribadi kependudukannya tidak terpenuhi. Tentu ini memerlukan komitmen dari semua pihak agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal untuk memiliki akte kelahiran. Upaya ini bisa dilakukan dengan menjemput bola oleh aparat terkait ke rumah-rumah yang berpotensi tertinggal dalam mengurus akte kelahiran.



Status Kesehatan Anak Provinsi DKI Jakarta 2023

Sekitar **26 dari 100 anak** mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. *Anak berusia 0-4 tahun mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi.*

0-4 tahun	35,84%
5-6 tahun	30,56%
7-12 tahun	30,56%
13-15 tahun	15,50%
16-17 tahun	14,53%

Sebagian besar upaya kesehatan yang dilakukan adalah **pengobatan sendiri** (70,59%), kemudian **rawat jalan** (45,64%), sementara **rawat inap** hanya terjadi pada sedikit kasus (2,68%).

Peningkatan Kesehatan Sejak Dini

Imunisasi



Sekitar **63 dari 100 anak** usia 12-23 bulan sudah diberi imunisasi dasar lengkap

Pemberian ASI



Sekitar **72 dari 100 bayi** usia 0-23 bulan mendapatkan ASI

Penolong Persalinan



Hampir seluruh ibu (**99 dari 100**) melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan dalam 2 tahun terakhir



BAB III STATUS KESEHATAN ANAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia termasuk hak dasar anak yang harus dipenuhi dengan baik. Anak yang sehat akan menjadi investasi bagi modal manusia yang berkualitas di masa depan. Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Negara Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan tersebut, masalah kesehatan anak diprioritaskan dalam perencanaan dan penataan pembangunan bangsa.

3.1 Status Kesehatan Anak

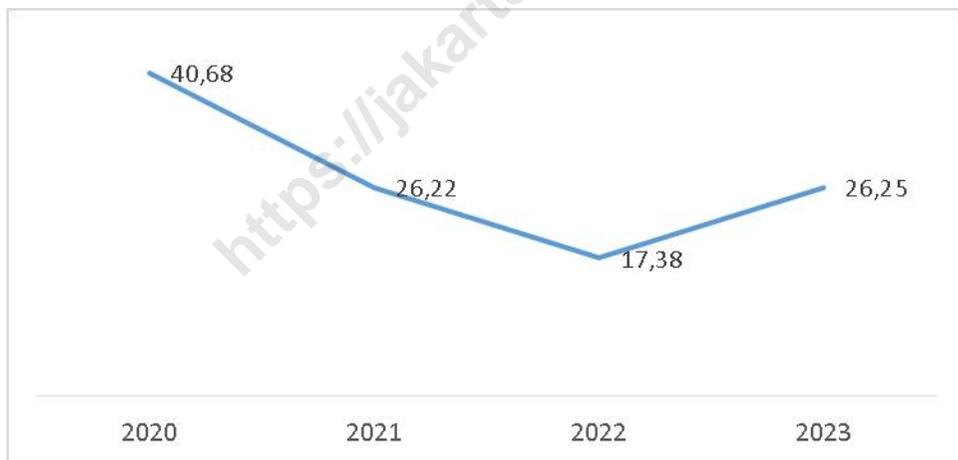
Di Indonesia, upaya menjaga hak anak-anak termasuk hak kesehatan telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan kesehatan. Selanjutnya, pada Pasal 28 B Ayat 2 juga disebutkan lebih lanjut jika setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemeliharaan kesehatan anak salah satunya diwujudkan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk anak tanpa terkecuali.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijabarkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan pada anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita, hingga remaja, termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan. Untuk memantau kesehatan anak Indonesia, dibutuhkan data yang rutin dan berkelanjutan. Dalam Susenas, tingkat kesehatan dilihat

melalui keluhan kesehatan yang dirasakan dalam sebulan terakhir dan keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari atau angka kesakitan yang dikumpulkan setiap tahun.

Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, dan sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

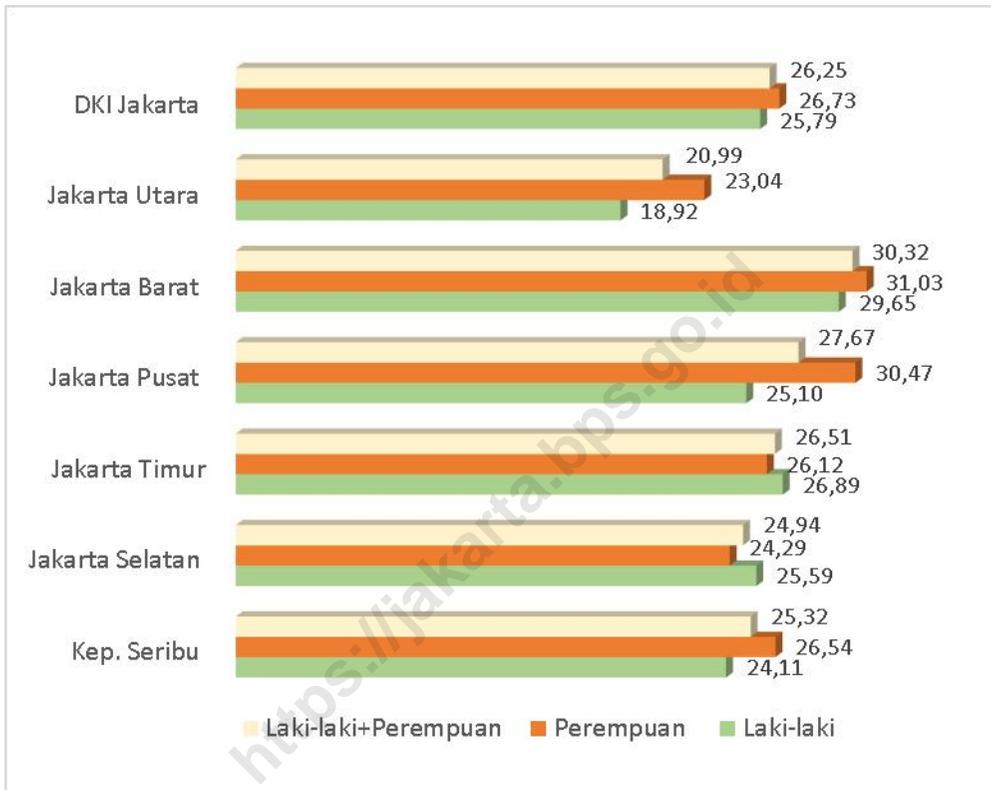


Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 3.1 Persentase Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada tahun 2022 secara Nasional, sekitar 29 dari 100 anak mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, sedangkan di DKI Jakarta di tahun yang sama hanya 17 dari 100 anak yang mengalami keluhan kesehatan. Di DKI Jakarta persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan mengalami

penurunan semanjak tahun 2020 hingga 2022 dengan angkanya berturut turut 40,68 persen di tahun 2020, 26,22 persen tahun 2021 dan 17,38 persen tahun 2022 tetapi kembali mengalami kenaikan ditahun 2023 (26,25%).



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

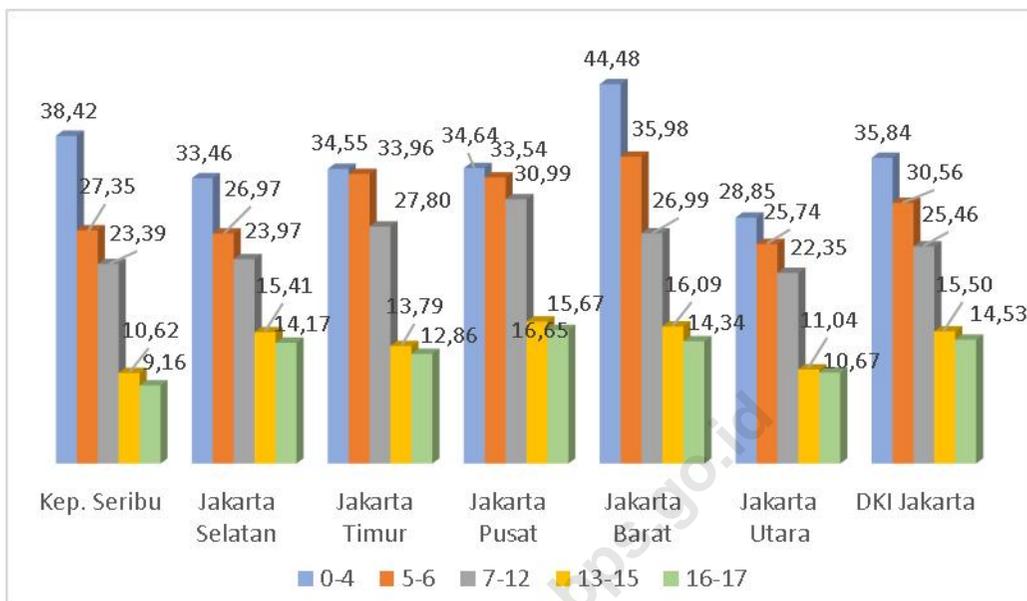
Gambar 3.2 Persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Keluhan kesehatan yang akan dibahas dalam publikasi ini adalah segala keluhan kesehatan yang dialami oleh anak menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin pada tahun 2023 yang berasal dari Susenas Maret 2023. Gambar 3,2 menunjukkan bahwa secara total persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan di DKI Jakarta mencapai 26,25 persen. Persentase anak perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi

dibandingkan laki-laki, yakni sebesar 26,73 persen dibandingkan 25,79 persen pada anak laki-laki. Kondisi tersebut sejalan dengan Sebuah studi yang dilakukan oleh Sharyn Clough, yang diterbitkan dalam jurnal *Social Science and Medicine*, menyatakan berdasarkan data mengenai hipotesis kebersihan, penyakit karena lemahnya kekebalan tubuh seseorang dapat disebabkan oleh perilaku masa kecilnya meliputi aspek-aspek perilaku dan psikologis.

Anak perempuan cenderung berpakaian lebih bersih dan lebih suka bermain di dalam ruangan daripada anak laki-laki. Kebiasaan bermain di area yang bersih tersebut ternyata membuat anak perempuan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah daripada anak laki-laki. Jika seseorang telah beberapa kali terserang penyakit yang disebabkan oleh kuman, maka tubuh secara otomatis akan membentuk perlindungan. Ketika kuman yang sama datang menyerang lagi, sistem imun tubuh telah akrab dengan kuman tersebut dan akan kebal terhadap penyakit. Sehingga ada perbedaan yang signifikan dalam jenis dan jumlah kuman pada anak perempuan dan anak laki-laki, dan ini mungkin menjelaskan beberapa perbedaan kesehatan antara pria dan wanita. Wanita cenderung lebih lemah dan mudah sakit dibanding pria.

Jika di lihat menurut kabupaten/kota di DKI Jakarta, terdapat tiga kota yang memiliki persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan angka Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, yakni: Jakarta Timur (26,51 %), Jakarta Pusat (27,67%), dan Jakarta Barat (30,32%). Adapun kota yang memiliki persentase anak yang mengalami keluhan tertinggi yaitu Jakarta Barat dengan persentase anak laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 29,65 persen dan anak perempuan sebesar 31,03 persen.



Sumber :Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 3.3 Persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir menurut Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Jika dilihat menurut kelompok usia, dilihat berdasarkan hasil Susenas menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia maka keluhan kesehatan akan semakin berkurang, hal ini disebabkan kekebalan tubuh akan semakin baik seiring dengan bertambahnya usia, anak yang berumur 0-4 tahun mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia di atasnya yakni sebesar 35,84 persen, sedangkan yang berumur 5—6 tahun mengalami keluhan kesehatan sebesar 30,56 persen, kelompok usia 7-12 tahun mengalami keluhan kesehatan sebesar 25,46 persen, kelompok usia 13—15 tahun mengalami keluhan kesehatan sebesar 15,50 persen, dan kelompok usia 16—17 tahun mengalami keluhan kesehatan sebesar 14,53 persen. Pola yang sama juga terlihat menurut kabupaten/kota, bahwa

semakin bertambahnya usia maka keluhan kesehatan akan semakin berkurang.

Angka kesakitan

Selain keluhan kesehatan, dari Susenas juga dapat diperoleh informasi persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari atau angka kesakitan. Berdasarkan gambar 3.4 terlihat bahwa angka kesakitan anak di DKI Jakarta masih di bawah angka Nasional di setiap tahunnya, dan juga trend nya mengalami penurunan baik secara Nasional maupun di Provinsi DKI Jakarta di tiga tahun terakhir, dan ini menunjukkan pola yang baik. Pada tahun 2022 angka kesakitan anak di Indonesia sebesar 13,55 persen, di tahun 2021 persentasenya mencapai 11,75 persen dan di tahun 2020 mencapai 17,59 persen. Sedangkan angka kesakitan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 (19,45%), tahun 2021 (10,83%), dan tahun 2022 (4,3%) (Gambar 3.4). Pola statistik ini serupa dengan persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir yang juga mengalami penurunan.



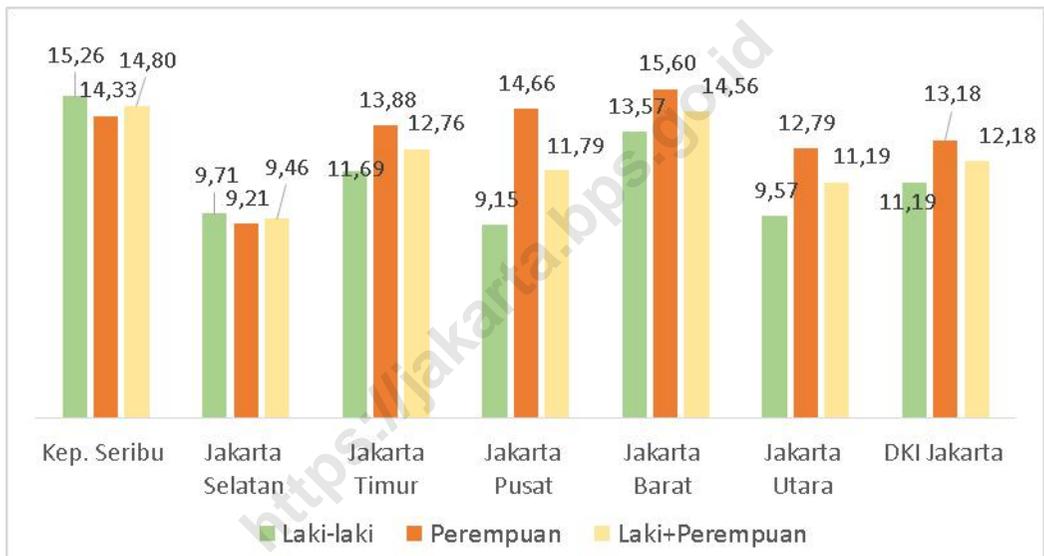
Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 3.4 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari di Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta, 2020—2022

Pada gambar 3.5 terlihat bahwa angka kesakitan anak di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2023 yakni menjadi 12,18. Naiknya angka kesakitan ini bisa jadi anak sekarang disebabkan oleh pengaturan konsumsi pola makan yang saat ini lebih banyak mengandung gula, garam dan lemak (GGL) berlebih, kurangnya melakukan aktivitas fisik karena lebih suka bermain hp dan komputer hingga adanya penerapan pola asuh dalam keluarga yang kurang tereduksi untuk menyediakan makanan bergizi seimbang, yang mengakibatkan jika anak mengalami keluhan kesehatan maka bisa berakibat lebih parah lagi.

Pada gambar 3.5 juga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari total persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan, tidak seluruhnya terganggu dalam aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-hari di Provinsi

DKI Jakarta sebesar 12,18 persen, sedangkan yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 26,25 persen. Jika di lihat menurut jenis kelamin, jika di lihat dari keluhan kesehatan yang dialami, anak perempuan mengalami keluhan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Begitupula dengan angka kesakitan anak perempuan mengalami angka kesakitan yang lebih tinggi yakni sebesar 13,18 persen dan anak laki-laki sebesar 11,19 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 3.5 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari menurut Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kepulauan Seribu memiliki persentase anak yang mengalami keluhan dan terganggunya pekerjaan sehari-hari lebih tinggi dibandingkan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menarik karena anak di Kepulauan Seribu mengalami keluhan kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, tetapi jika di lihat angka kesakitannya justru lebih tinggi (14,80%). 2 Kota lainnya yang memiliki angka

kesakitan lebih tinggi dibandingkan Provinsi DKI Jakarta yakni Kota Jakarta Barat (14,56%) dan Jakarta Timur (12,76%).

Tabel 3.1 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari menurut Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kab/Kota	Kelompok Umur					Total
	0—4	5—6	7—12	13—15	16—17	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kep. Seribu	22,13	14,85	15,02	5,87	8,00	14,80
Jakarta Selatan	10,24	14,40	9,48	8,22	3,55	9,46
Jakarta Timur	16,10	16,12	14,59	6,65	3,03	12,76
Jakarta Pusat	17,52	9,66	10,42	10,52	6,06	11,79
Jakarta Barat	24,77	15,72	11,58	5,17	8,35	14,56
Jakarta Utara	13,96	13,33	11,85	7,01	5,50	11,19
DKI Jakarta	16,81	14,64	11,98	6,97	5,17	12,18

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

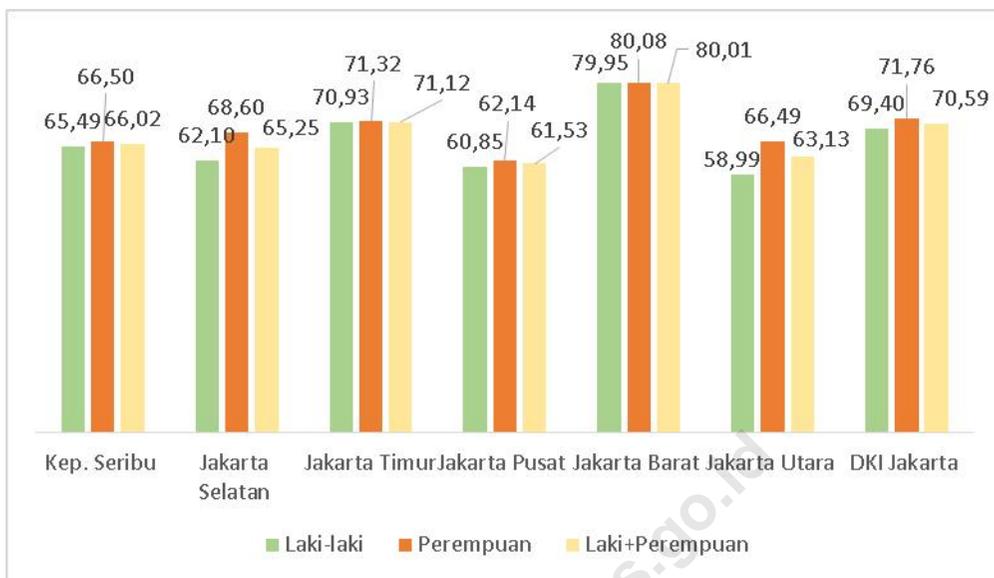
Sama halnya dengan angka keluhan kesehatan, pada angka kesakitan anak juga menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia maka angka kesakitan akan semakin berkurang, hal ini disebabkan kekebalan tubuh akan semakin baik seiring dengan bertambahnya usia, anak yang berumur 0—4 tahun mengalami angka kesakitan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia di atasnya yakni sebesar 16,81 persen, sedangkan yang berumur 5—6 tahun mengalami angka kesakitan sebesar 14,64 persen, kelompok usia 7—12 tahun mengalami angka kesehatan sebesar 11,98 persen, kelompok usia 13—15 tahun mengalami keluhan kesehatan sebesar 6,97 persen, dan kelompok usia 16—17 tahun mengalami keluhan kesehatan sebesar 5,17 persen.

Upaya kesehatan

Selain mengumpulkan statistik atau indikator yang berhubungan dengan status kesehatan, dalam Susenas juga dikumpulkan informasi mengenai upaya kesehatan yang terdiri dari mengobati sendiri, rawat jalan, serta rawat inap. Berbagai upaya pengobatan seharusnya dilakukan oleh orang tua anak saat seorang anak mengalami keluhan kesehatan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti orang tua mengobati sendiri anak yang mengalami keluhan kesehatan, namun ada juga orang tua yang mengunjungi fasilitas dan tenaga kesehatan untuk berobat jalan atau rawat inap untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat.

Gambar 3.6 menunjukkan sekitar 70 dari 100 anak yang memiliki keluhan kesehatan pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir. Sebaliknya, tidak terlihat perbedaan yang signifikan untuk pola anak yang memiliki keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri menurut jenis kelamin anak. Orang tua yang memilih untuk mengobati sendiri anak yang mengalami keluhan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 70,59 persen. Anak perempuan yang mengobati sendiri mempunyai persentase lebih besar dibandingkan anak laki-laki yakni sebesar 71,76 persen dibandingkan 69,40 persen.

Banyak faktor yang menyebabkan banyak orangtua memilih mengobati sendiri anaknya karena mereka percaya bahwa penyakit anaknya dapat sembuh dengan mudah, bukan termasuk penyakit yang serius, dan penyakit tersebut sering terjadi pada anak-anak sehingga tidak perlu berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, selain itu obat yang didapatkan selain dari fasilitas kesehatan pastinya lebih murah dan juga sangat menghemat waktu tanpa perlu berobat ke fasilitas kesehatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 3.6 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kabupaten/kota yang memiliki persentase anak dengan keluhan kesehatan dan pengobatan sendiri di atas angka Provinsi DKI Jakarta sebanyak dua wilayah. Kedua wilayah tersebut yaitu Jakarta Barat sebesar 80,01 persen dengan anak laki-laki nya sebesar 79,95 persen dan persentase anak perempuannya sebesar 80,08 persen dan Kota Jakarta Timur dengan persentase sebesar 71,12 persen dengan persentase laki-lakinya sebesar 70,93 persen dan persentase perempuannya sebesar 71,32 persen.

Sedangkan Kota yang paling rendah yakni Kota Jakarta Pusat dengan persentase sebesar 61,53 persen, laki-lakinya sebesar 60,85 persen dan perempuannya sebesar 62,14 persen. Jika di lihat menurut kelompok umur, persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengobati sendiri tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok umur 0-4 hingga

kelompok umur 16—17 tahun. Persentase anak yang mengobati sendiri untuk semua kelompok umur sudah di atas 60 persen.

Tabel 3.2 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Menurut Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta, 2023

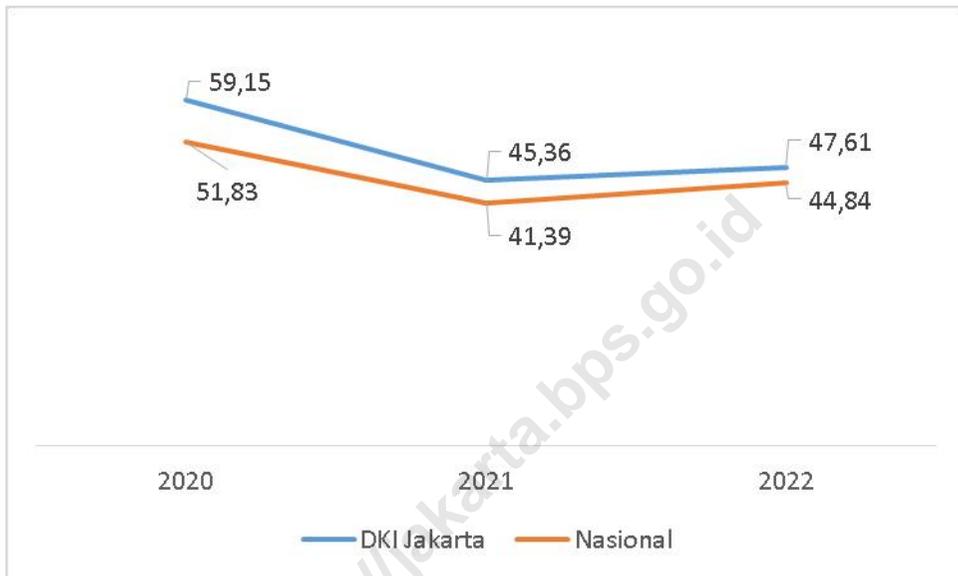
Kab/Kota	Kelompok Umur				
	0—4	5—6	7—12	13—15	16—17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Seribu	49,24	76,34	69,35	100,00	96,24
Jakarta Selatan	60,11	73,50	64,38	64,46	84,83
Jakarta Timur	69,26	71,78	73,05	70,64	69,99
Jakarta Pusat	50,61	62,05	69,13	64,18	79,61
Jakarta Barat	75,62	77,96	85,50	74,17	97,85
Jakarta Utara	62,60	46,55	65,39	81,20	58,55
DKI Jakarta	67,13	70,40	73,07	70,58	80,60

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Rawat Jalan

Upaya kesehatan berikutnya selain mengobati sendiri adalah rawat jalan. Indikator rawat jalan dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan. Pada gambar 3.7 terlihat bahwa persentase anak yang memiliki keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir baik secara nasional maupun di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan pada tahun 2021—2022. Peningkatan ini kemungkinan terjadi sehubungan dengan kekhawatiran masyarakat yang semakin berkurang untuk berobat ke fasilitas kesehatan karena kasus COVID-19 di Indonesia telah menunjukkan kecenderungan menurun. Di Indonesia Sekitar 45 dari 100 anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang

memiliki keluhan kesehatan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir. Sedangkan di DKI Jakarta, skitar 48 dari 100 anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang memiliki keluhan kesehatan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 3.7 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia, 2020—2022

Pada tahun 2023, persentase anak yang melakukan rawat jalan sebesar 45,64 persen, terjadi penurunan dari tahun 2022 tetapi tidak terlalu signifikan. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, persentase terbesar yaitu di Jakarta Pusat sebesar 56,42 persen, di mana anak laki-laki sebesar 59,89 persen dan anak perempuan sebesar 53,30 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar. 3.8 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel 3.3 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kab/Kota	0—4	5—6	7—12	13—15	16—17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Seribu	67,66	27,99	34,06	0,00	5,16
Jakarta Selatan	49,93	31,19	43,71	42,09	40,15
Jakarta Timur	52,31	42,10	50,20	53,90	51,67
Jakarta Pusat	62,63	66,27	54,03	39,68	38,67
Jakarta Barat	47,61	43,94	23,66	26,57	25,55
Jakarta Utara	56,61	38,88	54,78	26,02	24,15
DKI Jakarta	51,77	42,48	43,05	38,57	30,44

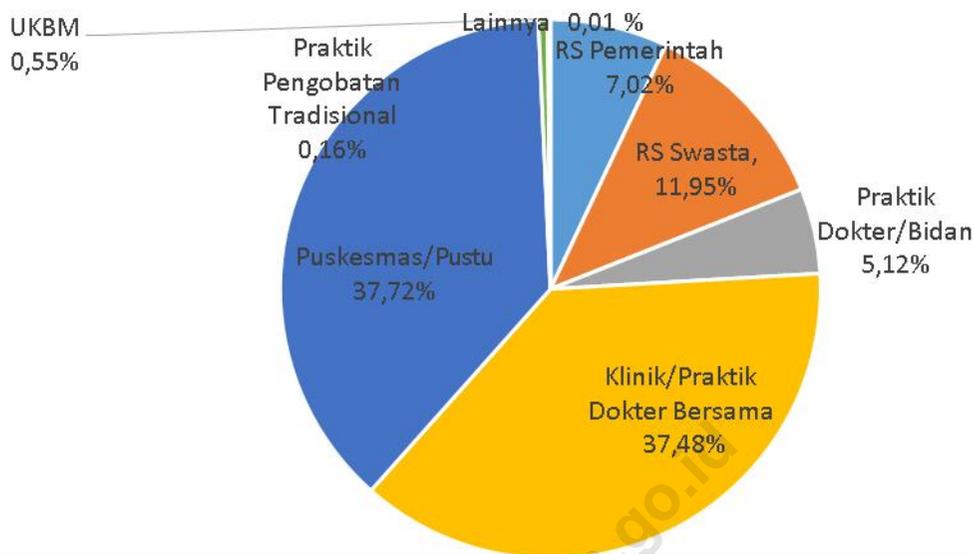
Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Adapun Kota dengan persentase terkecil terletak di Kota Jakarta Barat yakni sebesar 35,76 persen, dengan persentase anak laki-laki lebih besar

dibandingkan anak perempuan. Persentase anak laki-laki di Jakarta Barat yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan rawat jalan sebesar 36,00 persen dan anak perempuan sebanyak 35,52 persen (Gambar 3.7). Sementara menurut kelompok umur, persentase anak yang melakukan rawat jalan akan cenderung menurun seiring dengan semakin bertambahnya umur anak (Tabel 3.3).

Terdapat berbagai fasilitas kesehatan yang dapat dipilih untuk melakukan rawat jalan. Pada anak, terlihat puskesmas/pustu menjadi tempat yang paling banyak dipilih yakni sebanyak 37,73 persen, diikuti dengan klinik/praktik dokter bersama sebanyak 37,48 persen. Tingginya pemanfaatan Puskesmas di Indonesia, khususnya di Jakarta berhubungan dengan upaya mewujudkan universal *health coverage* bagi seluruh penduduk Indonesia. Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), puskesmas memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, serta kuratif yang terjangkau. Memastikan keberadaan dan kelangsungan FKTP merupakan upaya yang efisien dan efektif dalam hal biaya untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara merata dan upaya untuk mencegah beban karena penyakit yang dapat dicegah, termasuk pada anak (Beattie, Yates, & Noble, 2016).

Selain puskesmas dan klinik/praktek dokter bersama, orang tua anak juga memilih RS Swasta sebanyak 11,95 persen, RS Pemerintah sebanyak 7,02 persen, praktek dokter/bidan sebanyak 5,12 persen, dan sisanya memilih pengobatan tradisional/alternatif dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar. 3.9 Persentase Anak yang Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan di Provinsi DKI Jakarta, 2023

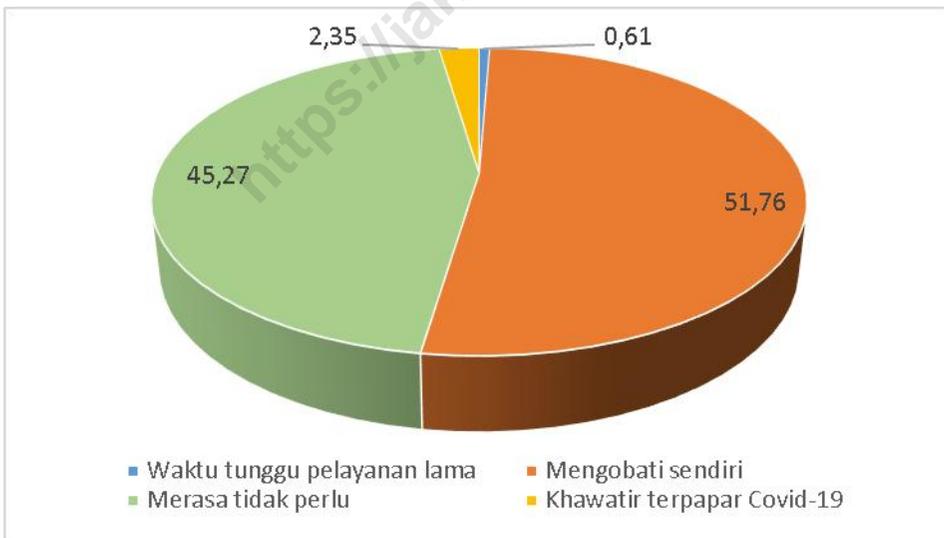
Tabel 3.4 Persentase Anak yang Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kab/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/Pustu	UKBM	Praktik Pengobatan Tradisional	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kep. Seribu	8,41	0,00	8,09	2,22	79,12	0,00	0,00	2,17	100,00
Jakarta Selatan	5,63	18,60	1,11	40,04	34,63	0,00	0,00	0,00	100,00
Jakarta Timur	3,39	8,19	5,31	43,11	38,95	1,05	0,00	0,00	100,00
Jakarta Pusat	11,49	6,15	8,19	14,11	60,06	0,00	0,00	0,00	100,00
Jakarta Barat	4,10	12,16	6,91	47,16	28,98	0,00	0,69	0,00	100,00
Jakarta Utara	16,92	15,49	4,75	25,36	36,18	1,30	0,00	0,00	100,00
DKI Jakarta	7,02	11,95	5,12	37,48	37,72	0,55	0,16	0,01	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Sama halnya dengan Provinsi DKI Jakarta, jika di lihat menurut kabupaten/kota, pola yang di tunjukkan di kabupaten/kota juga sama yakni persentase tempat rawat jalan terbanyak yaitu di Puskesmas dan Klinik/Praktek dokter bersama, kemudian di susul RS Swasta dan RS Pemerintah.

Tidak semua anak-anak yang memiliki keluhan kesehatan melakukan rawat jalan dalam sebulan terakhir. Menurut data Susenas tahun 2023, alasan tertinggi yang mendasari anak-anak yang memiliki keluhan kesehatan namun tidak rawat jalan dalam sebulan terakhir adalah karena mengobati sendiri dan merasa tidak perlu (51,76% dan 45,27%). Akan tetapi, yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapat 2,35 persen anak tidak rawat jalan karena alasan khawatir akan terpapar covid-19, dan 0,61 persen lainnya tidak mau berobat jalan karena merasa waktu tunggu pelayanan lama.

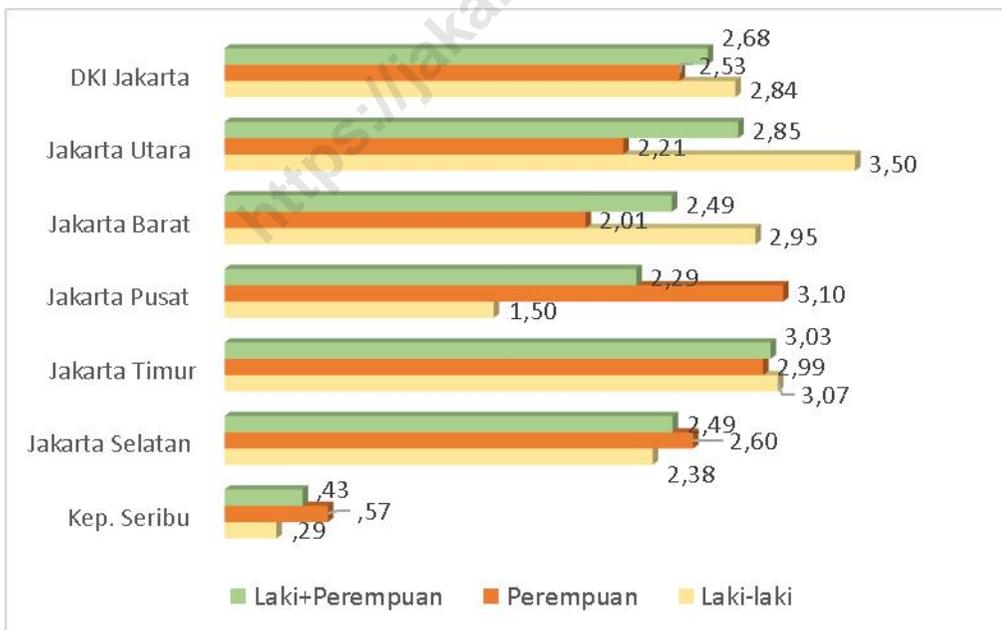


Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 3.10 Persentase Anak yang Tidak Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Tidak Rawat Jalan di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Rawat Inap

Rawat inap merupakan upaya kesehatan yang biasanya dilakukan ketika keluhan kesehatan semakin parah. Pada gambar 3.10 terlihat bahwa anak yang menjalani rawat inap dalam setahun terakhir ada sebanyak 2,68 persen, dengan persentase terbesar yakni anak laki-laki sebesar 2,84 persen dan anak perempuan sebesar 2,53 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, persentase anak yang menjalani rawat inap di Kota DKI Jakarta juga perbedaannya tidak signifikan yakni berkisar antara 2 hingga 3 persen untuk wilayah kota, yang tertinggi yakni di Kota Jakarta Timur (3,03%), dan yang terendah yakni di Kota Jakarta Pusat yakni 2,29 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan yang terendah dari seluruh wilayah kab/kota yakni hanya 0,43 persen anak yang menjalani rawat inap.

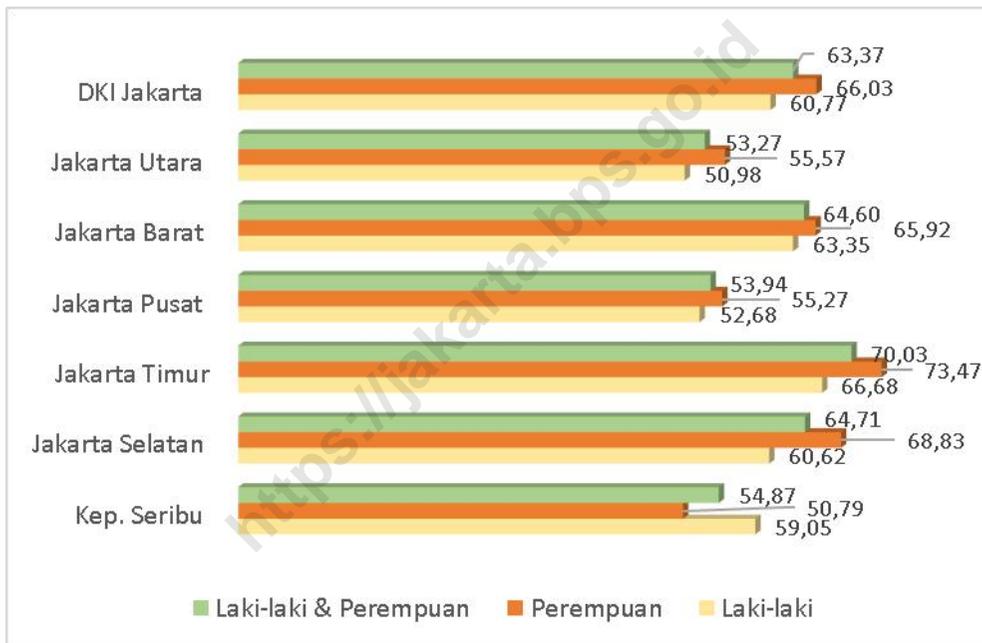


Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 3.11 Persentase Anak yang Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

3.2 Imunisasi Balita

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 130 menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak, Idealnya, anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sejak berumur 12 bulan. Tujuan dilakukan imunisasi pada anak adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 3.12 Persentase Anak yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Beberapa penyakit menular yang menyerang anak berumur 0—11 bulan adalah Tuberkulosis (TBC), Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis, Campak, dan Polio. Anak yang mendapatkan imunisasi akan terlindung dari penyakit tersebut, sehingga akan terhindar dari kecacatan atau kematian. Imunisasi dasar lengkap yang dicakup meliputi imunisasi Bacillus Calmete

Guerin (BCG) sebanyak 1 (satu) kali, Diphteria Pertusis Tetanus (DPT) sebanyak 3 (tiga) kali, polio sebanyak 3 (tiga) kali, Hepatitis B sebanyak 3 (tiga) kali, dan imunisasi campak sebanyak 1 (satu) kali.

Berdasarkan Gambar 3.12 terlihat bahwa persentase Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 Bulan di DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 63,37 persen, dan jika dilihat menurut kabupaten/kota seDKI Jakarta persentase anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sudah lebih dari 50 persen, dan yang tertinggi di Kota Jakarta Timur mencapai 70,03 persen, disusul Kota Jakarta Selatan sebesar 64,71 persen dan Kota Jakarta Barat sebesar 64,60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran orangtua akan manfaat penting imunisasi bagi anak sudah cukup tinggi.

Tabel 3.5 Persentase Anak yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Imunisasi di DKI Jakarta, 2023

Kab/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak/Rubella- MMR	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	78,67	76,47	77,52	60,52	75,32
Jakarta Selatan	82,07	81,07	80,74	76,65	78,41
Jakarta Timur	85,50	83,20	84,06	74,19	85,89
Jakarta Pusat	74,48	74,81	75,43	63,24	74,41
Jakarta Barat	82,75	80,73	82,51	68,18	81,71
Jakarta Utara	74,66	71,54	71,04	64,78	70,62
DKI Jakarta	81,35	79,44	80,03	70,68	79,70

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Jika di lihat menurut jenis imunisasi dasar (tabel 3.5) yang diterima anak usia 12-23 bulan, BCG menempati urutan pertama yakni dengan presentase tertinggi di antara jenis imunisasi lainnya yakni sebesar 81,35

persen, kemudian polio (80,03%), Hepatitis B (79,70 %), DPT (79,44%), dan Campak/rubella-MMR (70,68%).

3.3 Pemberian Air Susu Ibu

Selain mendapatkan imunisasi dasar lengkap, pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada anak juga merupakan salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan pada 1.000 hari pertama kelahiran. Pemberian ASI memberikan manfaat baik bagi ibu maupun bayinya. Beberapa manfaat pemberian ASI bagi bayi adalah mencegah terserang penyakit, membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Sedangkan manfaat bagi ibu di antaranya mengatasi rasa trauma dan mencegah kanker payudara (Kementerian Kesehatan, 2018).

ASI adalah cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara Ibu melalui proses menyusui. Kolostrum pada ASI merupakan cairan encer yang keluar pada hari pertama hingga hari ke-4/ke-7, kaya akan zat anti-infeksi dan mengandung kekebalan 10—17 kali lebih banyak dari susu matang (matur). Zat kekebalan tersebut dapat melindungi bayi dari penyakit diare, infeksi telinga, batuk, pilek dan penyakit alergi.

Dunia kesehatan menyatakan bayi yang usianya kurang dari 6 bulan masih sangat rentan pada pencernaannya, sehingga tidak sedikit kematian bayi disebabkan oleh diare dan sebagainya. Pemberian ASI dianggap salah satu solusi untuk dapat menekan angka kematian pada bayi. Adanya faktor protektif dan nutrien yang sesuai dalam ASI menjamin status gizi bayi baik serta kesakitan dan kematian anak menurun. Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, UNICEF dan WHO merekomendasikan sebaiknya diberikan ASI Eksklusif.

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa persentase baduta di DKI Jakarta yang pernah diberi ASI sebanyak 90,69 persen, jika di lihat jenis kelamin bayi laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, bayi

perempuan yang pernah diberi ASI sedikit menunjukkan angka yang lebih tinggi yakni sebesar 92,01 dan bayi laki-laki sebesar 89,74 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, persentase baduta yang pernah diberi ASI menurut kabupaten/kota se-DKI Jakarta sudah diatas 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu di seluruh kabupaten/kota se-DKI Jakarta terhadap pentingnya manfaat ASI eksklusif sudah semakin baik.

Tabel. 3.6 Persentase Penduduk Berumur 0—23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2023

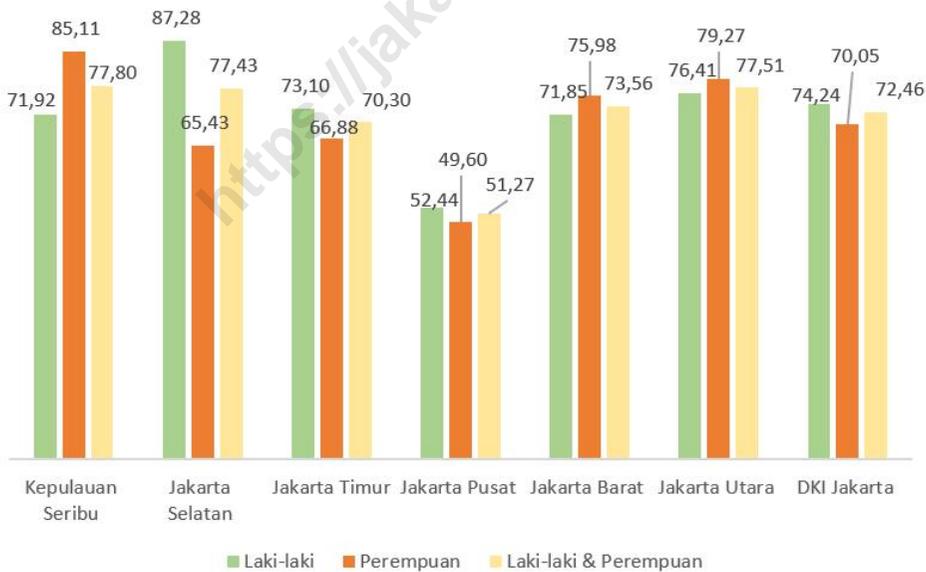
Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	88,67	81,21	85,18
Jakarta Selatan	92,88	100,00	95,96
Jakarta Timur	81,38	93,49	86,41
Jakarta Pusat	88,37	81,80	85,53
Jakarta Barat	93,91	94,39	94,11
Jakarta Utara	91,23	82,57	87,69
DKI Jakarta	89,74	92,01	90,69

Sumber : Susenas Maret 2023, BPS

Padahal pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan pada 1.000 hari pertama kelahiran yakni hingga anak usia 2 tahun. Beberapa faktor internal yang membuat bayi tidak mendapatkan ASI, contohnya air susu dari ibu tidak keluar atau kering, ibu merasa kesakitan pada payudara karena membengkak atau bagian puting yang lecet membuat ibu tidak dapat memberikan ASI pada bayi dan diberikan penggantinya yaitu susu formula, selain itu anak tidak tinggal dengan ibu

kandungnya (anak yang diadopsi orang lain), dan ada beberapa ibu yang menganggap memberikan ASI akan membuat bentuk payudaranya menjadi tidak indah lagi. Sedangkan faktor eksternal bisa hadir dari keluarga seperti kebudayaan dan kesalahpahaman beberapa orang tua adalah cara berfikir bahwa bayi akan jauh lebih pintar dan lebih sehat jika diberikan susu formula.

Seorang bayi dan balita mendapatkan gizi yang optimal bahwa jika mereka mendapatkan ASI eksklusif (*exclusive breastfeeding*) selama enam bulan pertama dan terus mendapatkan ASI selama dua tahun atau lebih (*continued breastfeeding*), dilengkapi dengan pemberian makanan pendamping ASI (*complementary feeding*) secara tepat dan memadai setelah enam bulan (WHO/UNICEF, 2018).



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 3.13 Persentase penduduk berumur 0—23 bulan (Baduta) yang Disusui/Diberi ASI selama Sehari Kemarin menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dari gambar 3.13 terlihat bahwa sebanyak 72,46 persen bayi di seluruh DKI Jakarta pada usia 0-23 bulan yang mendapatkan ASI dilengkapi dengan pemberian makanan pendamping ASI. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, bayi usia 0-23 bulan yang masih mendapatkan ASI juga masih tinggi yakni rata-rata di atas 50 persen, paling tinggi terdapat di Kepulauan Seribu sebesar 77,80 persen dan paling rendah di Kota Jakarta Pusat yakni sebesar 51,27 persen.

Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa rata-rata baduta di Jakarta, diberi ASI oleh ibunya selama 10 bulan. Jika di lihat menurut kabupaten/kota rata-rata baduta diberi ASI berkisar antara 8 hingga 11 bulan. Baduta yang mendapatkan ASI kurang dari 6 bulan hanya ada 26,94 persen, sedangkan sisanya 73,06 persen mendapatkan ASI dari umur 6 hingga 23 bulan.

Tabel 3.7 Persentase penduduk berumur 0—23 bulan (Baduta) yang Disusui/Diberi ASI Menurut Lamanya Pemberian ASI Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kabupaten/Kota	<6	6-23	Rata-rata Lama Pemberian ASI
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	23,93	76,07	11,05
Jakarta Selatan	23,52	76,48	10,96
Jakarta Timur	28,27	71,73	9,37
Jakarta Pusat	30,62	69,38	8,44
Jakarta Barat	27,13	72,87	10,71
Jakarta Utara	27,07	72,93	9,25
DKI Jakarta	26,94	73,06	10,02

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

3.4 Penolong Persalinan Pada Balita

Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi merupakan permasalahan kesehatan di negara-negara berkembang dan merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih dari 90 persen kematian ibu terjadi di negara berkembang (WHO, 2017). Dalam rangka upaya penurunan AKI yang ditujukan untuk negara yang sedang berkembang, disusun suatu gerakan yang dinamakan *Safe Motherhood*. *Safe motherhood* merupakan upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman, serta melahirkan bayi yang sehat. Salah satu dari 4 (empat) pilar *Safe Motherhood* adalah penolong persalinan dengan tenaga kesehatan.

Tabel 3.8 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Persalinan ALH yang Terakhir di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kabupaten/ Kota	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat	Tenaga kesehatan lainnya	Dukun Beranak /Paraji	Lain nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kep.Seribu	36,81	2,29	59,91	0,00	0,00	1,00	0,00
Jakarta Selatan	52,40	0,00	41,26	3,81	0,00	1,03	1,49
Jakarta Timur	59,03	0,00	39,70	0,00	1,27	0,00	0,00
Jakarta Pusat	62,23	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Jakarta Barat	65,37	1,19	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Jakarta Utara	60,07	6,83	28,02	1,88	3,21	0,00	0,00
DKI Jakarta	60,05	1,62	35,90	1,06	0,90	0,20	0,28

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

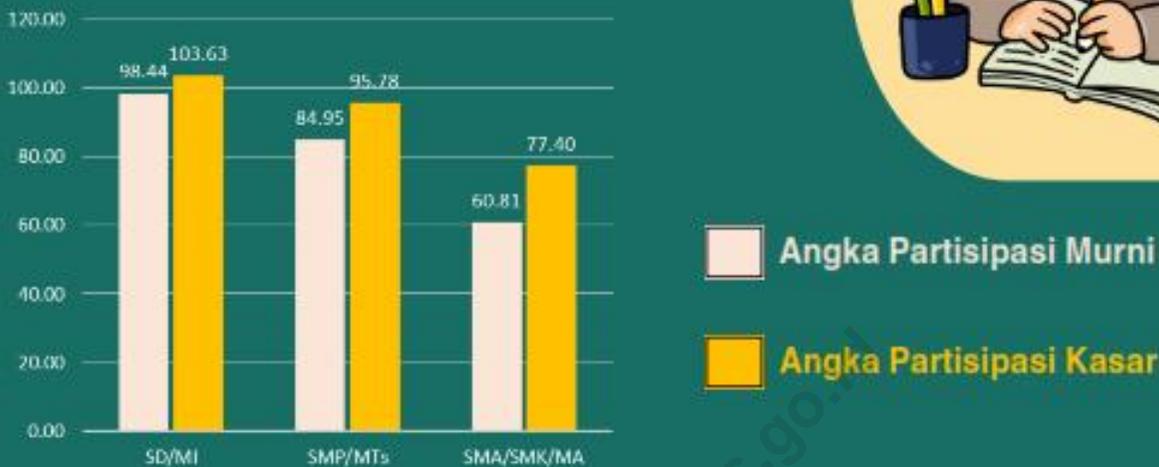
Dapat dilihat pada tabel 3.8, persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan ditolong oleh tenaga Kesehatan menunjukkan angka 99,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh Ibu di Jakarta melahirkan dengan ditolong tenaga kesehatan.

Di DKI Jakarta, hampir seluruh atau sebanyak 95,95 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam 2 (dua) tahun terakhir melahirkan dengan ditolong dokter kandungan dan Bidan. Dokter kandungan menjadi penolong persalinan terbanyak di Jakarta dengan 60,05 persen, diikuti oleh bidan dengan 35,90 persen. Hal ini sesuai dengan peran dokter spesialis kandungan dan bidan yang mempunyai spesialisasi dalam hal kehamilan dan persalinan.

Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota dan cukup menarik untuk dibahas, yaitu di Kepulauan Seribu mayoritas ibu melahirkan ditolong oleh Bidan (59,91 persen). Hal ini jauh berbeda dengan 5 (lima) kotamadya lainnya yang hanya berkisar di angka 28 sampai 41 persen. Sama halnya dengan keadaan fasilitas kesehatan yang masih berbeda antara kota dan kab Kepulauan Seribu, tenaga Kesehatan yang ada dan dekat dengan penduduk juga lebih sedikit. Hal ini menyebabkan mayoritas ibu melahirkan ditolong oleh bidan, bukan oleh dokter kandungan yang jumlahnya masih terbatas dan di pulau-pulau tertentu. Berbanding terbalik dengan Kepulauan Seribu, persentase ibu melahirkan ditolong oleh dokter kandungan terbanyak ada di Kota Jakarta Barat yakni 65,37 persen.

Pendidikan Anak

DKI JAKARTA 2023



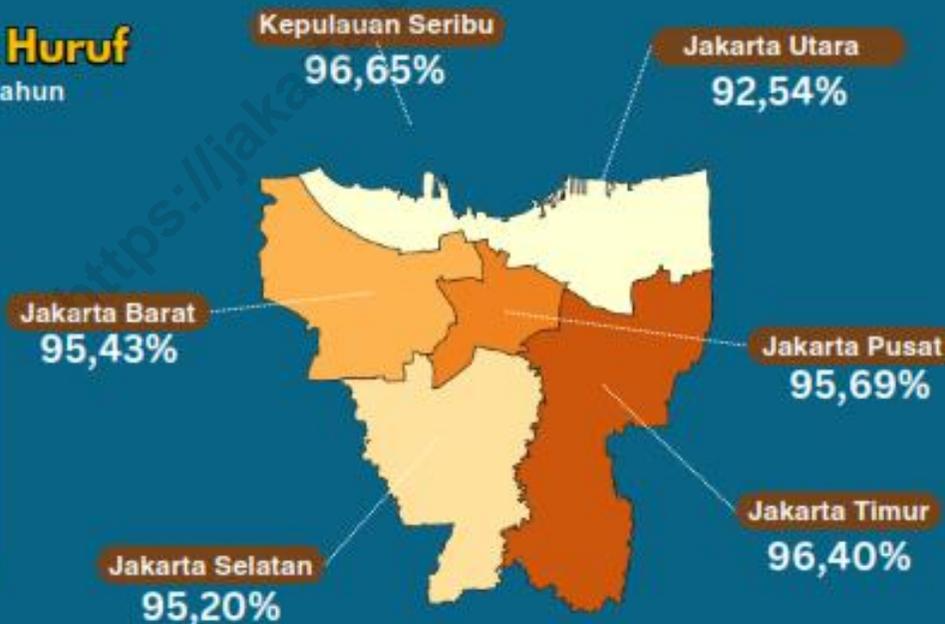
Angka Melek Huruf

Penduduk Usia 5-17 Tahun

Tertinggi
Kepulauan Seribu



Terendah
Jakarta Utara



Angka Partisipasi Sekolah

7-12 tahun

13-15 tahun

16-18 tahun

99,53

99,44

99,49

98,68

97,95

98,17

72,32

72,10

72,50

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan anak memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk masa depan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sejak usia dini, pendidikan memberikan fondasi bagi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Melalui pendidikan, anak-anak belajar keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta nilai-nilai penting seperti kerjasama, tanggung jawab, dan etika. Pendidikan juga membuka peluang bagi anak-anak untuk mencapai potensi maksimal mereka, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dunia kerja, tetapi juga untuk menjadi warga negara yang aktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Kemendikbud telah menyusun peta jalan pendidikan yang komprehensif untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Peta jalan ini mencakup berbagai inisiatif strategis, mulai dari peningkatan kompetensi guru, penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, hingga pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Salah satu fokus utama dalam peta jalan ini adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, guna mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah. Selain itu, Kemendikbud juga berkomitmen untuk memajukan pendidikan berbasis digital, dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan di semua tingkatan.

Pendidikan anak juga merupakan salah satu fokus utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB. SDGs menekankan pentingnya menyediakan pendidikan yang inklusif dan

berkualitas bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Tujuan ini mencakup peningkatan akses ke pendidikan dasar dan menengah yang gratis dan berkualitas, serta memastikan bahwa semua anak memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang layak dan kehidupan yang produktif. Melalui upaya ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi secara positif.

4.1 Angka Melek Huruf

Keterampilan membaca dan menulis memiliki pengaruh penting bagi kehidupan. Keterampilan membaca dan menulis yang baik akan membantu seseorang dalam memahami informasi baik lisan maupun tertulis. Penguasaan keterampilan baca tulis dari sedini mungkin harus dilakukan karena menjadi modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju.

Angka Buta Huruf (ABH) dan Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca dan menulis penduduk suatu wilayah. Kedua indikator tersebut juga merupakan bagian dari target SDGs tujuan keempat.

Tingkat keaksaraan penduduk suatu wilayah dapat menentukan tinggi rendahnya sumber daya manusia (Rosadi, 2017). Sementara itu, dalam Susenas, tingkat keaksaraan dapat dilihat melalui Angka Melek Huruf (AMH). Pada tahun 2023, AMH anak di DKI Jakarta sebesar 95,17 persen, artinya bahwa sekitar 95,17 persen anak di DKI Jakarta sudah bisa membaca dan menulis. Angka melek huruf pada anak laki-laki tidak berbeda secara signifikan dengan anak perempuan yaitu di 95,12 dan 95,23 persen.

Jika dilihat ke dalam kelompok umur, terdapat perbedaan pada kelompok umur 5-6 tahun dengan kelompok umur di atasnya, angka melek huruf yang lebih tinggi terdapat pada kelompok umur yang lebih tinggi. Pada kelompok umur 5-6 tahun hanya sebesar 73,11 persen, sedangkan pada kelompok umur 7-12 tahun (setara SD/ sederajat) sebesar 98,68 persen, dan 99,92 persen kelompok umur 13-17 tahun (setara SMP dan SM atau sederajat). Hal ini wajar karena anak berusia 5-6 tahun pada umumnya baru masuk ke pendidikan prasekolah dimana belum ditekankan pada kemampuan membaca dan menulis.

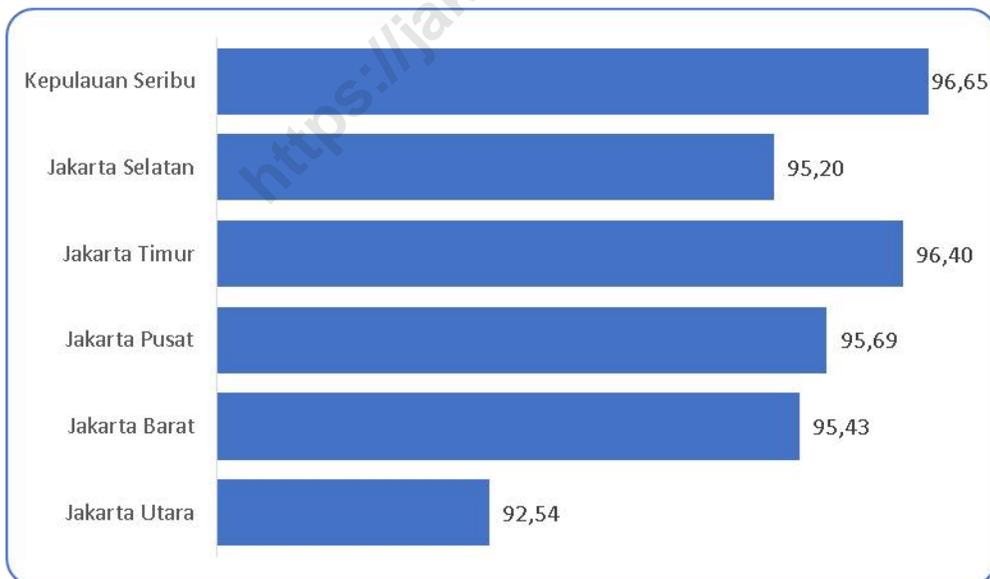


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.1 Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Karakteristik di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dilihat menurut status ekonomi, tidak ada kesenjangan kemampuan baca tulis anak pada semua kelompok status ekonomi. Angka melek huruf tertinggi berada pada kelompok 40 persen menengah (96,88 persen) diikuti dengan 20 persen teratas (94,82 persen) dan 40 persen terbawah (94,10 persen). Walaupun AMH paling tinggi terdapat pada kelompok 40 persen menengah, selisih yang tidak jauh dengan 2 kelompok status ekonomi lainnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan baca tulis pada status ekonomi manapun.

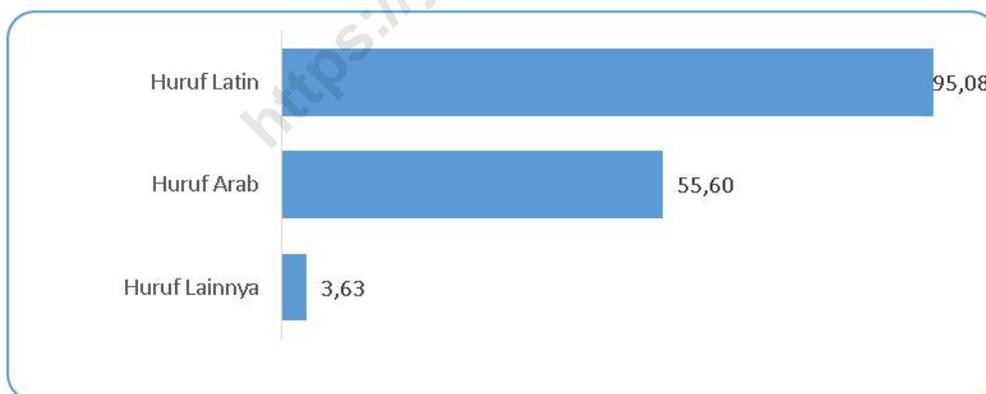
Dilihat menurut kabupaten/kota di Jakarta, tidak ada kesenjangan angka melek huruf antarkabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan angka melek huruf pada anak usia 5-17 tahun paling tinggi ada di Kepulauan Seribu (96,65 persen) sedangkan paling rendah di Jakarta Utara (92,54 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.2 Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada Susenas, kemampuan baca tulis yang dikumpulkan adalah kemampuan baca tulis dari beberapa jenis huruf antara lain: huruf latin/alfabet, huruf arab/hijaiyah, dan huruf lainnya (kanji, hiragana, mandarin, dsb). Dilihat menurut jenis huruf, kemampuan baca tulis anak paling banyak adalah kemampuan baca tulis pada huruf latin (95,08 persen). Setelah itu, lebih dari separuh anak usia 5-17 tahun memiliki kemampuan baca tulis pada huruf arab (55,60 persen). Hal ini berkaitan dengan agama yang dianut sebagian besar penduduk Jakarta dan Indonesia sehingga pendidikan bahasa/huruf arab sudah diberikan kepada anak sejak dini. Terakhir, hanya sedikit saja anak yang mempunyai kemampuan baca tulis dengan huruf selain latin dan arab (3,63 persen). Pola kemampuan baca tulis menurut jenis huruf ini tidak terjadi pada anak saja, namun dengan seluruh penduduk Jakarta dan Indonesia pada umumnya.

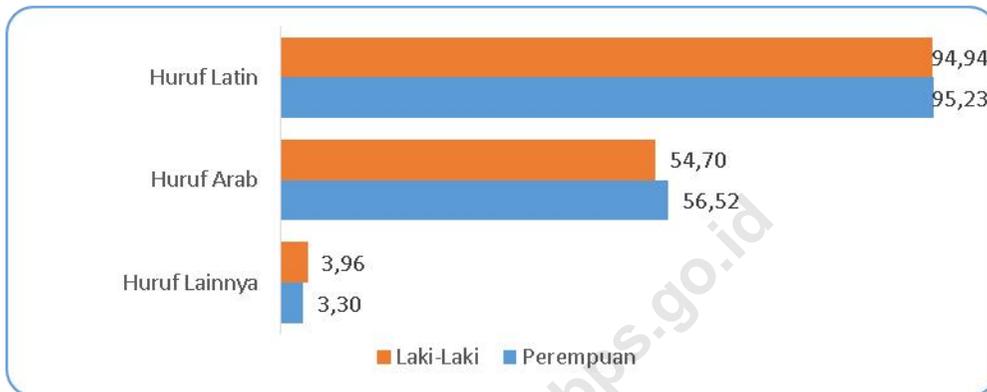


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.3 Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Jenis Huruf di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dilihat menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan berarti pada kemampuan baca tulis anak pada semua jenis huruf antara anak laki-laki dan

perempuan. Pada huruf latin dan arab sedikit lebih tinggi pada anak perempuan (95,23 berbanding 94,94 persen dan 56,52 berbanding 54,70 persen) dan pada huruf lainnya sedikit lebih tinggi pada laki-laki (3,93 berbanding 3,30 persen).

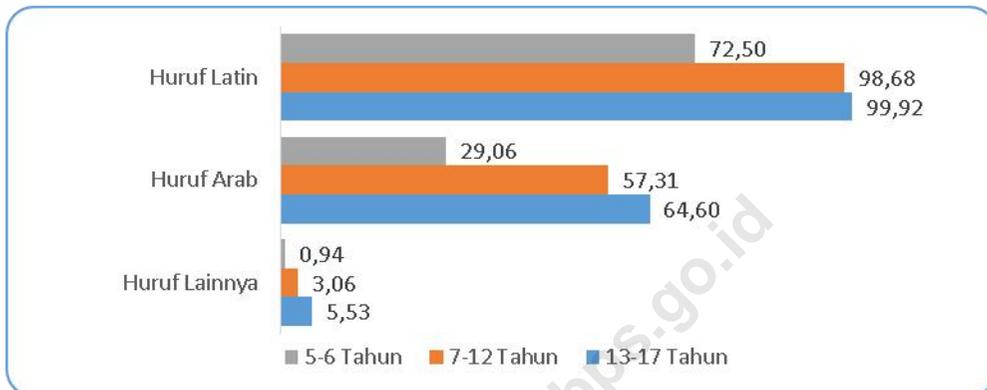


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4. 4 Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Jenis Huruf dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Menarik melihat lebih dalam kemampuan baca tulis anak menurut kelompok umur untuk melihat perbedaan kemampuan baca tulis antarkelompok umur. Kelompok umur dibedakan menjadi 3 kategori dengan pendekatan usia sekolah yaitu 5-6 tahun (pendidikan prasekolah), 7-12 tahun (SD/ sederajat), dan 13-17 tahun (SMP/ sederajat dan SM/ sederajat). Pada gambar di bawah dapat dilihat bahwa AMH yang lebih tinggi terdapat pada kelompok umur yang lebih tinggi untuk semua jenis huruf. Pada huruf latin, hanya sebanyak 72,50 persen dari anak usia 5-6 tahun yang bisa membaca dan menulis huruf latin, tertinggal jauh oleh kelompok umur 7-12 dan 13-17 tahun yang mencapai 98,68 dan 99,92 persen. Pada huruf arab, ada sebanyak 29,06 persen dari anak usia 5-6 tahun yang bisa membaca dan menulis huruf arab, tertinggal jauh oleh kelompok umur 7-12 dan 13-17 tahun yang

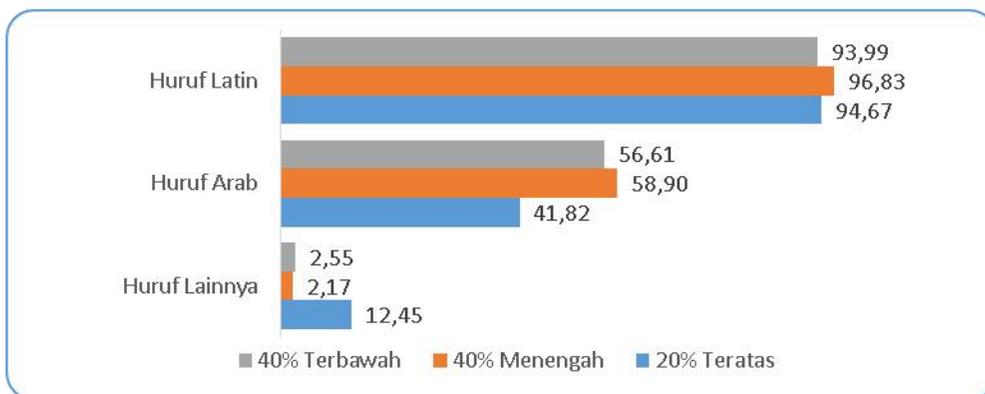
mencapai 57,31 dan 64,60 persen. Pada huruf lainnya, tidak terjadi perbedaan yang besar, pada anak usia 5-6 tahun hanya sebanyak 0,94 persen, kelompok umur 7-12 sebanyak 3,06 persen dan 13-17 tahun sebanyak 5,53 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.5 Angka Melek Huruf Anak Usia 5—17 Tahun menurut Jenis Huruf dan Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dilihat menurut status ekonomi, tidak terdapat perbedaan kemampuan membaca dan menulis huruf latin yang signifikan antarkelompok pengeluaran, namun ada perbedaan pada kemampuan membaca dan menulis pada huruf arab dan huruf lainnya. Kemampuan baca tulis pada huruf arab lebih tinggi pada anak dengan status ekonomi 40 persen terbawah dan 40 persen menengah dibandingkan dengan kelompok 20 persen teratas. Sementara itu, pada kemampuan baca tulis huruf selain latin dan arab lebih tinggi pada anak dengan status ekonomi 20 persen teratas dibandingkan status ekonomi di bawahnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.6 Angka Melek Huruf Anak Usia 5—17 Tahun menurut Jenis Huruf dan Kelompok Pengeluaran di Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.2 Partisipasi Pendidikan Prasekolah

Pendidikan anak di luar rumah dimulai sejak pendidikan prasekolah, yang merupakan fondasi penting dalam perkembangan awal anak. Pendidikan prasekolah berfokus pada pengembangan keterampilan dasar seperti bahasa, motorik, dan sosial, serta memperkenalkan anak pada konsep-konsep dasar yang akan mempersiapkan mereka untuk masuk ke pendidikan dasar. Selama masa ini, anak-anak belajar melalui berbagai aktivitas bermain dan eksplorasi yang dirancang untuk merangsang rasa ingin tahu dan kreativitas mereka.

Selama tiga tahun terakhir, sejak 2021 sampai 2023, secara keseluruhan persentase anak usia 0-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah di DKI Jakarta dan level nasional cenderung meningkat. Namun peningkatan di DKI Jakarta sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan level nasional. Di tingkat nasional, persentase anak usia 0-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun 2023 sebesar 27,38 persen. Di DKI Jakarta, pada tahun 2021, persentase anak usia 0-6

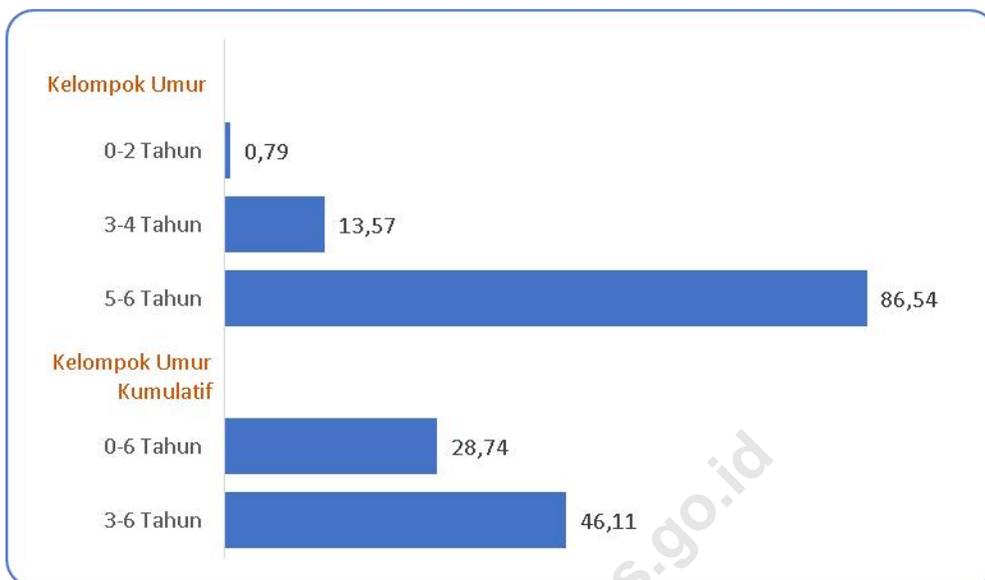
tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah sebesar 26,20 persen selanjutnya pada 2022 meningkat 27,42 persen dan pada tahun 2023 sebanyak 28,74 persen. Artinya terjadi peningkatan sekitar 1 persen setiap tahunnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2021—2023

Gambar 4. 7 Anak Usia 0—6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di Provinsi DKI Jakarta, 2021—2023

Selanjutnya, jika dilihat menurut kelompok umur, semakin dekat usia anak dengan batas persyaratan usia SD maka partisipasi pendidikan prasekolahnya semakin tinggi. Di DKI Jakarta ada sekitar 0,79 persen anak usia 0-2 tahun yang sudah ikut merasakan pendidikan prasekolah. Selanjutnya, Partisipasi pendidikan prasekolah pada anak usia 3-4 tahun sebesar 13,57 persen dan pada anak usia 5-6 tahun sebesar 86,54 persen. Hal ini wajar karena pada usia 5-6 tahun orangtua mengikutsertakan anak pada pendidikan prasekolah dengan tujuan mempersiapkan anak ke jenjang sekolah. Namun ternyata tidak semua anak usia 5-6 tahun pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah, masih ada sekitar 13,46 persen yang tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2021—2023

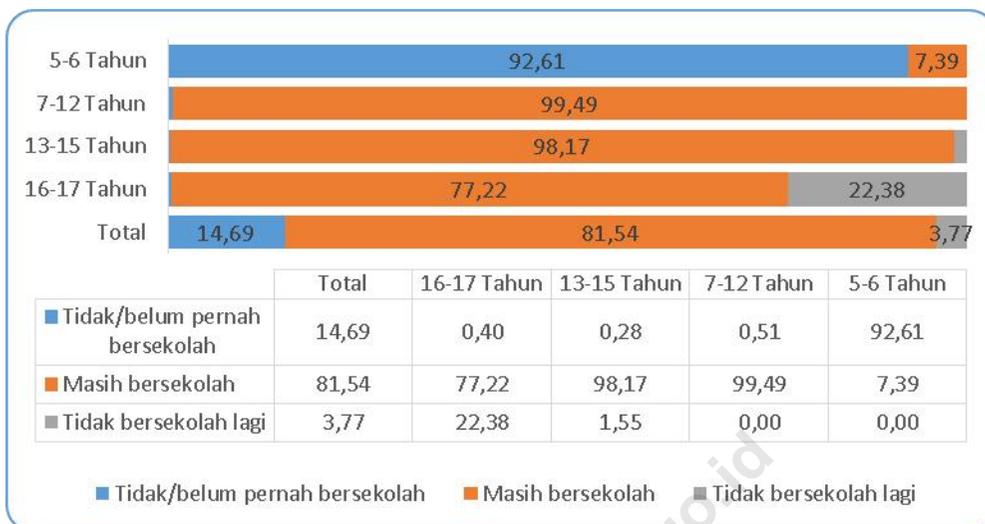
Gambar 4.7 Persentase Anak Usia 0—6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Jika membandingkan partisipasi pendidikan prasekolah pada 2 (dua) kelompok usia yaitu usia 0—6 tahun (anak usia dini) dan usia 3—6 tahun (usia prasekolah), persentase anak yang pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah lebih banyak pada kelompok usia 3—6 tahun. Hal ini juga tergambar pada bahasan sebelumnya dimana persentase anak yang mengikuti pendidikan prasekolah lebih banyak pada usia 5-6 tahun. Selain itu, usia prasekolah yang ditetapkan oleh kemendikbud adalah usia 3—6 tahun. Oleh karena itu, penting juga untuk melihat gambaran partisipasi pendidikan prasekolah pada usia 3—6 tahun.

4.3 Partisipasi Sekolah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan masa depan anak, serta dalam kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu indikator untuk menilai akses pendidikan adalah partisipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah memberikan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap anak. Tingkat partisipasi sekolah menjelaskan status anak dalam jenjang pendidikan formal dan non formal.

Pada tahun 2023, sebanyak 81,54 persen anak usia 5—17 tahun sedang bersekolah, 14,69 persen lainnya belum pernah bersekolah, dan 3,77 persen sisanya pernah sekolah namun sekarang sudah tidak bersekolah lagi. Dirinci menurut kelompok umur, pada usia 5—6 tahun dimana masih masuk ke dalam usia prasekolah, sebanyak 92,61 persen diantaranya belum bersekolah namun ada sekitar 7,39 persen diantaranya yang sudah bersekolah. Pada usia 7—12 tahun dan usia 13—15 tahun, hampir semua anak di usia itu sedang bersekolah. Sebanyak 99,49 persen dari anak usia 7—12 tahun sedang bersekolah dan sebanyak 98,17 persen dari anak usia 13—15 tahun sedang bersekolah. Pada usia 16-17 tahun, persentase anak yang sudah tidak bersekolah lagi meningkat dibandingkan dengan kelompok umur di bawahnya, sebanyak 22,38 persen anak pada usia 16—17 tahun sudah tidak bersekolah lagi dan 77,22 persen lainnya sedang bersekolah. Dapat disimpulkan bahwa anak yang belum bersekolah paling banyak terdapat pada usia 5—6 tahun dimana hal ini sangat wajar karena masih pada umur prasekolah. Sementara itu anak yang sudah tidak bersekolah lagi paling banyak terdapat pada usia 16—17 tahun yang menandakan bahwa masih ada anak yang tidak bersekolah lagi se usai menamatkan pendidikan SMP/ sederajat.



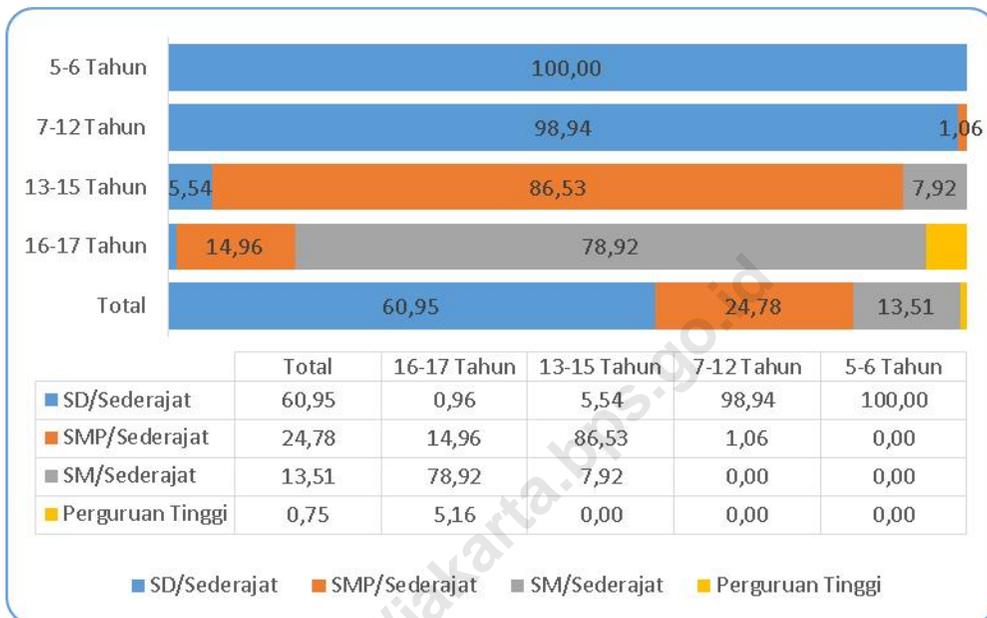
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4. 8 Persentase Anak Usia 5—17 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Menarik untuk melihat lebih dalam karakteristik anak yang sedang bersekolah, salah satunya mengenai jenjang pendidikan yang sedang diduduki. Melihat jenjang pendidikan yang sedang diduduki anak yang sedang bersekolah, sebanyak 60,95 persen anak usia 5—17 tahun sedang bersekolah di jenjang SD/ sederajat, 24,78 persen di SMP/ sederajat, 13,51 persen di SM/ sederajat, dan sebagian kecil atau 0,75 persen sisanya sudah memasuki jenjang perguruan tinggi.

Dirinci menurut kelompok umur, pada usia 5—6 tahun seluruhnya bersekolah pada jenjang SD/ sederajat. Pada usia 7—12 tahun hampir seluruhnya bersekolah pada jenjang SD/ sederajat dan ada sebagian kecil yang sudah memasuki jenjang SMP/ sederajat (1,06 persen). Pada usia 13—15 tahun, sebagian besar menduduki jenjang SMP/ sederajat (86,563 persen), sisanya ada yang masih duduk di jenjang SD/ sederajat (5,54 persen) dan ada yang sudah duduk di jenjang SM/ sederajat (7,92 persen). Pada usia 16—17 tahun,

sebagian besar menduduki jenjang SM/ sederajat (78,92 persen), 14,96 persen masih duduk di SMP/ sederajat, 5,16 persen sudah memasuki bangku perguruan tinggi, 0,95 persen sisanya ada yang masih mengikuti kelas Paket A.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.9 Persentase Anak Usia 5—17 Tahun yang Sedang Bersekolah menurut Kelompok Umur dan Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Selanjutnya akan dibahas beberapa indikator terkait partisipasi pendidikan, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Jika pada bahasan sebelumnya batasan usia yang digunakan adalah usia 0-17 tahun namun pada indikator-indikator pendidikan menggunakan batasan usia sampai 18 tahun utamanya pada jenjang SM/ sederajat sehingga selanjutnya pada subbab ini batasan usia yang digunakan adalah 18 tahun.

4.3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator APS terbagi dalam empat kategori kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi namun pada publikasi ini terbatas sampai jenjang pendidikan menengah saja sesuai dengan batasan usia anak. APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi capaian APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Pada gambar di bawah dapat dilihat tren Angka Partisipasi Sekolah (APS) DKI Jakarta 2018 sampai 2023. Nilai APS semua kelompok umur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang periode tersebut, nilai APS 7—12 tahun meningkat dari 99,77 ke 99,49 persen, APS 13—15 tahun meningkat dari 97,77 ke 98,17 persen, dan APS 16-18 meningkat dari 71,81 ke 72,50 persen.

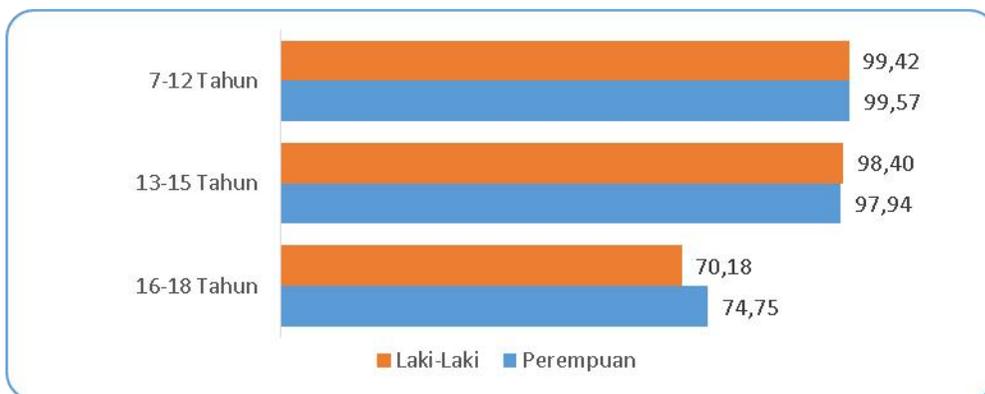
Nilai APS semakin kecil seiring dengan pengingkatan kelompok umur. Capaian APS kelompok umur 7—12 tahun pada tahun 2023 sebesar 99,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7—12 tahun di Jakarta terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C). Sementara itu, capaian APS kelompok umur 13—15 tahun berada pada kisaran yang hampir sama, yaitu 98,17 persen. Tingginya capaian indikator APS pada jenjang pendidikan dasar ini mengindikasikan keberhasilan program Wajib Belajar yang diterapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, capaian APS kelompok umur 16-18 tahun masih jauh tertinggal dengan hanya sebesar 72,50 persen meskipun pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2018-2023

Gambar 4.10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta, 2018—2023

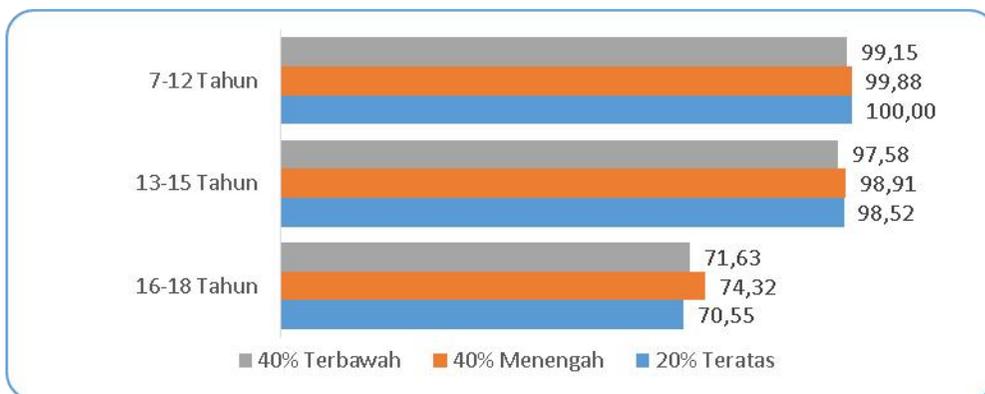
Dilihat menurut jenis kelamin, APS pada kelompok umur 7—12 dan 13—15 tahun tidak berbeda signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan sedangkan pada kelompok umur 16—18 tahun terlihat lebih tinggi pada anak perempuan. Pada kelompok umur 7—12 tahun APS anak laki-laki sebesar 99,42 dan anak perempuan sebesar 99,57. Pada kelompok umur 13—15 tahun APS anak laki-laki sebesar 98,40 dan anak perempuan sebesar 97,94. Pada kelompok umur 16-18 tahun APS anak laki-laki sebesar 70,18 dan anak perempuan sebesar 74,75.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2023

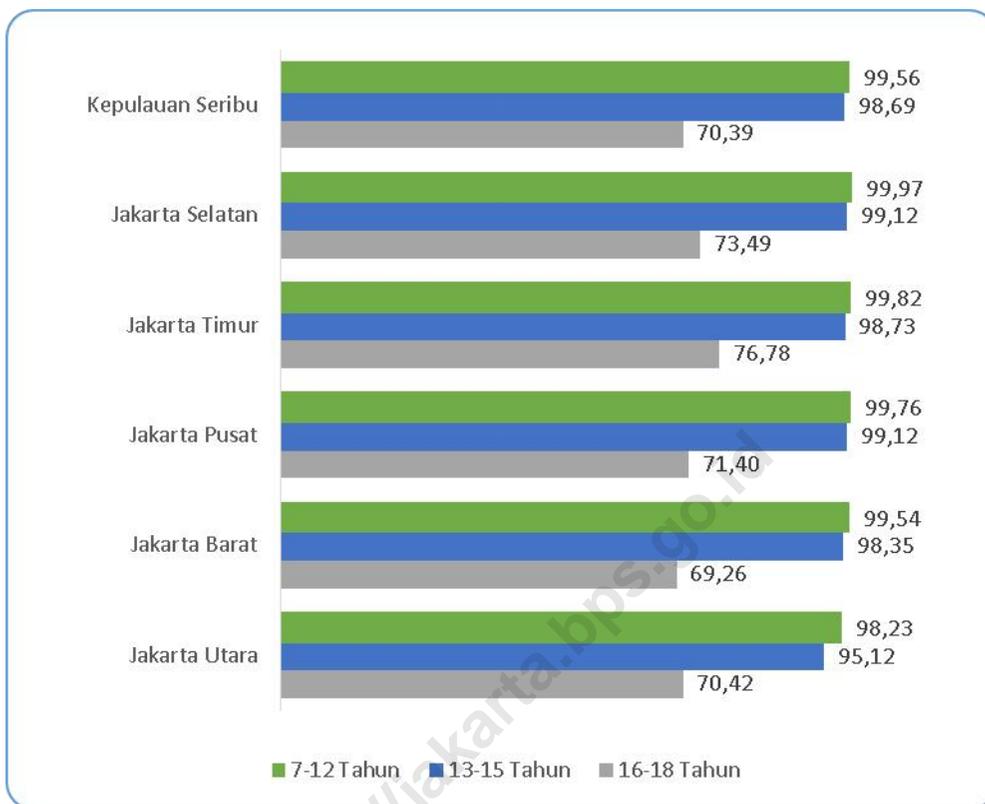
Dilihat menurut kelompok pengeluaran sebagai proxy status ekonomi, APS pada kelompok umur 7—12 dan 13—15 tahun tidak berbeda signifikan pada ketiga status ekonomi sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun ada sedikit perbedaan pada status ekonomi menengah dibandingkan dengan kelompok ekonomi lainnya. Pada kelompok umur 7—12 dan 13—16 tahun angka partisipasinya meningkat seiring dengan peningkatan status ekonomi. Di sisi lain, pada kelompok umur 16—18 tahun terjadi peningkatan pada kelompok ekonomi menengah namun kembali menurun pada kelompok ekonomi atas. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak terdapat kesenjangan partisipasi sekolah antara kelompok ekonomi atas dan ekonomi bawah pada semua kelompok umur walaupun ada sedikit perbedaan antar kelompok pengeluaran pada kelompok umur 16—18 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dilihat menurut kabupaten/kota di Jakarta, APS 7—12 tahun berkisar antara 98 sampai 99 persen, paling tinggi berada di Jakarta Selatan yang mencapai 99,97 persen sedangkan paling rendah di Jakarta Utara dengan 98,23 persen. Sementara itu, APS 13—15 tahun berkisar antara 95 sampai 99 persen, paling tinggi berada di Jakarta Selatan yang mencapai 99,12 persen sedangkan paling rendah di Jakarta Utara dengan 95,12 persen. Kelompok umur selanjutnya, APS 16—18 tahun berkisar antara 69 sampai 76 persen, paling tinggi berada di Jakarta Timur yang mencapai 76,78 persen sedangkan paling rendah di Jakarta Barat dengan 69,26 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indikator untuk mengukur partisipasi dari suatu jenjang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK dapat dihitung pada setiap jenjang pendidikan. APK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

Beberapa fungsi APK antara lain: untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan,

menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu, dan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya (SIRuSa BPS).

Pada gambar di bawah dapat dilihat tren Angka Partisipasi Kasar (APK) DKI Jakarta 2018 sampai 2023 menurut jenjang pendidikan. Selama periode tersebut, nilai APK pada jenjang SD/ sederajat bernilai mengalami penurunan dari 105,27 ke 103,63 persen, sedangkan APK SMP/ sederajat dan SM/ sederajat mengalami peningkatan masing-masing menjadi 95,78 dan 77,40 persen dari sebelumnya 94,91 dan 73,98 persen. Nilai APK pada jenjang SD/ sederajat yang melebihi 100 menunjukkan bahwa peserta didik SD/ sederajat tidak hanya diisi oleh anak yang berusia 7—12 tahun, melainkan usia kurang dari 7 tahun sudah masuk SD/ sederajat atau usia lebih dari 12 tahun masih SD/ sederajat.

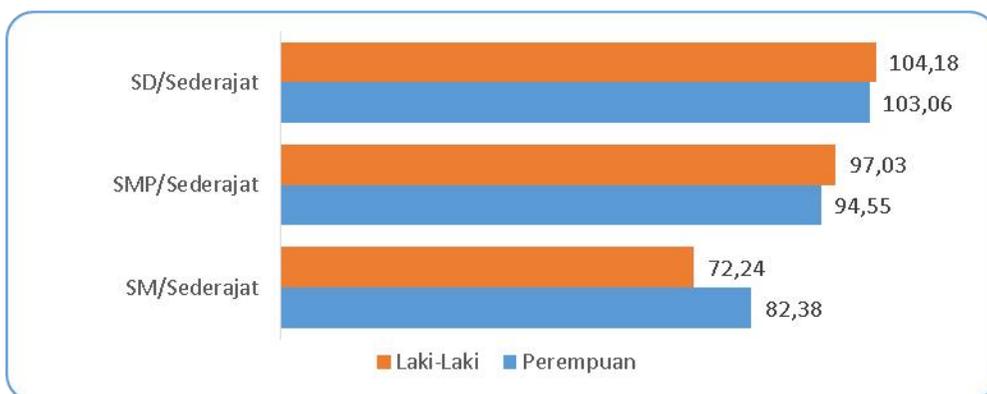
Nilai APK semakin kecil pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain meningkatnya tantangan akademik, putus sekolah, keterbatas ekonomi, dan kebutuhan akan tenaga kerja muda. Capaian APK pada jenjang SD/ sederajat pada tahun 2023 adalah 103,63 persen. Pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu pada jenjang SMP/ sederajat nilai APKnya sebesar 95,78 persen dan SM/ sederajat sebesar 77,40 persen. Hal ini sudah direspon pemerintah dengan mendorong anak yang sudah tamat SMP/ sederajat untuk melanjutkan ke SM/ sederajat melalui program wajib belajar 12 tahun sehingga partisipasi pada jenjang SM/ sederajat bisa meningkat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2018—2023

Gambar 4.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, 2018—2023

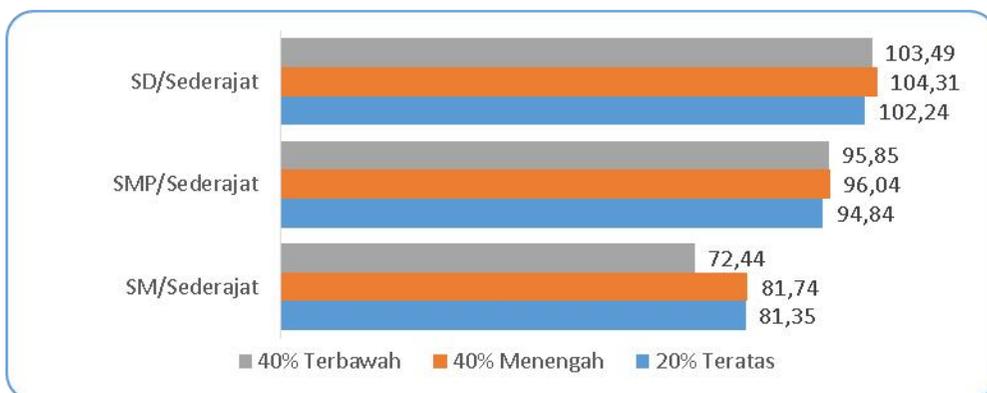
Dilihat menurut jenis kelamin, APK pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat sedikit lebih tinggi pada anak laki-laki sedangkan pada jenjang SM/ sederajat jauh lebih tinggi pada anak perempuan. Pada jenjang SD/ sederajat APK anak laki-laki sebesar 104,18 dan anak perempuan sebesar 103,06. Pada jenjang SMP/ sederajat APK anak laki-laki sebesar 97,03 dan anak perempuan sebesar 94,55. Pada jenjang SM/ sederajat APK anak laki-laki sebesar 72,24 dan anak perempuan sebesar 82,38. Laki-laki sering kali lebih cepat masuk ke dunia kerja untuk membantu perekonomian keluarga, terutama pada mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bawah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2023

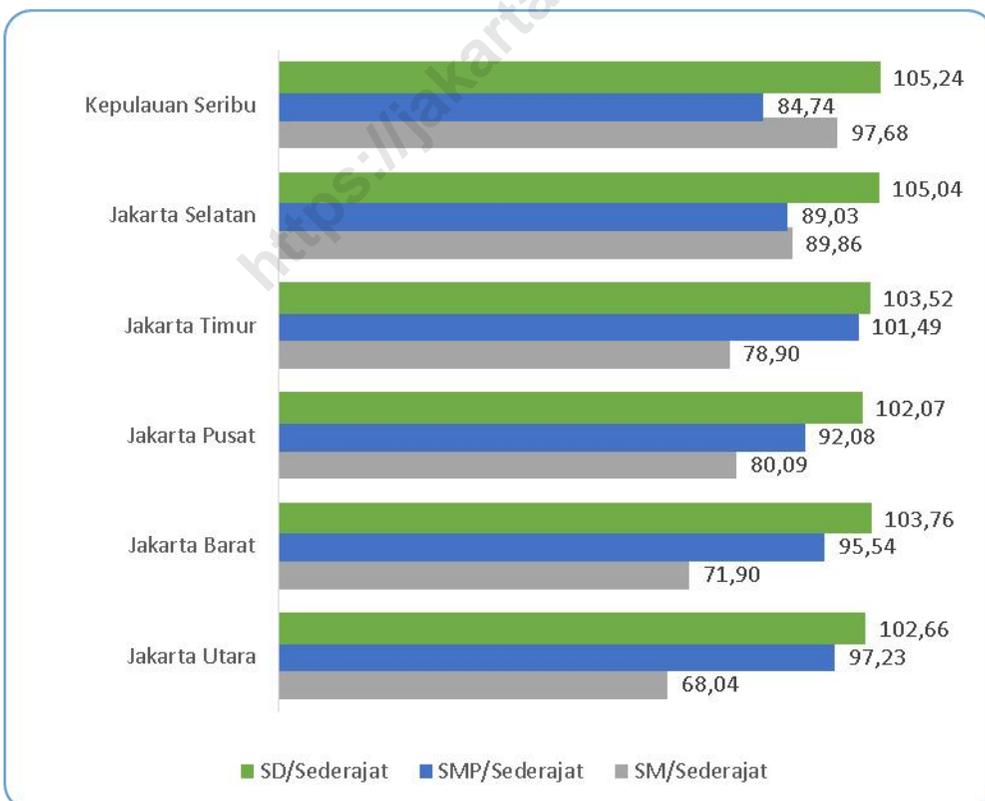
Dilihat menurut kelompok pengeluaran sebagai penanda status ekonomi, APK pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat memiliki pola yang sama yaitu hampir sama pada ketiga kelompok namun APK paling tinggi terdapat pada kelompok 40 persen menengah dan yang paling rendah pada kelompok 20 persen teratas. Di sisi lain, APK pada jenjang SM/ sederajat semakin tinggi seiring dengan peningkatan status ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak terdapat kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dan ekonomi bawah pada pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat namun masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi pada pendidikan SM/ sederajat. Walaupun program wajib belajar 12 tahun dan sekolah gratis sudah dilakukan oleh pemerintah, masih ada anak usia 16-18 tahun dari kalangan ekonomi bawah yang seharusnya mengikuti pendidikan di SM/ sederajat memilih masuk ke dunia kerja daripada melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendorong anak-anak tersebut untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dilihat menurut kabupaten/kota di Jakarta, APK SD/ sederajat berkisar antara 102 sampai 105 persen, paling tinggi berada di Kepulauan Seribu yang mencapai 105,24 persen sedangkan paling rendah di Jakarta Pusat dengan 102,07 persen. Sementara itu, APK SMP/ sederajat berkisar antara 84 sampai 101 persen, paling tinggi berada di Jakarta Timur yang mencapai 101,49 persen sedangkan paling rendah di Kepulauan Seribu dengan 84,74 persen. Jenjang selanjutnya, APK SM/ sederajat berkisar antara 68 sampai 97 persen, paling tinggi berada di Kepulauan Seribu yang mencapai 97,68 persen sedangkan paling rendah di Jakarta Utara dengan 68,04 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai atau tepat waktu. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Jadi, apabila APM sama dengan 100 berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Pada gambar di bawah dapat dilihat APM dari tahun 2018 sampai 2023 untuk setiap jenjang pendidikan. Pada periode tersebut, APM pada semua jenjang mengalami peningkatan. Peningkatan yang paling banyak terdapat pada jenjang SMP/ sederajat (4,14 persen) diikuti oleh SM/ sederajat (0,80 persen) dan SD/ sederajat (0,41 persen).

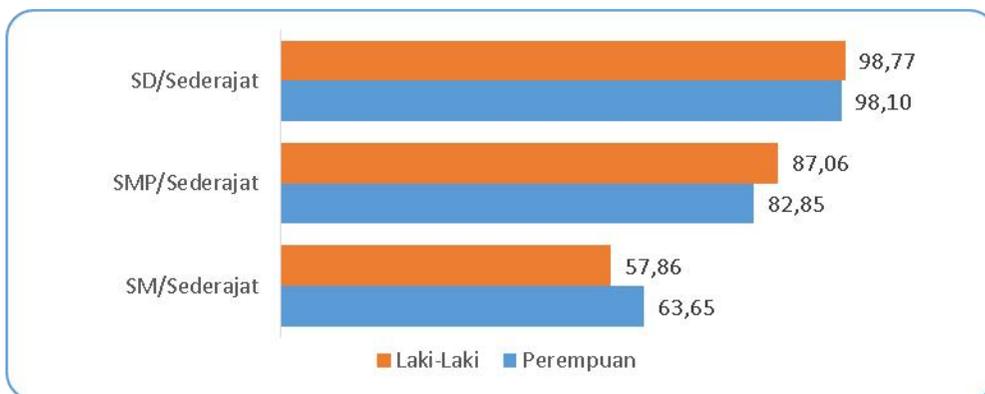
Nilai APM semakin kecil pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Capaian APM pada jenjang SD/ sederajat tahun 2023 mencapai 98,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7-12 tahun di Jakarta bersekolah di jenjang yang bersesuaian dengan usianya yaitu di SD/ sederajat. Pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu pada jenjang SMP/ sederajat nilai APMnya sebesar 84,95 persen. Sementara itu, APM SM/ sederajat hanya mencapai 60,81 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan APM SD/ sederajat dan SMP/ sederajat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2018—2023

Gambar 4.18 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, 2018—2023

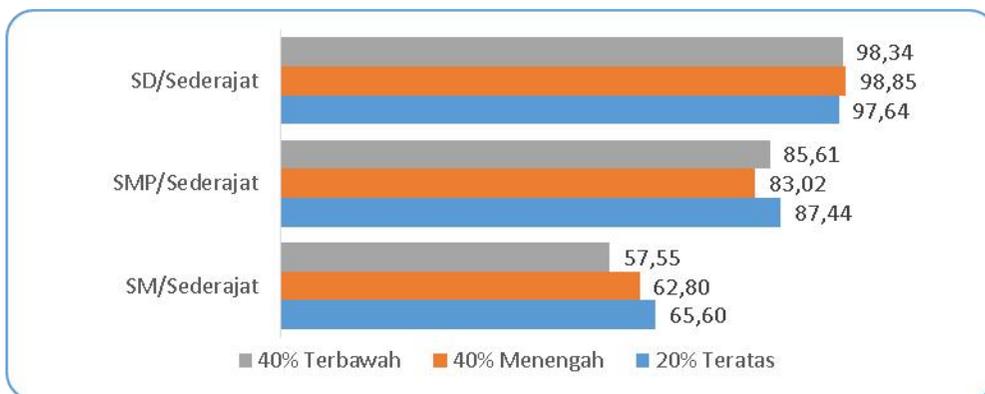
Dilihat menurut jenis kelamin, APM pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat sedikit lebih tinggi pada anak laki-laki sedangkan pada jenjang SM/ sederajat lebih tinggi pada anak perempuan. Pada jenjang SD/ sederajat APM anak laki-laki sebesar 98,77 dan anak perempuan sebesar 98,10. Pada jenjang SMP/ sederajat APM anak laki-laki sebesar 87,06 dan anak perempuan sebesar 82,85. Pada jenjang SM/ sederajat APM anak laki-laki sebesar 57,86 dan anak perempuan sebesar 63,65. Laki-laki sering kali lebih cepat masuk ke dunia kerja untuk membantu perekonomian keluarga, terutama pada mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bawah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.19 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dilihat menurut kelompok pengeluaran sebagai penanda status ekonomi, APM pada setiap jenjang pendidikan memiliki pola yang sedikit berbeda. Pada jenjang SD/ sederajat, tidak ada perbedaan yang berarti pada semua status ekonomi. Pada jenjang SMP/ sederajat, ada sedikit perbedaan nilai APM pada setiap status ekonomi namun tidak ada kesenjangan antarkelompok. Pada jenjang SM/ sederajat, nilai APM semakin tinggi pada kelompok status ekonomi yang lebih tinggi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada jenjang SM/ sederajat terdapat kesenjangan yang lebih tinggi antara kelompok ekonomi 20 persen teratas dan 40 persen terbawah dibandingkan dengan jenjang sekolah dibawahnya. Pemerintah terus memperkecil kesenjangan ini melalui program wajib belajar 12 tahun, sekolah gratis, dan juga bantuan sosial yang menysar peserta didik.



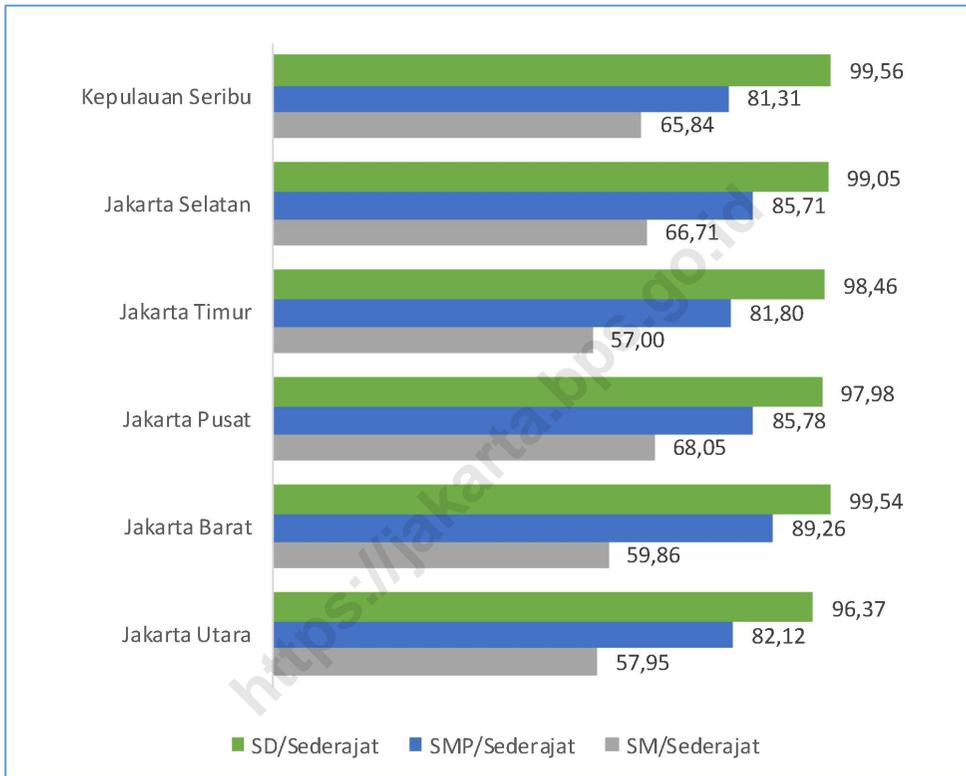
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.20 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran, 2023

Dilihat menurut kabupaten/kota di Jakarta, APM SD/ sederajat berkisar antara 96 sampai 99 persen atau bisa dikatakan cukup merata antarwilayah, paling tinggi berada di Kepulauan Seribu yang mencapai 99,56 persen sedangkan paling rendah di Jakarta Pusat dengan 96,37 persen. Sementara itu, APM SMP/ sederajat berkisar antara 81 sampai 89 persen, paling tinggi berada di Jakarta Barat yang mencapai 89,26 persen sedangkan paling rendah di Kepulauan Seribu dengan 81,31 persen. Jenjang selanjutnya, APM SM/ sederajat berkisar antara 57 sampai 68 persen, paling tinggi berada di Jakarta Pusat yang mencapai 68,05 persen sedangkan paling rendah di Jakarta Timur dengan 57,00 persen.

Satu hal yang menarik adalah perbedaan yang cukup jauh antara APK dan APM SM/ sederajat di beberapa Kabupaten/Kota. Misalnya, APK SM/ sederajat di Kepulauan Seribu sebesar 97,68 persen, sedangkan APMnya sebesar 65,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik SM/ sederajat di Kepulauan Seribu banyak yang tidak berusia 16-18 tahun (usia sekolah SM/ sederajat). Hal ini dimungkinkan karena ada peserta didik yang

mengambil program kesetaraan/Paket C dan biasanya berusia di atas 18 tahun. Selain itu, bisa juga dikarenakan ada pengulangan kelas (tidak naik kelas) dan sempat putus sekolah sehingga usianya tidak bersesuaian dengan usia sekolah SM/ sederajat yang seharusnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.21 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.4 Angka Melanjutkan

Indikator positif lain terkait proses pendidikan adalah angka melanjutkan. Angka melanjutkan menggambarkan persentase anak sekolah yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator ini juga menggambarkan adanya seleksi oleh suatu sistem pendidikan karena faktor keilmuan maupun faktor ekonomi. Indikator ini menjadi indikator

output jika dilihat dari sisi jenjang pendidikan yang lebih rendah, dan menjadi indikator input apabila dilihat dari sisi jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Angka melanjutkan dari jenjang SD/ sederajat ke jenjang SMP/ sederajat mencapai 93,68 persen. Dengan kata lain ada sekitar 6,32 persen peserta didik yang menduduki kelas 6 SD/ sederajat pada tahun ajaran lalu tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP/ sederajat. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan berarti antara angka melanjutkan ke jenjang SMP/ sederajat untuk anak laki-laki (93,65 persen) maupun perempuan (93,70 persen). Dilihat menurut status ekonomi anak, semakin tinggi status ekonomi maka semakin tinggi juga angka melanjutkannya namun tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara kelompok teratas dan terbawah.

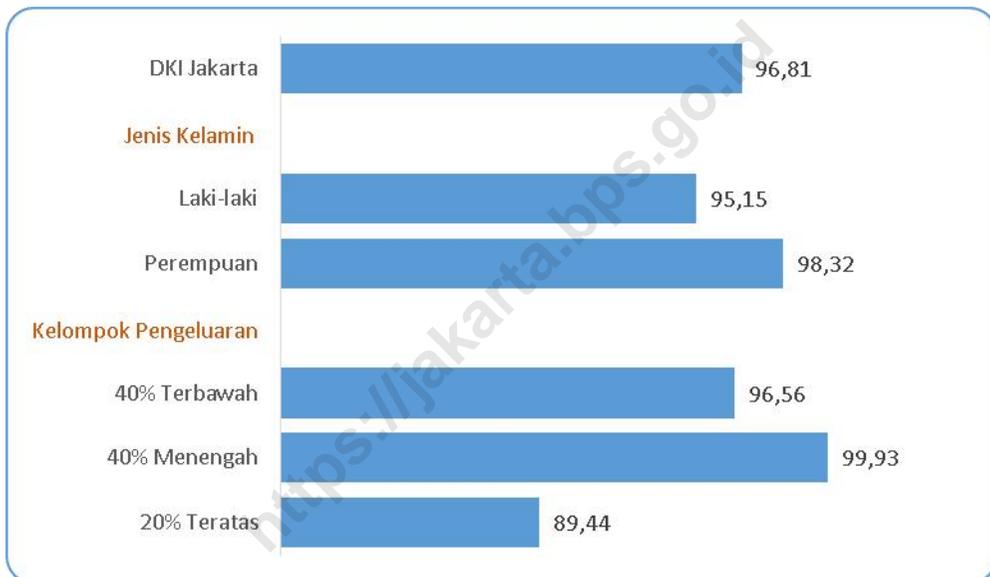


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.22 Angka Melanjutkan ke Jenjang SMP/ Sederajat menurut Karakteristik di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada jenjang selanjutnya, angka melanjutkan dari jenjang SMP/ sederajat ke jenjang SM/ sederajat mencapai 96,81 persen. Dengan kata lain ada sekitar 3,19 persen peserta didik yang menduduki kelas 3

SMP/ sederajat pada tahun ajaran lalu tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SM/ sederajat. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, terdapat sedikit perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Angka melanjutkan ke jenjang SM/ sederajat lebih tinggi pada anak perempuan, 98,32 persen berbanding 95,15 persen. Dilihat menurut status ekonomi anak, angka melanjutkan ke jenjang SM/ sederajat paling rendah terdapat pada kelompok ekonomi 20 persen teratas (89,44 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 4.23 Angka Melanjutkan ke Jenjang SM/ Sederajat menurut Karakteristik di Provinsi DKI Jakarta, 2023

PEKERJA ANAK DKI JAKARTA 2023

Child Labour in DKI Jakarta 2023

Pada 2023 masih terdapat sekitar **1,74%** anak di DKI Jakarta yang **bekerja**.



55,49%

Pekerja anak
berjenis kelamin
PEREMPUAN

Faktor Ekonomi adalah salah satu faktor terkuat dalam mendorong adanya pekerja anak di bawah umur.

Mereka bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya atau bahkan karena mereka memang ditelantarkan dan terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.



PEKERJA ANAK **DILINDUNGI** OLEH PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 1 TAHUN 1987

Pemerintah mengizinkan anak-anak di bawah usia 14 tahun yang **terpaksa bekerja** karena alasan sosial - ekonomi dengan syarat:

1. **Wajib dengan izin orang tua**
2. **Melarang pekerjaan yang berbahaya, serta pekerjaan berat**
3. **Maksimal lama kerja empat jam sehari.**

Di samping itu, pengusaha wajib melaporkan jumlah anak yang bekerja di bawah ketentuan tersebut.

BAB V EKONOMI

5.1 Kemiskinan Anak

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh setiap negara di dunia. Kemiskinan sering dihubungkan dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan maupun haknya. Ketidakmampuan akibat kemiskinan tentu memberi penderitaan bagi orang-orang yang terlibat didalamnya, penderitaan yang dialami tidak hanya secara fisik, tetapi secara psikologis atau mental juga (Kumala, Agustini, & Rais, 2013). Dampak kemiskinan tidak hanya pada orang dewasa, melainkan pada anak-anak juga. Kemiskinan pada anak bahkan lebih berdampak dari pada orang dewasa. Kemiskinan pada anak menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun mental anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang terus menumpuk sepanjang hidup anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kondisi keluarga baik secara ekonomi ataupun non-ekonomi sangat besar terhadap perkembangan dan kehidupan anak. Salah satunya kajian Duncan dan Yeung (1998), yang menyatakan kondisi ekonomi keluarga pada anak usia dini memiliki dampak terbesar pada penyelesaian sekolah, terutama di kalangan anak-anak di keluarga dengan pendapatan rendah. UNICEF (2006) menyatakan lebih dari setengah dari jumlah anak-anak pada negara berkembang tumbuh dalam keluarga miskin. Kemiskinan dapat membuat mereka kehilangan kemampuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang serta membuat anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, diskriminasi kekerasan, dan stigmatisasi.

Berikut ini adalah definisi kemiskinan anak dari berbagai organisasi dan Lembaga yang dirangkum oleh UNICEF (2006):

1. United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa anak-anak yang hidup dalam kemiskinan adalah mereka yang mengalami deprivasi pada material, spritual, dan emosional yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang, tidak dapat menikmati hak-haknya, tidak dapat mencapai potensi diri atau berpartisipasi secara penuh dan setara dalam lingkup sosial.

2. The Christian Children's Fund (CCF) menemukan bahwa kemiskinan anak adalah pengalaman yang relasional, relatif, dinamis dan multidimensi. Anak-anak yang miskin adalah mereka yang mengalami deprivasi pada material dan pelayanan dasar, dikucilkan dari basis usia, gender, kelas, dan lainnya, serta rentan terhadap serangkaian peningkatan ancaman di lingkungan mereka.

3. Childhood Poverty Research and Policy Center (CHIP) mendefinisikan kemiskinan anak sebagai keadaan dimana anak dan pemuda tumbuh tanpa akses ke berbagai jenis sumber daya yang penting bagi kesejahteraan dan pemenuhan potensi mereka. Sumber daya yang dimaksud adalah ekonomi, sosial, budaya, fisik, lingkungan, dan politik.

4. Save the Children mengungkapkan bahwa ada hubungan antara kemiskinan anak dan hak asasi manusia. Save the Children menggunakan pendekatan moneter untuk mengidentifikasi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, dan mengusulkan pendekatan hak asasi manusia untuk merancang kebijakan pemberantasan kemiskinan.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, salah satu metode yang digunakan pemerintah adalah menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dalam suatu negara, wilayah, atau populasi tertentu. Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan pendekatan yang digunakan. Misalnya pendekatan berbasis kebutuhan, metode ini menetapkan garis kemiskinan berdasarkan biaya

minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Pengukuran angka kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah dengan menggunakan garis kemiskinan pengeluaran baik garis kemiskinan non-makanan maupun garis kemiskinan makanan. Masing-masing komponen diberi bobot dan dijumlahkan. Pemberian bobot harus jelas, konsisten dan yang terpenting harus sesuai dengan fakta di masyarakat (Setjen DPR RI, 2013). Metode pengukuran angka kemiskinan harus konsisten untuk menghasilkan data jumlah penduduk miskin dengan lebih tepat. Data ini lah yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai program pengentasan kemiskinan.

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa secara Nasional persentase anak miskin pada periode 2019-2022 selalu lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Pada tahun 2022, persentase anak miskin di perdesaan sebesar 14,79 persen atau dengan kata lain sekitar 15 dari 100 anak di daerah perdesaan diklasifikasikan sebagai anak miskin. Sementara itu, persentase anak miskin di daerah perkotaan sebesar 9,51 persen.

Walaupun persentase anak miskin di daerah perdesaan lebih tinggi, namun saat kasus COVID-19 mulai meningkat di Indonesia tahun 2019-2020, persentase anak miskin di daerah perkotaan meningkat lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Sebaliknya, pada saat pandemi COVID-19 mulai mereda di tahun 2022, penurunan kemiskinan anak di daerah perkotaan lebih lambat dibandingkan dengan di perdesaan. Kemiskinan anak di daerah perkotaan juga merupakan isu penting karena tren urbanisasi yang semakin cepat di masa yang akan datang akan meningkatkan kepadatan

penduduk dan potensi kemiskinan di daerah perkotaan sehingga tantangan penyediaan layanan dasar untuk anak akan semakin tinggi (UNICEF, 2020).

Tabel 5.1 juga menunjukkan kemiskinan anak di Indonesia jika dilihat menurut sebaran pulau. Pola data tahun 2019-2022 memperlihatkan jika persentase anak miskin tertinggi ada di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua, sementara yang terendah ada di Pulau Kalimantan. Pada tahun 2022, hampir seperempat anak yang ada di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua dikategorikan miskin. Selanjutnya, tabel tersebut juga menunjukkan jika peningkatan persentase anak miskin pada tahun 2019-2020 tertinggi pada Pulau Jawa dan Pulau Bali, sementara di Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, serta Kepulauan Maluku dan Pulau Papua kemiskinan anak justru mengalami penurunan.

Pada tahun 2022, separuh dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia memiliki persentase anak miskin yang lebih tinggi daripada persentase nasional. Persentase anak miskin cenderung lebih tinggi di Indonesia bagian timur. Kondisi tersebut kemungkinan berhubungan dengan ketimpangan antarprovinsi di Indonesia. Kondisi kemiskinan anak di Papua Barat dan Papua perlu mendapatkan perhatian lebih, hal tersebut dikarenakan lebih dari seperempat anak yang ada di provinsi tersebut dikategorikan miskin.

Tabel 5.1 Persentase Anak Miskin Menurut Karakteristik Wilayah di Indonesia, 2019—2022

Karakteristik Wilayah	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anak (0-17 tahun)	11,76	12,23	12,64	11,80
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	8,67	9,38	10,00	9,51
Perdesaan	15,45	15,64	15,95	14,79
Kelompok Pulau				
Sumatera	12,86	12,87	13,20	12,21
Jawa, Bali	9,80	10,74	11,28	10,55
Nusa Tenggara	22,07	21,59	21,44	20,47
Kalimantan	7,63	7,45	7,99	7,09
Sulawesi	13,19	13,39	13,54	12,95
Maluku, Papua	26,12	25,22	25,96	24,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Kemiskinan dipandang sebagai penghambat anak untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik. Tinggal pada keluarga miskin, dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya material yang tersedia bagi anak untuk memenuhi nutrisi, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan anak saat lahir memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesiapan anak dalam memasuki usia sekolah. Selain itu, kemiskinan yang terus menerus dialami oleh anak juga berpengaruh terhadap hasil tes kognitif yang lebih rendah (Dickerson & Popli, 2016). Pada anak dengan kondisi kesehatan yang rendah, kemiskinan akan memperburuk kondisi kesehatan, terakumulasi

selama kehidupan yang selanjutnya, membuat mereka memiliki capaian pendidikan yang rendah, yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap kemampuan bekerja di masa yang akan datang (Case, Lubotsky, & Paxson, 2002).

Karakteristik Anak Miskin

Secara Nasional selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan anak sempat meningkat dalam periode pandemi COVID-19 yaitu di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan anak di Indonesia mencapai 11,80 persen atau menurun sebesar 0,84 persen poin dan kembali ke level yang sama dengan tahun 2019 (sebelum pandemi) dan saat itu angka kemiskinan anak tercatat sebesar 11,76 persen, sedangkan tahun 2023 di DKI Jakarta kemiskinan anak masih dibawah nasional yakni sebesar 6,31 persen.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait kemiskinan pada anak, sub bab ini akan membahas beberapa karakteristik kunci anak miskin yang meliputi demografi, pendidikan, dan perumahan. Data disajikan dengan fokus pembahasan untuk kondisi tahun 2023.

1. Karakteristik Demografi

BPS (2017) menyatakan bahwa kemiskinan anak merupakan keadaan tidak tercukupinya semua kebutuhan dasar anak. Hak dasar anak yang tidak terpenuhi, seperti makanan dan minuman yang layak, pendidikan, kesehatan, perumahan yang baik, akses informasi dan sebagainya. Jadi, kemiskinan anak adalah kondisi kemiskinan yang terjadi pada anak yang menyebabkan anak tidak terpenuhi kebutuhan/hak dasarnya. Dalam artian lain anak miskin adalah anak yang tidak mendapatkan hak dasarnya baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek lainnya.

Tabel 5.2 Persentase Anak Miskin menurut Karakteristik Demografi di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Karakteristik Demografi	2023
(1)	(2)
Jenis Kelamin Anak	
Laki-laki	6,24
Perempuan	6,36
Laki+Perempuan	6,31
Kelompok Umur Anak	
< 7	6,27
7-17	6,34
Jenis Kelamin KRT	
Laki-laki	6,24
Perempuan	7,45
Laki+Perempuan	6,31

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Secara umum, persentase anak miskin di DKI Jakarta sebanyak 6,31 persen artinya dari 100 anak di DKI Jakarta 6 orang diantaranya merupakan anak miskin. Jika dilihat menurut jenis kelamin, anak laki-laki dan anak perempuan berada pada tingkat yang sama, yakni untuk anak laki-laki sebesar 6,24 persen dan anak perempuan sebesar 6,36 persen. Jika dibedakan menurut umurnya, persentase anak miskin pada anak-anak dalam kelompok umur 7—17 lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur < 7 tahun.

Dari sisi jenis kelamin KRT, persentase anak miskin di rumah tangga dengan KRT perempuan lebih tinggi daripada KRT laki-laki yakni 7,45 persen berbanding 6,24 persen. Beberapa studi, di antaranya yang dilakukan oleh Robasa dan Arcana (2022) juga mengonfirmasi hal tersebut, yaitu

kecenderungan anak untuk miskin lebih rendah pada rumah tangga yang KRT-nya perempuan daripada laki-laki. Tingginya angka kemiskinan anak pada rumah tangga KRT perempuan dapat disebabkan oleh anggapan sosial bahwa perempuan dianggap sebagai masyarakat marginal atau masyarakat kelas dua (Probosiwi, 2015). Sehingga dalam hubungannya dengan kemiskinan, kemungkinan perempuan hidup dalam kemiskinan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki.

Pada umumnya perusahaan banyak membutuhkan pekerja laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan posisi perempuan yang umumnya dinilai lemah diduga menjadi salah satu alasannya. Oleh sebab itu, mengingat jenis pekerjaan public/non domestik kebanyakan membutuhkan pekerja laki-laki, maka upah yang diterima oleh pekerja perempuan lebih kecil dibandingkan dengan pekerja laki-laki karena jenis pekerjaan yang tersedia terbatas. Dengan demikian diharapkan pemerintah pusat maupun daerah hendaknya melakukan pemberdayaan terhadap KRT perempuan dengan menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan latar belakang yang dimiliki, juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.

2. Karakteristik Pendidikan

Pendidikan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat besar dimana pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemiskinan. Pendidikan memiliki pengaruh dan manfaat yang besar terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya investasi dalam bidang pendidikan. Tingkat pendidikan yang memadai akan memperbesar kesempatan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Pendidikan yang lebih baik meningkatkan kemungkinan menjadi tidak miskin karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan kesempatan yang lebih tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik

dan pendapatan yang lebih tinggi (Teguh & Nurkholis, 2012). Dengan kata lain semakin rendah tingkat pendidikan maka diasumsikan semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan diasumsikan semakin rendah tingkat kemiskinan.

Pendidikan berpengaruh sangat signifikan terhadap status kesejahteraan dan kesehatan. Dengan pendidikan yang berkualitas, individu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini terungkap dari data yang ada, yang mana anak-anak miskin yang tidak mengikuti pra sekolah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang mengikuti pra sekolah yakni 7,24 persen banding 6,43 persen. Begitu juga dengan anak miskin yang tidak/belum pernah bersekolah lebih tinggi dibanding dengan yang bersekolah. Presentase anak miskin dengan kategori tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi persentasenya (8,21%) di bandingkan dengan kategori bersekolah (6,56%) dan tidak bersekolah lagi (1,66%).

Tabel 5.3 Kemiskinan Anak menurut Karakteristik Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Karakteristik Pendidikan	Tahun
(1)	(2)
Partisipasi Pra Sekolah	
Tidak Mengikuti Pra Sekolah	7,24
Mengikuti Pra Sekolah	6,43
Partisipasi Sekolah	
Tidak/belum pernah bersekolah	8,21
Bersekolah	6,56
Tidak Bersekolah Lagi	1,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Banyak masyarakat yang beranggapan pendidikan tidak menjamin masa depan seseorang. Hal ini dibuktikan dengan pengangguran dan kemiskinan yang ada disekitar masyarakat kebanyakan lulusan perguruan tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat salah persepsi tentang pendidikan. Padahal pendidikan itu pertama kali diterima anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat masyarakat yang memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya bukan karena kurang sadar akan pentingnya pendidikan, tetapi mereka memang benar-benar tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Ekonomi keluarga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi pendidikan masa depan keluarga. Ketika perekonomian keluarga terganggu, pendidikan anak-anak juga terganggu. Oleh karena itu, terdapat beberapa keluarga yang memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya dengan alasan ekonomi yang sulit.

3. Karakteristik Perumahan

Penelitian terkait pengaruh kondisi perumahan terhadap kesejahteraan anak telah banyak dilakukan. Studi terbaru yang dilakukan oleh Departemen Urusan Anak, Kesetaraan, Disabilitas, Inklusi, dan Pemuda Irlandia menunjukkan bahwa anak-anak yang hidup di rumah dan lingkungan yang kurang layak memiliki kondisi kesehatan dan perkembangan yang lebih buruk daripada anak-anak yang kondisi rumah dan lingkungannya lebih baik (Lawrence dkk., 2023).

Secara Nasional data empat tahun dalam periode 2019 — 2022 menunjukkan persentase anak miskin di Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni secara konsisten selalu jauh lebih tinggi daripada yang tinggal di rumah layak huni. Pada tahun 2022, persentase anak miskin di Indonesia yang

tinggal di rumah tidak layak huni mencapai 17,37 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat meningkat cukup tinggi terutama saat tahun-tahun awal pandemi COVID-19 (2020 dan 2021). Meskipun persentase kemiskinannya menurun, secara umum pada tahun 2022 masih ada sekitar 42,14 persen anak-anak usia 0-17 tahun yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Sejalan dengan kondisi perumahan, persentase anak miskin yang tinggal di rumah tangga tanpa akses terhadap sumber air minum layak jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak di rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Demikian juga, pada anak-anak miskin yang tinggal di rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi layak. Pada tahun 2022, persentase anak miskin yang tinggal di rumah tangga tanpa akses sumber air minum layak mencapai 18,22 persen, sementara pada anak yang tinggal di rumah tangga tanpa akses ke sanitasi layak mencapai 20,79 persen. Persentase anak miskin pada dua karakteristik tersebut persisten dalam empat tahun terakhir, yaitu sekitar satu dari lima anak tanpa akses, baik ke sumber air minum layak maupun ke sanitasi layak, berstatus miskin. Sejalan dengan tingginya persentase anak miskin di rumah tangga tanpa akses ke rumah layak, sumber air minum layak, dan sanitasi layak, risiko kemiskinannya juga tinggi.

Dari sisi kepemilikan rumah, anak-anak yang tinggal di rumah milik sendiri identik dengan kehidupan yang lebih stabil dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi (Barker & Miller, 2009). Meskipun demikian, data Susenas tahun 2022 menunjukkan persentase anak miskin yang tinggal di rumah milik sendiri sebesar 11,94 persen, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan sedikit lebih tinggi daripada persentase anak miskin secara umum yang sebesar 11,80 persen. Studi lanjutan diperlukan

untuk menjelaskan mengapa kepemilikan rumah sendiri tidak berbanding kebalik dengan status kemiskinan anak di Indonesia. Di sisi lain, tingkat kemiskinan terendah tercatat pada anak-anak yang tinggal di rumah dinas.

Tabel 5.4 Persentase Anak Miskin menurut Karakteristik Perumahan di Indonesia, 2019—2022

Karakteristik perumahan	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Status Kelayakan Hunian Bangunan Tempat Tinggal				
Tidak Layak Huni	15,35	18,4	18,84	17,37
Layak Huni	6,38	7,41	8,17	7,74
Akses Terhadap Air Minum Layak				
Tidak ada akses	19,97	21,43	21,31	18,22
Ada Akses	10,67	11,11	11,68	11,13
Akses Terhadap Sanitasi Layak				
Tidak ada akses	20,91	21,86	22,28	20,79
Ada akses	8,94	9,6	10,19	9,68
Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal				
Milik Sendiri	12,3	12,69	12,92	11,94
Kontrak/Sewa	6,47	7,81	9,17	9,44
Bebas Sewa	12,55	13,25	14,16	12,89
Rumah Dinas	3,74	2,64	3,25	3,79
Lainnya	17,59	17,59	5,91	21,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2019—2022

Di DKI Jakarta, persentase anak miskin paling banyak menempati rumah kontrak/sewa sebanyak 9,06 persen, dan menempati rumah bebas sewa sebanyak 7,16 persen dan yang terendah yakni menempati rumah dinas

sebanyak 6,31 persen. Menurut jenis dindingnya, persentase terbesar anak menempati dinding kayu/papan sebesar 22,7 persen. Dinding kayu/papan yang penggunaannya dalam waktu lama mengandung resiko yang akan mengakibatkan dermatitis dan kanker paru, pajanan debu kayu yang tinggi juga memainkan peranan penting dalam memicu terjadinya asma. Jika dilihat menurut sumber utama air minum terbanyak yakni di jenis sumur terlindung (22,99%) dan dan sumur bor/pompa sebesar 10,54 persen.

Tabel 5.5 Persentase Anak Miskin menurut Karakteristik Perumahan di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Karakteristik Perumahan	2023
(1)	(2)
Karakteristik Rumah	
Milik Sendiri	4,56
Kontrak/Sewa	9,06
Bebas Sewa	7,16
Dinas	6,31
Jenis Dinding	
Tembok	5,75
Kayu/Papan	22,7
Anyaman Bambu	4,20
Sumber Air Minum Utama	
Air Kemasan/Isi Ulang	9,57
Leding	4,77
Sumur Bor/Pompa	10,54
Sumur Terlindung	22,99

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

5.2 Partisipasi Ekonomi Anak

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orangtua dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang tua dapat

dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak adalah kemiskinan, akses pendidikan, norma dan sikap sosial, yang disebut sebagai faktor penarik, sedangkan yang dianggap sebagai faktor pendorong adalah permintaan rumah tangga dan permintaan usaha lainnya, (Avianti, Annisa. 2013).

Faktor Pendidikan

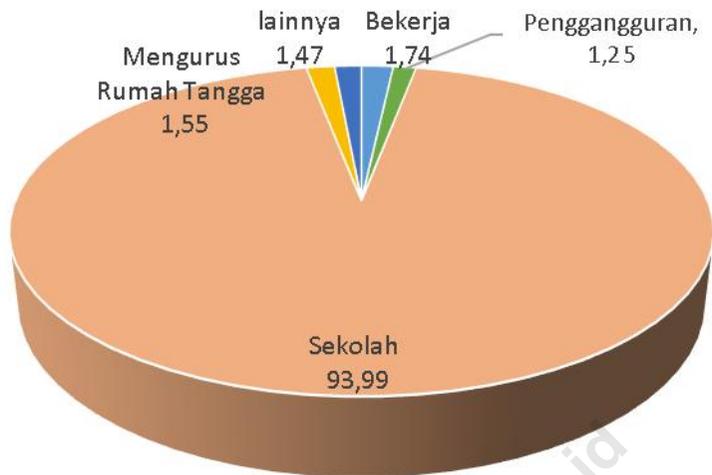
Menurut Dinas Sosial, tingkat pendidikan orang tua sangat mempengaruhi adanya kasus pekerja anak, karena dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga penghasilan yang mereka peroleh pun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi adalah salah satu faktor terkuat dalam mendorong adanya pekerja anak di bawah umur, mereka bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Alasan pokok yang menyebabkan timbulnya pekerja anak adalah untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Namun tidak jarang diantara mereka yang menjadi pekerja pada usia anak-anak karena memang ditelantarkan dan terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Sugiyani Emmy (2012) menjelaskan secara umum dampak dari anak yang bekerja :

1. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain,
2. Terganggunya proses tumbuh kembang anak,
3. Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak,
4. Rasa rendah diri dalam pergaulan,
5. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif,
6. Rentan mengalami kecelakaan kerja,
7. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan,
8. Rentan menciptakan generasi miskin.



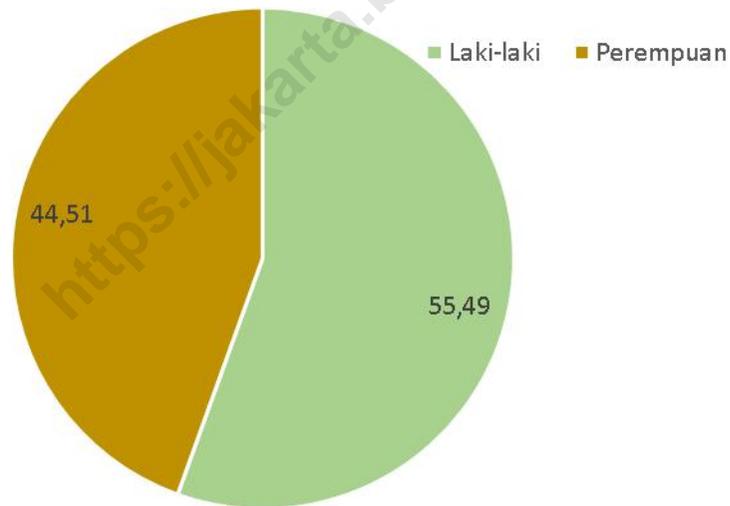
Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2023

Gambar 5.1 Persentase Anak Menurut Kegiatan Utama yang Dilakukan Seminggu yang Lalu di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada gambar 5.1 terlihat bahwa persentase anak terbesar yakni melakukan kegiatan sekolah sebesar 93,99 persen, tetapi yang menjadi perhatian disini yakni masih ada sekitar 1,74 persen anak yang bekerja. Jika dilihat menurut jenis kelamin, pekerja anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pekerja anak laki-laki, 55,49 persen berbanding 44,51 persen. Penelitian mengenai dampak jender terhadap keputusan anak bekerja di Indonesia dilakukan oleh Fitdiarini et al (2008), penelitian tersebut melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja anak. Penelitian ini menemukan bahwa anak laki laki memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja dibandingkan dengan anak perempuan.

Kajian pekerja anak di Indonesia telah dilakukan dalam beberapa sudut pandang. Usman dan Djalal Nachrowi (2019) mencoba melihat faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan seorang anak bekerja, dan

hasilnya keputusan seorang anak untuk bekerja terkait erat dengan status ekonomi keluarga. Demikian pula Nurwati (2018) yang menemukan bahwa pengaruh kondisi ekonomi keluarga lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh kondisi sosial keluarga terhadap motivasi pekerja anak dalam memberikan bantuan bagi keluarga. Sementara itu, Salam (2014), mencoba melihat sisi yang berbeda tentang pekerja anak di Indonesia, penelitian tersebut melihat bahwa urutan kelahiran anak berpengaruh terhadap kemungkinan bekerja. Hasilnya menunjukkan bahwa anak yang lahir pertama dalam keluarga miskin cenderung untuk menjadi pekerja anak. Hal ini dianggap penting mengingat hingga saat ini definisi pekerja anak masih sangat rancu.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2023

Gambar 5.2 Persentase Anak yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Bagi anak-anak yang terpaksa bekerja karena alasan sosial-ekonomi, dalam upaya menambah pendapatan keluarga, maka pada tahun 1987 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan, "Perlindungan bagi Anak-Anak Yang Terpaksa Bekerja". Dalam ketentuan ini pemerintah mengizinkan

penggunaan anak-anak di bawah usia 14 tahun dengan mewajibkan adanya izin orang-tua dan melarang pekerjaan yang berbahaya, serta pekerjaan berat dan membatasi lama kerja empat jam sehari. Di samping itu, pengusaha wajib melaporkan jumlah anak yang bekerja di bawah ketentuan tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga berupaya untuk mengurangi pekerja anak di Indonesia. Kemenaker menyusun sebuah peta jalan Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022. Hal ini wajar karena saat ini menurut data dari Kemenaker, jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 1,7 juta jiwa dengan 400 ribu jiwa diantaranya bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk, seperti berdekatan dengan benda berbahaya, terpapar debu atau uap, api dan gas, serta bahan kimia atau mesin berbahaya. Data juga merinci bahwa hampir 80% pekerja anak tersebut bekerja dan tinggal di perdesaan pada sektor pertanian dan perkebunan.

Pada gambar 5.1, juga terlihat bahwa ada sebanyak 1,25 persen anak yang masuk dalam kategori pengangguran, artinya anak itu tidak masuk kategori sekolah, tidak melakukan kursus. Pengangguran ini dapat diartikan orang yang tidak mempunyai pekerjaan, seseorang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan diri untuk melamar pekerjaan. Banyak faktor penyebab terjadinya pengangguran yang saat ini salah satunya adalah masyarakat tidak memiliki keterampilan tinggi, lebih sering bermalas-malasan karena saat ini semuanya serba instan.

Banyaknya pengangguran akan menimbulkan kemiskinan, terjadinya kriminalitas yang tinggi, politik sosial yang tidak adil, sehingga negara menjadi tidak maju karena banyak pengangguran dan menghilangkan keterampilan. Banyak masyarakat mengatakan semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pengangguran.

Pendidikan sangat berpengaruh pada kemiskinan dan pengangguran karena dengan adanya pendidikan, maka kemiskinan dan pengangguran dapat diminimalisir keberadaannya. Setiap orang memiliki keterampilan, sehingga dapat menciptakan barang yang dapat diperjual-belikan, dengan itu pengangguran berkurang dan apabila masyarakat berfikir seperti ini, maka kemiskinan pun berkurang setiap harinya.

Pendidikan juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan bagi masyarakat, dengan adanya pendidikan masyarakat akan memiliki wawasan yang lebih luas. Wawasan itu mampu digunakan untuk bekerja yang pada akhirnya juga digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk memberantas kemiskinan. Salah satu tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat sehingga ia mampu tumbuh menjadi manusia yang mandiri.

5.3 Kepemilikan Kartu Jaminan Kesehatan

Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku kesehatan, tak terkecuali pada anak. Dengan memiliki jaminan kesehatan, pengeluaran kesehatan yang perlu dikeluarkan dari kantong sendiri dapat menjadi lebih kecil sehingga tidak membebani pengeluaran rumah tangga. Penelitian di Amerika menunjukkan jika anak yang memiliki jaminan kesehatan akan memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas yang lebih baik, mengurangi *unmet needs* pelayanan kesehatan, dan mengurangi *out of pocket* (OOP) biaya kesehatan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan (Flores et al., 2017).

Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penduduk miskin dan tidak mampu pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS/JKN). Bantuan iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu ini bertujuan memudahkan akses mereka ke fasilitas kesehatan (faskes), meningkatkan penggunaan/pemanfaatan layanan kesehatan pada saat mereka membutuhkannya, dan memberi mereka perlindungan/proteksi finansial.

Tabel 5.6 Persentase anak usia 0—17 tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenisnya di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kab/Kota	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan non-PBI	Jamkes da	Asuransi swasta	Jaminan dari perusahaan /kantor	Tidak memiliki jaminan kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kep. Seribu Jakarta Selatan	80,72	18,57	0,00	0,00	0,45	0,26	100,00
Jakarta Timur	48,83	33,14	0,31	2,16	7,62	7,95	100,00
Jakarta Pusat	47,46	34,27	0,05	3,73	6,95	7,54	100,00
Jakarta Barat	76,13	17,27	0,00	0,51	3,40	2,69	100,00
Jakarta Utara	59,98	23,06	0,00	3,94	5,21	7,82	100,00
DKI Jakarta	64,18	24,56	0,31	2,02	4,32	4,61	100,00
	56,03	28,23	0,13	2,90	5,92	6,80	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

BPJS Kesehatan termasuk ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2023 di DKI Jakarta, terdapat sekitar 84,26 persen anak yang telah memiliki BPJS Kesehatan, dengan rincian persentase terbesar anak yang memiliki jaminan kesehatan yakni BPJS Kesehatan PBI sebanyak 56,03 persen, kemudian

dilanjutkan dengan jaminan kesehatan non PBI sebanyak 28,23 persen. Dengan memakai asuransi BPJS PBI maka biaya kesehatan gratis untuk segala jenis penyakit bagi Seluruh anggota BPJS.

Tabel 5.7 Persentase anak usia 0—17 tahun yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kab/Kota	BPJS	BPJS	Asuransi	Perusahaan /Kantor	Tidak	Total
	Kesehatan PBI	Kesehatan non-PBI	Kesehatan Swasta		Menggunakan Jaminan Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kep. Seribu Jakarta	78,69	15,27	0,00	0,00	06,03	100,00
Selatan	27,73	38,40	2,65	2,02	29,20	100,00
Jakarta Timur	33,33	41,78	4,95	0,02	19,92	100,00
Jakarta Pusat	50,94	24,16	0,43	1,27	23,21	100,00
Jakarta Barat	31,95	14,29	0,00	3,01	50,75	100,00
Jakarta Utara	40,80	26,28	0,00	2,91	30,01	100,00
DKI Jakarta	35,02	31,02	2,21	1,62	30,13	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Jaminan terbesar ketiga yakni perusahaan/kantor sebanyak 5,92 persen, Asuransi swasta sebanyak 2,90 persen, Jamkesda sebanyak 0,13 persen, dan tidak memiliki jaminan sebesar 6,80 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, persentase terbesar anak yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI ada di Pulau Seribu yakni sudah mencapai 80 persen lebih (80,72%) dan yang memiliki BPJS Non PBI terbesar yakni di Kota Jakarta Timur (34,27%), sedangkan wilayah yang memiliki jamkesda hanya Jakarta selatan

dan Jakarta Utara. Upaya untuk meningkatkan proteksi kesehatan, terutama bagi anak harus terus dilakukan, mengingat masih tingginya kerentanan anak terhadap berbagai penyakit. Untuk itu, dibutuhkan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Perpres No. 82 Tahun 2018, terutama dalam hal kendala perluasan cakupan pada bayi dan anak balita.

Jaminan kesehatan dapat dimanfaatkan anak untuk memperoleh layanan kesehatan dalam upaya untuk mengatasi keluhan kesehatan yang dialaminya. Dari 84,26 persen anak yang memiliki jaminan kesehatan PBI dan Non PBI, terdapat 66,04 persen diantaranya menggunakan jaminan kesehatan yang dimilikinya untuk rawat jalan. Dengan rincian sebanyak 35,02 persen yang memiliki BPJS PBI memanfaatkannya untuk rawat jalan, sebanyak 28,23 persen yang memiliki BPJS Non PBI memanfaatkannya untuk rawat jalan.

Evaluasi terhadap Program JKN menunjukkan hasil yang positif bagi anak yang berada di rumah tangga miskin dan tidak mampu, baik dari segi pemanfaatan layanan kesehatan maupun peningkatan proteksi finansial. Kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu dalam Program JKN dapat meningkatkan probabilitas pemanfaatan layanan rawat inap dan rawat jalan di faskes.

Pemerintah perlu terus memperluas cakupan JKN, terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Sosialisasi Program JKN kepada masyarakat miskin juga harus terus diperbaiki agar mereka mendapatkan kemanfaatan Program JKN secara maksimal. Selain itu, untuk mengurangi beban finansial dalam hal pengeluaran kesehatan rumah tangga yang tidak tercakup dalam JKN, Pemerintah Pusat perlu mengarahkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran guna menanggung biaya OOP (*out of pocket*) nonmedis yang sering kali menghambat masyarakat untuk mengakses faskes.

AKTIVITAS DAN LINGKUNGAN SOSIAL ANAK DI DKI JAKARTA

Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Mengikuti Kegiatan Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kegiatan, 2021



Aktivitas Sosial Penduduk Usia 5-17 Tahun



Sumber: Susenas MSBP 2021

Lingkungan sosial dapat memengaruhi perkembangan hidup seseorang.

9.552

Jumlah Tempat ibadah

Sumber: Kamal Kemang Prov. DKI Jakarta

10

Panti sosial dengan 6 jenis binaan

Sumber: Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta

Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Sumber: POLDA Metro Jaya



Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Rumah Layak Huni menurut Karakteristik, 2023



Kriteria Rumah Layak Huni



min. 7,2 m² per kapita



akses terhadap air minum layak



akses terhadap sanitasi layak



ketahanan bangunan

“Semakin tinggi status ekonomi anak maka semakin banyak anak yang memiliki akses terhadap rumah layak huni.”

Sumber: Badan Pusat Statistik

BAB VI LINGKUNGAN SOSIAL DAN FISIK

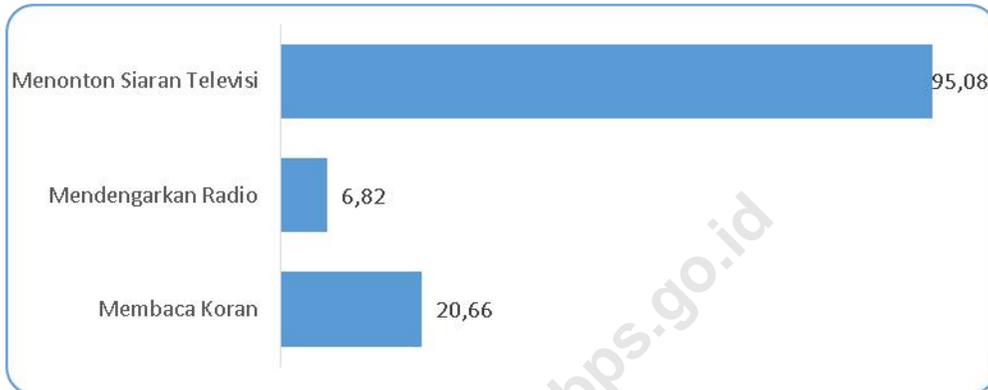
6.1 Aktivitas Sosial

Aktivitas sosial pada anak memainkan peran penting dalam perkembangan mereka, karena melalui interaksi dengan teman sebaya, mereka belajar keterampilan komunikasi, empati, dan kerjasama. Anak-anak yang terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, seperti bermain bersama teman, mengikuti klub atau kegiatan ekstrakurikuler, serta berpartisipasi dalam acara komunitas, cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat. Selain itu, aktivitas sosial membantu anak-anak mengembangkan rasa tanggung jawab dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Dengan demikian, mendorong anak untuk aktif secara sosial adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang.

Aktivitas sosial pada anak dapat diperkaya melalui pemanfaatan media informasi yang tepat. Melalui media informasi, anak-anak dapat terhubung dengan teman-teman mereka, belajar tentang berbagai budaya, dan mendapatkan akses ke sumber daya edukatif yang dapat mendukung perkembangan sosial mereka. Namun, penting bagi orang tua dan pendidik untuk membimbing anak-anak dalam penggunaan media informasi, memastikan bahwa konten yang diakses aman dan sesuai dengan usia mereka. Dengan kombinasi aktivitas sosial langsung dan pemanfaatan media informasi yang tepat, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan sosial yang lebih luas dan lebih dalam.

Hasil Susenas MSBP pada tahun 2021 menunjukkan bahwa preferensi anak 5-17 tahun yang menonton siaran televisi masih cukup tinggi

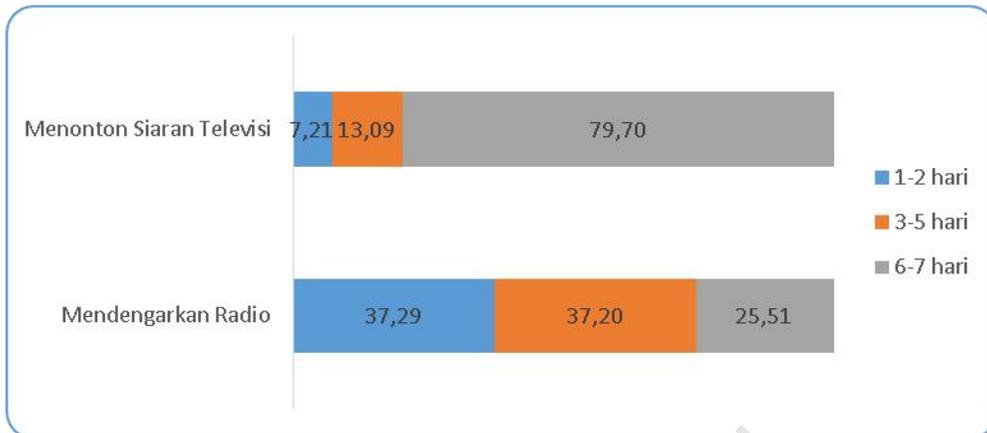
(95,08 persen). Hal berbeda terjadi pada aktivitas mendengarkan siaran radio yang sangat rendah (6,82 persen). Pada media massa berupa koran/surat kabar, terdapat sekitar 20,66 persen anak yang membaca koran/surat kabar dalam seminggu terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas MSBP 2021

Gambar 6. 1 Persentase Penduduk Usia 5—17 Tahun Yang Menonton Siaran TV, Mendengarkan Radio, dan Membaca Koran dalam Seminggu Terakhir di Provinsi DKI Jakarta, 2021

Kebiasaan menonton siaran televisi sepertinya sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, apalagi di masa pandemi Covid-19. Frekuensi menonton siaran televisi dalam seminggu terakhir paling banyak terjadi pada rentang 6-7 hari (79,70 persen). Di sisi lain, walaupun anak yang mendengarkan radio sudah sangat sedikit, hampir tiga perempat dari anak yang mendengarkan siaran radio tersebut mendengarkan siaran radio pada 1—5 hari dalam seminggu (1—2 hari sebanyak 37,29 persen dan 3—5 sebanyak 37,20 persen).

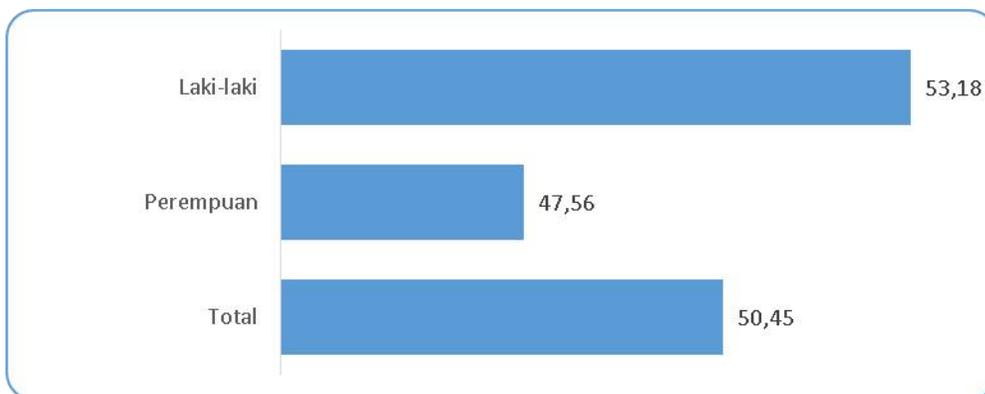


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas MSBP 2021

Gambar 6. 2 Persentase Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Menonton Siaran TV, Mendengarkan Radio, dan Membaca Koran dalam Seminggu Terakhir Menurut Frekuensi Mengakses di Provinsi DKI Jakarta, 2021

Daya tahan yang kuat dan tubuh yang sehat tidak hanya dijaga dengan makan makanan bergizi seimbang dan istirahat yang cukup, tetapi juga dengan rutin berolahraga. Olahraga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan menguatkan otot serta tulang. Selain itu, aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Oleh karena itu, penting untuk menyertakan olahraga dalam rutinitas harian guna mencapai kondisi tubuh yang optimal.

Hasil Susenas MSBP menunjukkan bahwa persentase anak berumur 5-17 tahun yang melakukan olahraga pada tahun 2021 sebesar 50,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa separo anak di Jakarta berolahraga dalam sebulan terakhir. Partisipasi berolahraga lebih tinggi pada anak laki-laki (53,18 persen) dibandingkan pada anak perempuan (47,56 persen). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik seperti olahraga lebih disukai anak laki-laki daripada anak perempuan.

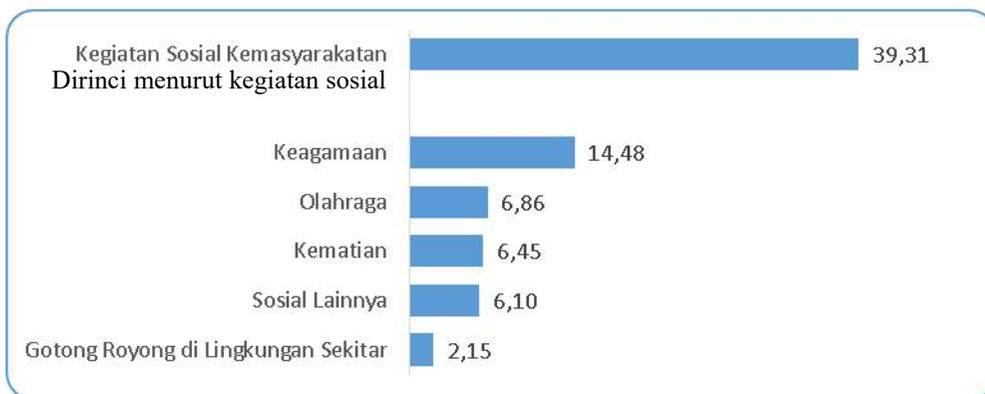


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas MSBP 2021

Gambar 6.3 Persentase Penduduk Usia 5-17 Tahun Yang Melakukan Kegiatan Olahraga dalam Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2021

Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan mendapatkan manfaat signifikan dalam perkembangan sosial dan emosional mereka. Partisipasi dalam kegiatan seperti kegiatan amal, acara komunitas, atau program sukarelawan membantu anak-anak mengembangkan rasa tanggung jawab, empati, dan keterampilan sosial. Selain itu, pengalaman ini memungkinkan anak-anak untuk belajar bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan memahami berbagai perspektif sosial.

Hasil Susenas MSBP 2021 menunjukkan bahwa persentase anak berumur 10-17 tahun yang aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan ada sekitar 39,31 persen. Dilihat menurut jenis kegiatan, kegiatan sosial kemasyarakatan yang paling banyak ada pada bidang keagamaan (14,48 persen), diikuti pada bidang olahraga/permainan (6,86 persen), kematian seperti melayat atau tahlilan (6,45 persen), sosial lainnya (6,10 persen) dan terakhir kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar seperti kerja bakti (2,15 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas MSBP 2021

Gambar 6.4 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Mengikuti Kegiatan Kemasyarakatan dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kegiatan di Provinsi DKI Jakarta, 2021

6.2 Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dapat mempengaruhi perkembangan hidup seseorang. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam proses tumbuh kembangnya, seorang anak berada dalam lingkaran konsentris dimana setiap lingkaran mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung bagi perkembangan hidupnya. Lingkaran pertama yang melingkupi seorang anak adalah lingkungan terdekatnya, seperti keluarga, teman bermain, teman sekolah, dan guru. Lingkaran berikutnya berupa lingkungan sosial yang mencakup aspek sosial ekonomi seperti tempat tinggal, pekerjaan orangtua, pendidikan orang tua dan lainnya. Lingkaran berikutnya adalah dalam konteks budaya yang meliputi norma-norma, sikap hidup dan kepercayaan yang dianut masyarakat.

Penanaman nilai-nilai moral dan keimanan pada lingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintah diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berkepribadian luhur, beriman dan bertakwa. Untuk

meningkatkan iman dan takwa generasi muda perlu disediakan fasilitas peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang ada. Sarana ibadah yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat dapat menjadi fasilitas penunjang dalam meningkatkan keimanan seseorang. Dengan pemanfaatan yang optimal pada keberadaan sarana ibadah ini, diharapkan anak-anak dapat menjadikan wahana untuk beribadah, bersosialisasi dengan sesama, dan melakukan hal-hal positif lainnya dalam upaya mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Tabel 6.1 Banyaknya Tempat Peribadatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kabupaten/Kota	Mesjid	Mushola	Gereja protestan	Gereja katolik	Pura	Vihara	Kelenteng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kep. Seribu	11	35	0	0	0	0	0
Jakarta Selatan	848	679	182	6	5	7	1
Jakarta Timur	1.125	1.289	393	12	5	20	1
Jakarta Pusat	561	430	172	8	10	33	1
Jakarta Barat	665	743	290	12	2	140	1
Jakarta Utara	588	881	287	9	10	89	1
DKI Jakarta	3.798	4.057	1.324	47	32	289	5

Sumber : Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Dalam Angka, 2023)

Dari Tabel 6.1, tampak bahwa secara total jumlah tempat ibadah di DKI Jakarta dari seluruh agama atau kepercayaan sebanyak 9.552 tempat

pada tahun 2023. Sarana ibadah yang terbanyak adalah musholah, yang selanjutnya diikuti masjid. Tampaknya jumlah tempat ibadah ini proporsional dengan banyak penduduk berdasarkan agama di DKI Jakarta, dimana sebagian besar penduduk Jakarta menganut agama islam. Urutan berikutnya adalah protestan, katholik, budha dan hindu, dan yang paling sedikit adalah penganut agama atau kepercayaan konghucu.

Apabila diamati antar wilayah kabupaten/kota, sebaran tempat peribadatan menurut agama dan kepercayaan mengikuti pola yang sama dengan provinsi, dimana tempat ibadah terbanyak adalah masjid dan mushola, tempat peribadatan lainnya proporsional dengan jumlah penduduk agama di wilayah tersebut. Perbedaan terlihat di Kepulauan Seribu, dimana tempat peribadatan yang terdapat di wilayah tersebut hanya masjid dan musholah, sementara tempat peribadatan agama lain tidak tercatat di Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta. Kemungkinan penganut agama lainnya menjalankan ibadahnya di rumah masing-masing, atau di tempat lain yang tidak dibangun khusus untuk tempat peribadatan umum.

Apabila dilihat rasio tempat ibadah terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan pada Tahun 2023 diperoleh bahwa terdapat 8,88 atau sekitar 9 tempat ibadah untuk setiap 10.000 penduduk Jakarta. Sementara jika dihitung rasionya terhadap penduduk anak, diperoleh angka sebesar 3,31 atau sekitar 3 tempat ibadah per 1.000 penduduk anak usia 0-17 tahun. Tentunya jika melihat dari rasio tersebut masih dirasa kurang keberadaan tempat ibadah tersebut, Namun jika dimanfaatkan secara optimal, maka tempat ibadah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk anak-anak menjadi SDM yang memiliki keimanan dan ketaqwaan, yang

diharapkan akan berimplikasi pada penguatan integritasnya terhadap amanah dan tanggung jawab yang diembannya kelak, baik dalam pekerjaan maupun dalam lingkup aktivitas kemasyarakatan dan lingkup keluarganya.

Manfaat lain dari ketersediaan tempat ibadah adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif sesuai dengan harapan masyarakat. Harapannya kejadian-kejadian negatif yang dilakukan anak dan remaja seperti tawuran, narkoba, dan tindakan kriminal atau lainnya dapat diminimalisir. Peran orangtua, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan bimbingan agama dan dalam membentuk nilai-nilai luhur agama yang dianutnya serta mengembangkan generasi anak menjadi pribadi yang taat dan bertanggung jawab, sangatlah penting. Sehingga generasi anak saat ini dapat menjadi SDM yang handal dan berkualitas baik secara jasmani maupun rohani di masa mendatang.

Permasalahan sosial lainnya pada anak yang muncul di kota Jakarta adalah anak terlantar dan anak yang bermasalah dengan narkoba. Untuk anak-anak terlantar yang tidak diasuh oleh orangtuanya, dengan berbagai alasan, seperti faktor kemiskinan, anak jalanan, anak yang tidak diinginkan, terutama karena lahir dari hubungan terlarang, anak yang sengaja “dibuang” dan lainnya, pemerintah berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-haknya.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945. Negara berkewajiban untuk memperjuangkan fakir miskin dan anak terlantar agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan layak dan berdasarkan nilai

kemanusiaan. Untuk menjalankan kewajiban negara tersebut, diperlukan strategi pengembangan yang berpihak kepada fakir miskin dan anak terlantar melalui pendekatan terstruktur, tertuju, serta berkesinambungan. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh Negara,” yang berarti penguasa dan negara memiliki peran dan kewajiban dalam memperjuangkan serta memperkuat perlindungan bagi fakir miskin dan anak terlantar.

Tabel 6.3. Banyaknya Panti Asuhan Menurut Jenis Binaan di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Jenis Panti Sosial	Jumlah	
	Unit	Kapasitas
(1)	(2)	(3)
1. Panti Asuhan anak (Balita Terlantar)	1	55
2. Panti Sosial Asuhan Anak Putra (Anak Terlantar)	3	440
3. Panti Sosial Bina Remaja “Taruna Jaya	2	250
4. Panti Sosial Bina Harapan Jaya (Geneng Potensial)	1	154
5. Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulya (PSK)	1	240
6. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (Hasil Penertiban)	2	1.350

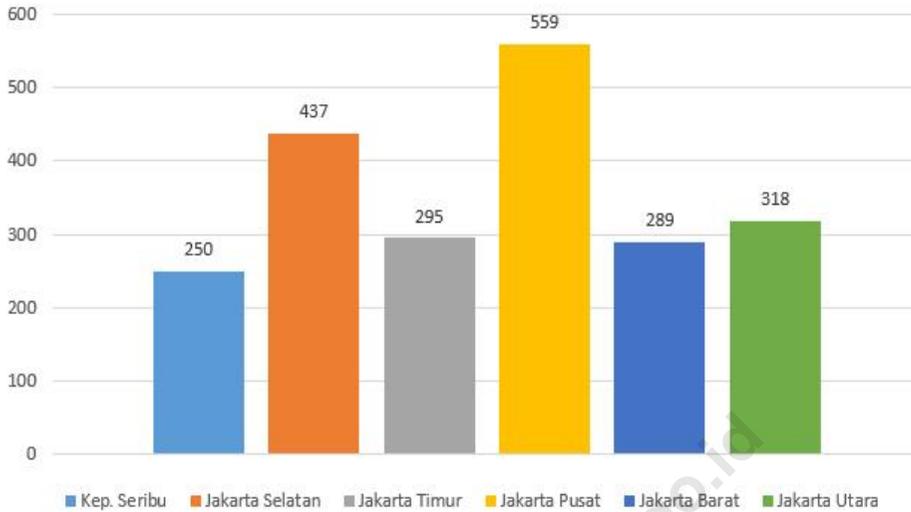
Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Dalam Angka, 2023)

Dari Tabel 6.3, terlihat bahwa untuk balita terlantar tersedia 1 unit panti dengan kapasitas 55 penghuni. Sementara untuk Anak terlantar tersedia 3 unit panti dengan kapasitas 440 orang. Panti Sosial Bina Remaja terdapat 2 unit dengan kapasitas 250 orang. Selanjutnya Panti Sosial yang menangani

Gepeng Potensial (Gelandangan Pengemis) sebanyak 1 unit dengan kapasitas 154 orang. Panti yang menampung mantan PSK sebanyak 1 unit dengan kapasitas 240 orang. Selanjutnya panti yang menangani hasil penertiban PMKS, seperti anak jalanan sebanyak 2 unit dengan kapasitas 1.350 orang.

Tentu saja dengan ketersediaan panti-panti sosial yang dikelola pemerintah tersebut, belum mencukupi kebutuhan untuk menampung anak atau remaja yang bermasalah sosial. Oleh karena itu masih perlu dukungan dari pihak swasta, LSM maupun masyarakat luas dalam mendirikan panti-panti sosial secara mandiri sesuai prosedur yang berlaku.

Permasalahan berikutnya adalah pengguna atau penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bersifat alamiah, sintetis atau semisintetis sehingga menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan rasa rangsang. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Tentunya hal ini dapat menghambat produktivitas anak-anak muda dalam berkontribusi pada pembangunan. Bahkan tidak jarang dapat memicu tindak kriminalitas dan aktivitas negatif lainnya.



Sumber : POLDA Metro Jaya

Gambar 6.5 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Apabila diamati menurut wilayah kabupaten/kota, dari Gambar 6.5, terlihat bahwa jumlah tertinggi penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta pada tahun 2023 berada di Kota Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 559 orang. Jumlah penyalahgunaan narkoba paling rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu sebanyak 250 orang. Kasus-kasus yang terungkap ini sesungguhnya hanyalah fenomena gunung es. Fakta di lapangan yang sebenarnya dari kasus penyalahgunaan narkoba diprediksi jauh lebih besar dari data yang tercatat di kepolisian. Kondisi ini tentunya memerlukan perhatian yang serius dari pihak-pihak terkait, agar kasus-kasus terkait narkoba dapat diminimalisir.

Berdasarkan data dari Kementerian kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4 persen berstatus sebagai pemakai,

sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa ini, kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman-teman dan lingkungan mereka lakukan dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba-coba atau mengikuti trend/gaya hidup. Hal tersebut berpotensi merusak otak secara permanen yang tidak bisa dikembalikan secara normal dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka rentan untuk melakukan hal-hal beresiko seperti seks bebas. Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja/muda.

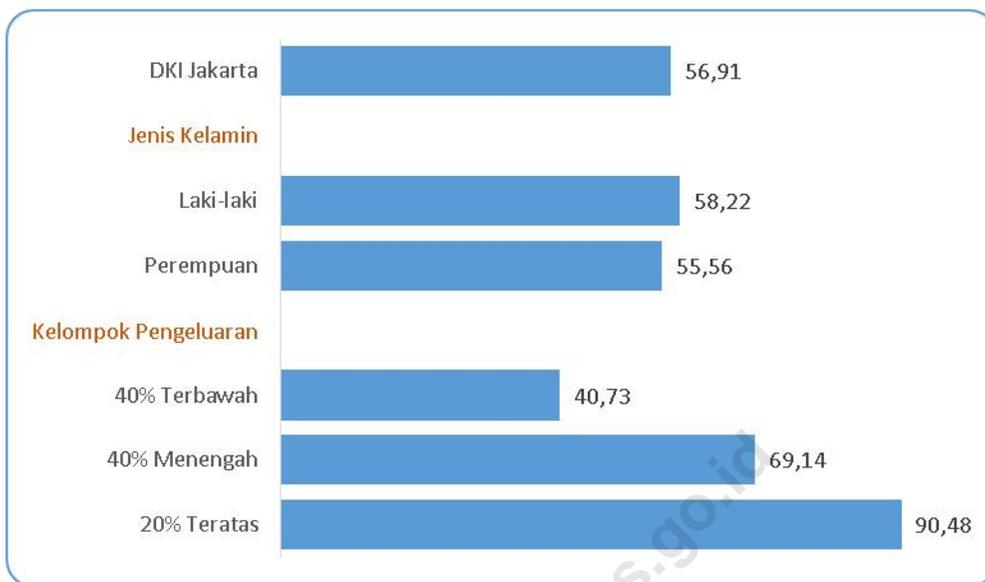
6.3 Lingkungan Fisik

Hunian yang baik untuk tumbuh kembang anak adalah rumah layak huni yang menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan stimulatif. Rumah layak huni memiliki ruang yang cukup untuk bermain dan belajar, pencahayaan yang memadai, serta ventilasi yang baik. Selain itu, lingkungan yang bersih dan teratur membantu mencegah penyakit dan menciptakan suasana yang tenang. Rumah layak huni juga mendukung interaksi keluarga dengan menyediakan tempat untuk berkumpul dan berkomunikasi. Dengan menciptakan lingkungan yang demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

Hunian layak atau Rumah Layak Huni (RLH) pada SDGs diukur dari beberapa dimensi/indikator antara lain yaitu: ketahanan bangunan, kecukupan bangunan, air minum layak, dan sanitasi layak. Anak dikatakan memiliki akses terhadap rumah layak huni jika memenuhi 4 kriteria antara

lain: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (sufficient living space); 2) memiliki akses terhadap air minum layak; 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak; 4) ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinil/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semén/bata merah.

Persentase anak yang memiliki akses terhadap rumah layak huni mencapai 56,91 persen. Artinya sekitar separuh anak di Jakarta menempati hunian yang layak diukur dari indikator-indikator yang dijelaskan di atas. Tidak ada perbedaan berarti pada akses rumah layak huni antara anak laki-laki (58,22 persen) dan perempuan (55,56 persen). Semakin tinggi status ekonomi anak maka semakin banyak anak yang memiliki akses terhadap rumah layak huni. Terjadi kesenjangan antara kelompok ekonomi 40 persen terbawah dengan 20 persen teratas. Pada kelompok teratas sebanyak 90,48 persen anak memiliki akses terhadap rumah layak huni sedangkan pada kelompok terbawah hanya sebanyak 40,73 persen anak.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 6.6 Persentase Penduduk Usia 0—17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Rumah Layak Huni menurut Karakteristik di Provinsi DKI Jakarta, 2023

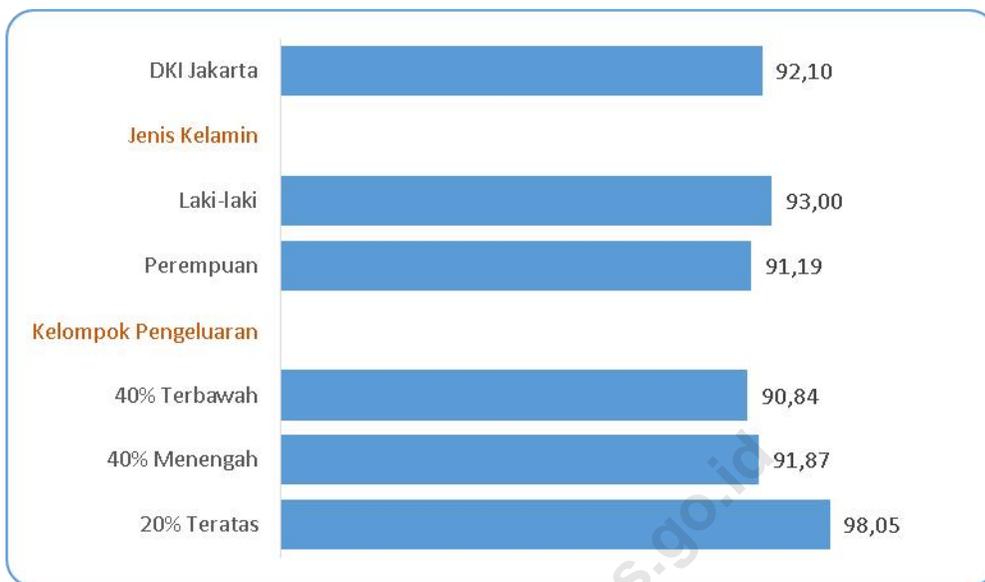
Dilihat dari dimensi/indikator pembentuk indikator rumah layak huni, kita bisa mengetahui dimensi apa yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan untuk menunjang hunian yang layak bagi anak. Dari empat dimensi rumah layak anak, 3 dimensi sudah bisa dikatakan baik, antara lain: ketahanan bangunan (92,10 persen), air minum layak (99,46 persen), dan sanitasi layak (93,14 persen). Dimensi yang masih rendah adalah kecukupan bangunan (65,22 persen). Kondisi Jakarta yang padat penduduk menimbulkan kebutuhan akan ruang meningkat. Pada wilayah tertentu dan rumah tangga dengan taraf ekonomi bawah, hal tersebut menyebabkan anak menempati bangunan dengan luas per kapita kurang dari 7,2 meter persegi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 6. 7 Persentase Penduduk Usia 0—17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Rumah Layak Huni menurut Dimensi Pembentuk Rumah Layak Huni di Provinsi DKI Jakarta, 2023

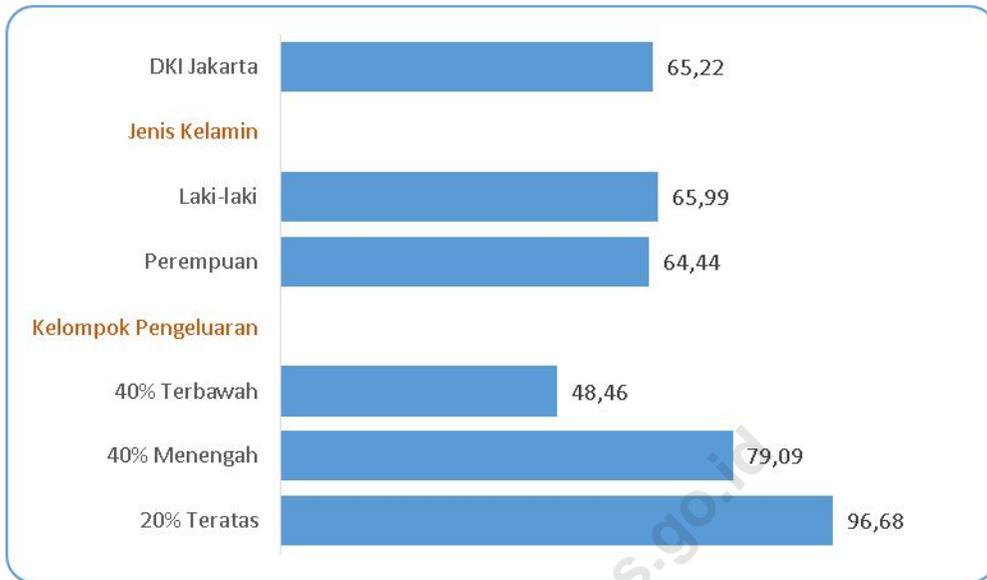
Melihat lebih dalam karakteristik anak yang menempati Hunian dengan Ketahanan Bangunan. Di Jakarta 92,10 persen anak menempati hunian dengan ketahanan bangunan. Tidak ada perbedaan berarti antara anak laki-laki (93,00 persen) dan perempuan (91,19 persen). Menurut status ekonomi, persentase anak yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan lebih tinggi pada status ekonomi yang lebih tinggi. Tidak ada kesenjangan yang tinggi antara kelompok ekonomi bawah (90,84 persen) dan atas (98,05 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 6.8 Persentase Penduduk Usia 0—17 Tahun dengan Akses Hunian yang Memenuhi Kriteria Ketahanan Bangunan menurut Karakteristik di Provinsi DKI Jakarta, 2023

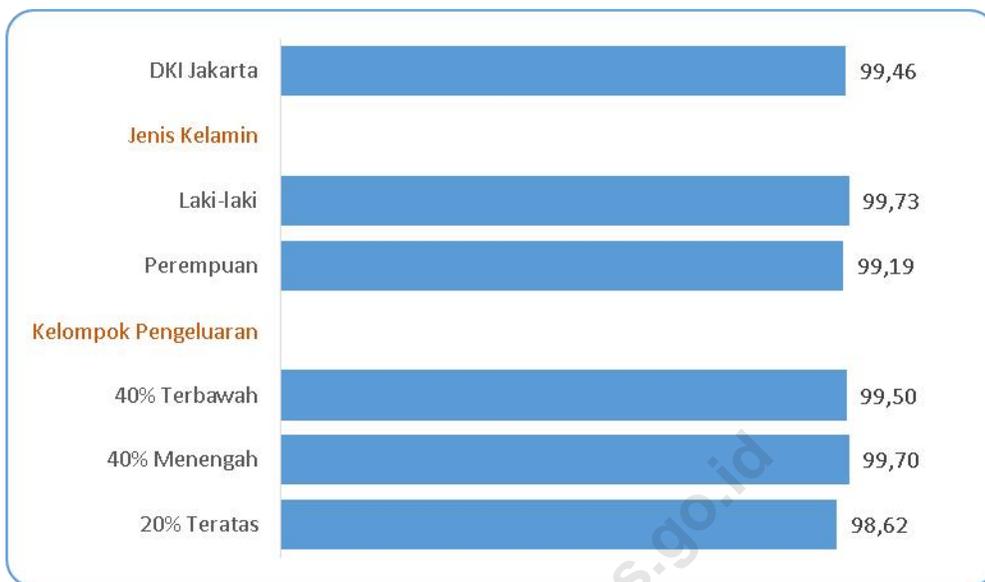
Melihat lebih dalam karakteristik anak yang menempati Hunian dengan kecukupan luas bangunan. Di Jakarta 65,22 persen anak menempati hunian dengan luas bangunan per kapita yang cukup (7,2 m²). Tidak ada perbedaan berarti antara anak laki-laki (65,99 persen) dan perempuan (64,44 persen). Menurut status ekonomi, persentase anak yang menempati hunian dengan luas bangunan yang cukup lebih tinggi pada status ekonomi yang lebih tinggi. Terdapat kesenjangan yang tinggi antara kelompok ekonomi bawah (48,46 persen) dan atas (96,68 persen), bahkan terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara kelompok ekonomi bawah dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh anak yang berada pada ekonomi 40 persen terbawah menempati bangunan dengan luas per kapita lebih dari 7,2 m².



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 6.9 Persentase Penduduk Usia 0—17 Tahun dengan Akses Hunian yang Memenuhi Kriteria Kecukupan Luas Bangunan menurut Karakteristik di Provinsi DKI Jakarta, 2023

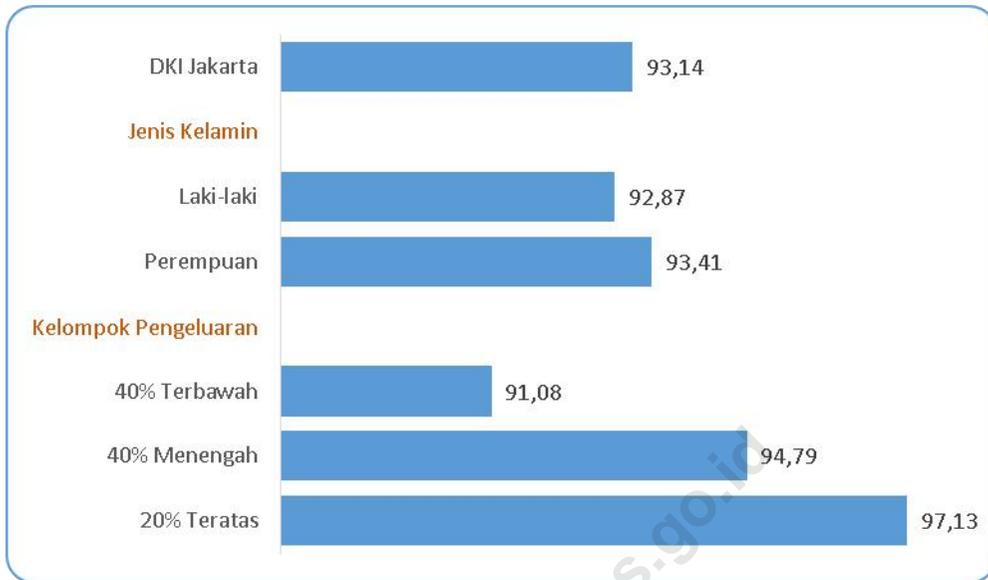
Dimensi selanjutnya berkaitan dengan akses terhadap air minum layak. Air minum yang layak berkaitan dengan sumber air minum dan sumber air mandi/cuci yang digunakan. Sebanyak 99,46 persen atau hampir seluruh anak di Jakarta memiliki akses terhadap air minum layak. Tidak ada perbedaan berarti antara anak laki-laki dan perempuan dan antarstatus ekonomi pada anak. Hal ini dikarenakan oleh sumber air minum paling banyak digunakan oleh sebagian besar rumah tangga di Jakarta adalah air isi ulang dan air kemasan untuk minum.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 6. 10 Persentase Penduduk Usia 0—17 Tahun dengan Akses Air Minum Layak menurut Karakteristik di Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dimensi selanjutnya berkaitan dengan akses terhadap sanitasi layak. Sanitasi layak yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap tempat buang air besar, jenis kloset yang digunakan, dan tempat pembuangan akhir tinja. Sebanyak 93,14 persen anak di Jakarta memiliki akses terhadap sanitasi layak. Tidak ada perbedaan berarti antara anak laki-laki (92,87 persen) dan perempuan (93,41 persen). Akses terhadap sanitasi yang layak lebih tinggi pada anak dengan ekonomi yang lebih tinggi. Pada anak dengan ekonomi 40 persen terbawah sebanyak 91,08 persen memiliki akses terhadap sanitasi layak, pada ekonomi 40 persen menengah sebanyak 94,79 persen dan pada 20 persen teratas sebanyak 97,13 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Gambar 6. 5 Persentase Penduduk Usia 0—17 Tahun dengan Akses Sanitasi Layak menurut Karakteristik di Provinsi DKI Jakarta, 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, E. W. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus di Kabupaten Semarang). *Economics Development Analysis Journal*, 7 (2), 162-185.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2023). Rilis Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020-2035 — Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024). Jakarta Dalam Angka 2024— Volume 54-2024. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, volume 28 Tahun 2023. Jakarta
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (6 Desember 2018). Statistik Pendidikan 2018. Diakses pada 21 Juni 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2018/12/06/a65b526c119ce8f799e5ea63/statistik-pendidikan-2018.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (29 November 2019). Potret Pendidikan Statistik Pendidikan Indonesia 2019. Diakses pada 21 Juni 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2019/11/29/1deb588ef5fdbfba3343bb51/potret-pendidikan-statistik-pendidikan-indonesia-2019.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (27 November 2020). Statistik Pendidikan 2020. Diakses pada 21 Juni 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2020/11/27/347c85541c34e7dae54395a3/statistik-pendidikan-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (26 November 2021). Statistik Pendidikan 2021. Diakses pada 21 Juni 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/11/26/d077e67ada9a93c99131bcde/statistik-pendidikan-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (25 November 2022). Statistik Pendidikan 2022. Diakses pada 22 Juni 2024, dari

<https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (24 November 2023). Statistik Pendidikan 2023. Diakses pada 1 Juni 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/24/54557f7c1bd32f187f3cdab5/statistik-pendidikan-2023.html>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (12 Desember 2023). Profil Anak Usia Dini 2023. Diakses pada 1 Juni 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/e9b0a9a0adccfffb137e0d0d/profil-anak-usia-dini-2023.html>

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (2016). Ayo buat KIA “Kartu Identitas Anak” Diakses pada 18 Juli 2024, dari situs resmi DPPAPP melalui tautan <https://dppapp.jakarta.go.id/>

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (2020). “JADI Kota Layak Anak, Jakarta Punya 322 RPTRA. Diakses pada 18 Juli 2024, melalui tautan <https://www.liputan6.com/news/read/4431552/jadi-kota-layak-anak-jakarta-kini-punya-322-rptra>

Luthfi Hawa, Byanda (2024). Jakarta Kota Global : Masa Depan Cerdas Berawal dari Pendidikan Berkualitas. Diakses pada 9 Juli 2024 melalui tautan <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/02/23/jakarta-kota-global-masa-depan-cerdas-berawal-dari-pendidikan-berkualitas>

Research Gate (2023). “Teenage Pregnancy in Indonesia Determinants and Outcomes” diakses pada 17 Juli 2024 melalui web https://www.researchgate.net/publication/363696657_Teenage_Pregnancy_in_Indonesia_Determinants_and_Outcomes

KemkesRI. 2015. Pemantauan Status Gizi Dilakukan di Seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia. [Diakses tanggal 12 Juli 2024]. Available from: <http://www.kemkesRI.go.id>

Marimbi, Hanum. 2010. Tumbuh Kembang, Status Gizi & Imunisasi Dasar Pada Balita. Yogyakarta : Nuha Medika

- Putri, R. Y., Azhar, Z., & Putri, D. Z. (2019). ANALISIS KEMISKINAN BERDASARKAN GENDER DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 603-612.
- Sari, E. N. (2018). Pengaruh Status Perkawinan Dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Anak Di Provinsi Banten Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(4), 365-374.
- Yuniarti, Sri. 2015. *Asuhan Tumbuh Kembang Neonatus Bayi-Balita dan Anak Pra-Sekolah*. Bandung : Refika Aditama. Atom. 2011. Status Gizi Balita Indonesia Masih Memprihatinkan. [Diakses tanggal 10 juli 2024].
Available from : <http://berbagigizi.blogspot.com/2011/01/status-gizi-balita-masih.html>

LAMPIRAN RSE

Tabel 1. *Sampling Error* Persentase anak 0-17 tahun yang Mengalami keluhan kesehatan Menurut Kab Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	25,32	3,22	12,72	19,52	32,15
Jakarta Selatan	24,94	2,89	11,59	19,7	31,04
Jakarta Timur	26,51	2,9	10,94	21,22	32,58
Jakarta Pusat	27,67	3,38	12,22	21,55	34,76
Jakarta Barat	30,32	3,58	11,81	23,78	37,77
Jakarta Utara	20,99	2,5	11,91	16,5	26,31
BPS DKI Jakarta	26,25	1,48	5,64	23,45	29,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 2. *Sampling Error* Persentase anak Laki-laki Berumur 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan Menurut Kab/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	24,11	3,23	13,4	18,33	31,01
Jakarta Selatan	25,59	3,37	13,17	19,56	32,74
Jakarta Timur	26,89	3,85	14,32	20,03	35,07
Jakarta Pusat	25,10	3,9	15,54	18,24	33,49
Jakarta Barat	29,65	3,82	12,88	22,73	37,66
Jakarta Utara	18,92	2,92	15,43	13,83	25,33
BPS DKI Jakarta	25,79	1,75	6,79	22,5	29,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 3. *Sampling Error* Persentase anak Perempuan Berumur 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan Menurut Kab/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	26,54	3,82	14,39	19,74	34,67
Jakarta Selatan	24,29	3,12	12,84	18,69	30,92
Jakarta Timur	26,12	2,64	10,11	21,27	31,62
Jakarta Pusat	30,47	4,12	13,52	23,01	39,11
Jakarta Barat	31,03	4,44	14,31	23,03	40,34
Jakarta Utara	23,04	3,11	13,5	17,5	29,7
BPS DKI Jakarta	26,73	1,64	6,14	23,62	30,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 4. *Sampling Error* Persentase anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobat sendiri Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	66,02	7,73	11,71	49,69	79,26
Jakarta Selatan	65,25	5,83	8,93	53,12	75,68
Jakarta Timur	71,12	6,85	9,63	56,12	82,58
Jakarta Pusat	61,53	7,24	11,77	46,74	74,46
Jakarta Barat	80,01	5,02	6,27	68,36	88,12
Jakarta Utara	63,13	5,76	9,12	51,29	73,56
BPS DKI Jakarta	70,59	3,00	4,25	64,38	76,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 5. *Sampling Error* Persentase anak Laki-laki usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	65,49	8,64	13,19	47,26	80,08
Jakarta Selatan	62,10	7,8	12,56	46,09	75,85
Jakarta Timur	70,93	8,43	11,88	52,21	84,49
Jakarta Pusat	60,85	7,67	12,6	45,22	74,53
Jakarta Barat	79,95	6,43	8,04	64,46	89,76
Jakarta Utara	58,99	7,32	12,41	44,25	72,27
BPS DKI Jakarta	69,40	3,87	5,58	61,32	76,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 6. *Sampling Error* Persentase anak Perempuan usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	66,50	8,27	12,44	48,91	80,46
Jakarta Selatan	68,60	5,98	8,72	55,88	79,03
Jakarta Timur	71,32	6,16	8,64	57,92	81,8
Jakarta Pusat	62,14	8,73	14,05	44,19	77,29
Jakarta Barat	80,08	7,17	8,95	62,45	90,67
Jakarta Utara	66,49	7,75	11,66	50,06	79,71
BPS DKI Jakarta	71,76	3,2	4,46	65,07	77,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 7. *Sampling Error* Persentase anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	42,44	8,57	20,19	27,02	59,48
Jakarta Selatan	43,09	7,39	17,15	29,53	57,78
Jakarta Timur	50,97	6,00	11,77	39,35	62,48
Jakarta Pusat	56,42	7,01	12,42	42,51	69,39
Jakarta Barat	35,76	4,76	13,31	27,03	45,55
Jakarta Utara	52,47	6,67	12,71	39,49	65,12
BPS DKI Jakarta	45,64	3,04	6,66	39,77	51,64

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 8. *Sampling Error* Persentase anak laki-laki usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	43,26	9,03	20,87	27,01	61,1
Jakarta Selatan	43,62	8,66	19,85	27,93	60,71
Jakarta Timur	48,77	7,36	15,09	34,81	62,94
Jakarta Pusat	59,89	7,98	13,32	43,74	74,14
Jakarta Barat	36,00	6,42	17,83	24,56	49,30
Jakarta Utara	54,47	8,36	15,35	38,15	69,88
BPS DKI Jakarta	45,59	3,75	8,23	38,37	53,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 9. *Sampling Error* Persentase anak Perempuan usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	41,69	9,45	22,67	24,99	60,54
Jakarta Selatan	42,53	7,74	18,2	28,43	57,96
Jakarta Timur	53,31	6,32	11,86	40,96	65,27
Jakarta Pusat	53,30	8,01	15,03	37,75	68,24
Jakarta Barat	35,52	5,67	15,96	25,31	47,25
Jakarta Utara	50,84	8,25	16,23	35,10	66,41
BPS DKI Jakarta	45,70	3,29	7,20	39,34	52,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 10. *Sampling Error* Persentase anak umur 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin, 2023

Jenis Kelamin	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	55,49	9,9	17,84	36,17	73,29
Perempuan	44,51	9,9	22,24	26,71	63,83
Laki+Perempuan	55,49	9,9	17,84	36,17	73,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 11. *Sampling Error* Persentase Anak Miskin di DKI Jakarta menurut Jenis Kelamin, 2023

Jenis Kelamin	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	6,25	0,98	15,68	4,58	8,47
Perempuan	6,37	1,22	19,15	4,36	9,22
Laki+Perempuan	6,31	0,98	15,53	4,64	8,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 12. *Sampling Error* Persentase Anak Miskin di DKI Jakarta menurut Kelompok Anak, 2023

Kelompok Umur	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< 7 tahun	6,27	1,14	17,84	4,49	9,02
7-17 tahun	6,34	0,99	15,84	4,56	8,5
0-17 tahun	6,31	0,98	15,53	4,64	8,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 13. *Sampling Error* Persentase Anak Miskin di DKI Jakarta menurut Jenis Kelamin KRT, 2023

Jenis Kelamin KRT	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	6,24	1,02	16,35	4,51	8,57
Perempuan	7,45	2,98	40	3,33	15,85
Laki+Perempuan	6,31	0,98	15,53	4,64	8,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 14. *Sampling Error* Persentase anak umur 10-17 tahun menurut Kegiatan Utama Seminggu Terakhir, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bekerja	1,74	0,4	22,99	1,1	2,73
Pengangguran	1,25	0,26	20,8	0,83	1,88
Sekolah	93,99	0,68	0,72	93	95
Mengurus Rumah Tangga	1,55	0,35	22,58	1	2
Lainnya	1,47	0,31	21,09	1	2

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 15. *Sampling Error* Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 tahun menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	95,12	0,65	0,69	93,84	96,40
Perempuan	95,23	0,67	0,71	93,91	96,55
Kelompok Umur					
0-6 Tahun	73,11	2,71	3,71	67,79	78,43
7-12 Tahun	98,68	0,37	0,38	97,95	99,41
13-17 Tahun	99,92	0,08	0,08	99,76	100,08
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	94,10	0,70	0,75	92,72	95,48
40% Menengah	96,88	0,59	0,61	95,72	98,05
20% Teratas	94,82	1,60	1,68	91,69	97,95
Total	95,17	0,48	0,51	94,22	96,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 16. *Sampling Error* Angka Melek Huruf Anak Usia 5-17 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	96.65	0.89	0.92	94.89	98.40
Jakarta Selatan	95.20	1.17	1.23	92.91	97.49
Jakarta Timur	96.40	0.88	0.91	94.68	98.12
Jakarta Pusat	95.69	1.02	1.07	93.68	97.70
Jakarta Barat	95.43	1.04	1.09	93.39	97.48
Jakarta Utara	92.54	1.16	1.25	90.26	94.82
DKI Jakarta	95,17	0,48	0,51	94,22	96,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 17. *Sampling Error* Angka Melek Huruf Latin Anak Usia 5-17 tahun menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	94.94	0.66	0.69	93.65	96.23
Perempuan	95.23	0.67	0.71	93.90	96.55
Kelompok Umur					
0-6 Tahun	72.50	2.71	3.74	67.17	77.83
7-12 Tahun	98.68	0.37	0.38	97.95	99.41
13-17 Tahun	99.92	0.08	0.08	99.76	100.08
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	93.99	0.71	0.75	92.60	95.38
40% Menengah	96.83	0.59	0.61	95.67	98.00
20% Teratas	94.67	1.60	1.69	91.53	97.82
Total	95.08	0.49	0.51	94.13	96.03

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 18. *Sampling Error* Angka Melek Huruf Arab Anak Usia 5-17 tahun menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	54.70	2.18	3.99	50.42	58.99
Perempuan	56.52	2.22	3.92	52.17	60.87
Kelompok Umur					
0-6 Tahun	29.06	2.77	9.53	23.62	34.50
7-12 Tahun	57.31	2.28	3.98	52.83	61.79
13-17 Tahun	64.60	2.43	3.76	59.83	69.37
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	56.61	2.44	4.31	51.81	61.41
40% Menengah	58.90	2.71	4.59	53.58	64.21
20% Teratas	41.82	4.16	9.94	33.65	49.98
Total	55.60	1.96	3.52	51.76	59.44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 19. *Sampling Error* Angka Melek Huruf Lainnya Anak Usia 5-17 tahun menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	3.96	0.72	18.15	2.55	5.37
Perempuan	3.30	0.66	19.90	2.01	4.58
Kelompok Umur					
0-6 Tahun	0.94	0.52	54.98	-0.08	1.95
7-12 Tahun	3.06	0.58	18.93	1.92	4.20
13-17 Tahun	5.53	0.92	16.70	3.71	7.34
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	2.55	0.67	26.39	1.23	3.87
40% Menengah	2.17	0.51	23.62	1.16	3.18
20% Teratas	12.45	2.77	22.23	7.01	17.88
Total	3.63	0.56	15.49	2.53	4.74

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 20. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	99.42	0.26	0.26	98.91	99.93
Perempuan	99.57	0.26	0.26	99.07	100.07
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	99.15	0.33	0.33	98.51	99.79
40% Menengah	99.88	0.07	0.07	99.73	100.03
20% Teratas	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Total	99.49	0.18	0.18	99.14	99.85

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 21. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	99.56	0.44	0.44	98.70	100.42
Jakarta Selatan	99.97	0.04	0.04	99.90	100.03
Jakarta Timur	99.82	0.18	0.18	99.46	100.17
Jakarta Pusat	99.76	0.24	0.24	99.29	100.23
Jakarta Barat	99.54	0.35	0.35	98.86	100.22
Jakarta Utara	98.23	0.83	0.84	96.61	99.86
DKI Jakarta	99.49	0.18	0.18	99.14	99.85

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 22. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	98.40	0.66	0.67	97.11	99.70
Perempuan	97.94	1.00	1.02	95.98	99.90
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	97.58	1.02	1.05	95.57	99.60
40% Menengah	98.91	0.64	0.65	97.64	100.18
20% Teratas	98.52	1.17	1.19	96.21	100.82
Total	98.17	0.60	0.61	97.00	99.35

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 23. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	98.69	0.95	0.96	96.83	100.55
Jakarta Selatan	99.12	0.80	0.81	97.54	100.70
Jakarta Timur	98.73	1.02	1.03	96.74	100.73
Jakarta Pusat	99.12	0.64	0.65	97.85	100.38
Jakarta Barat	98.35	1.01	1.03	96.37	100.33
Jakarta Utara	95.12	2.46	2.58	90.29	99.95
DKI Jakarta	98.17	0.60	0.61	97.00	99.35

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 24. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	70.18	2.72	3.88	64.83	75.53
Perempuan	74.75	2.46	3.29	69.91	79.59
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	71.63	2.76	3.85	66.21	77.05
40% Menengah	74.32	2.79	3.76	68.83	79.80
20% Teratas	70.55	5.01	7.11	60.70	80.41
Total	72.50	1.77	2.44	69.03	75.98

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 25. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	70.39	4.27	6.06	62.00	78.77
Jakarta Selatan	73.49	3.56	4.84	66.50	80.48
Jakarta Timur	76.78	3.25	4.24	70.38	83.17
Jakarta Pusat	71.40	5.22	7.32	61.13	81.66
Jakarta Barat	69.26	4.09	5.91	61.21	77.30
Jakarta Utara	70.42	4.17	5.93	62.21	78.62
DKI Jakarta	72.50	1.77	2.44	69.03	75.98

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 26. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	104.18	0.95	0.91	102.32	106.04
Perempuan	103.06	1.10	1.07	100.90	105.22
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	103.49	0.98	0.95	101.55	105.42
40% Menengah	104.31	1.26	1.21	101.84	106.78
20% Teratas	102.24	2.12	2.07	98.08	106.40
Total	103.63	0.73	0.70	102.20	105.05

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 27. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	105.24	1.91	1.81	101.49	108.99
Jakarta Selatan	105.04	1.68	1.60	101.74	108.33
Jakarta Timur	103.52	1.44	1.39	100.69	106.36
Jakarta Pusat	102.07	1.97	1.93	98.20	105.94
Jakarta Barat	103.76	1.26	1.21	101.29	106.23
Jakarta Utara	102.66	1.88	1.83	98.97	106.34
DKI Jakarta	103.63	0.73	0.70	102.20	105.05

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 28. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	97.03	3.49	3.60	90.17	103.88
Perempuan	94.55	3.53	3.73	87.61	101.48
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	95.85	3.08	3.21	89.80	101.90
40% Menengah	96.04	4.96	5.17	86.29	105.79
20% Teratas	94.84	4.80	5.06	85.41	104.27
Total	95.78	2.39	2.50	91.08	100.48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 29. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	84.74	4.33	5.11	76.24	93.25
Jakarta Selatan	89.03	3.69	4.15	81.78	96.28
Jakarta Timur	101.49	6.14	6.04	89.44	113.54
Jakarta Pusat	92.08	6.06	6.58	80.19	103.98
Jakarta Barat	95.54	3.29	3.45	89.07	102.01
Jakarta Utara	97.23	6.52	6.70	84.43	110.03
DKI Jakarta	95.78	2.39	2.50	91.08	100.48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 30. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/Sederajat menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	72.24	4.22	5.84	63.96	80.52
Perempuan	82.38	4.20	5.10	74.13	90.63
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	72.44	4.27	5.90	64.05	80.83
40% Menengah	81.74	5.08	6.22	71.76	91.72
20% Teratas	81.35	7.21	8.87	67.18	95.52
Total	77.40	3.04	3.92	71.43	83.36

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 31. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/Sederajat menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	97.68	9.72	9.95	78.59	116.77
Jakarta Selatan	89.86	6.92	7.70	76.26	103.45
Jakarta Timur	78.90	7.68	9.74	63.81	93.99
Jakarta Pusat	80.09	8.20	10.24	63.98	96.20
Jakarta Barat	71.90	5.30	7.37	61.49	82.31
Jakarta Utara	68.04	4.85	7.13	58.52	77.56
DKI Jakarta	77.40	3.04	3.92	71.43	83.36

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 32. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	98.77	0.35	0.35	98.09	99.45
Perempuan	98.10	0.51	0.52	97.10	99.10
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	98.34	0.44	0.45	97.47	99.21
40% Menengah	98.85	0.45	0.46	97.96	99.74
20% Teratas	97.64	0.97	0.99	95.74	99.54
Total	98.44	0.30	0.31	97.84	99.03

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 33. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	99.56	0.44	0.44	98.70	100.42
Jakarta Selatan	99.05	0.47	0.47	98.14	99.97
Jakarta Timur	98.46	0.58	0.59	97.32	99.59
Jakarta Pusat	97.98	1.11	1.14	95.79	100.16
Jakarta Barat	99.54	0.35	0.35	98.86	100.22
Jakarta Utara	96.37	1.09	1.13	94.24	98.51
DKI Jakarta	99.56	0.44	0.44	98.70	100.42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 34. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	87.06	1.93	2.22	83.27	90.86
Perempuan	82.85	2.50	3.02	77.93	87.77
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	85.61	1.99	2.33	81.70	89.53
40% Menengah	83.02	2.77	3.34	77.58	88.47
20% Teratas	87.44	3.97	4.55	79.63	95.25
Total	84.95	1.57	1.85	81.87	88.03

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 35. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	81.31	4.05	4.98	73.36	89.27
Jakarta Selatan	85.71	3.15	3.68	79.51	91.90
Jakarta Timur	81.80	3.29	4.02	75.33	88.27
Jakarta Pusat	85.78	5.31	6.19	75.35	96.21
Jakarta Barat	89.26	2.71	3.04	83.93	94.59
Jakarta Utara	82.12	4.00	4.87	74.26	89.97
DKI Jakarta	84.95	1.57	1.85	81.87	88.03

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 36. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	57.86	2.97	5.13	52.03	63.69
Perempuan	63.65	2.94	4.61	57.88	69.43
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	57.55	3.18	5.52	51.31	63.80
40% Menengah	62.80	3.47	5.52	55.98	69.61
20% Teratas	65.60	5.33	8.12	55.12	76.07
Total	60.81	2.17	3.57	56.54	65.08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 37. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	65.84	4.26	6.47	57.47	74.22
Jakarta Selatan	66.71	3.81	5.72	59.21	74.20
Jakarta Timur	57.00	4.85	8.51	47.47	66.52
Jakarta Pusat	68.05	5.30	7.79	57.63	78.47
Jakarta Barat	59.86	4.69	7.83	50.65	69.07
Jakarta Utara	57.95	4.46	7.70	49.19	66.72
DKI Jakarta	60.81	2.17	3.57	56.54	65.08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 38. *Sampling Error* Angka Melanjutkan ke Jenjang SMP/Sederajat menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	93.65	3.22	3.44	87.30	100.01
Perempuan	93.70	2.56	2.74	88.64	98.76
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	92.07	2.72	2.95	86.71	97.43
40% Menengah	94.47	3.35	3.55	87.86	101.08
20% Teratas	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Total	93.68	1.93	2.06	89.87	97.48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 39. *Sampling Error* Angka Melanjutkan ke Jenjang SM/Sederajat menurut karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	95.15	3.50	3.68	88.24	102.05
Perempuan	98.32	1.58	1.60	95.21	101.43
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	96.56	2.17	2.25	92.27	100.85
40% Menengah	99.93	0.07	0.07	99.80	100.07
20% Teratas	89.44	9.79	10.95	70.12	108.77
Total	96.81	1.88	1.94	93.11	100.52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

Tabel 40. *Sampling Error* Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Rumah Layak Huni menurut Karakteristik, 2023

Uraian	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	58.22	1.89	3.25	54.50	61.93
Perempuan	55.56	1.94	3.49	51.76	59.36
Kelompok Pengeluaran					
40% Terbawah	40.73	2.06	5.05	36.69	44.77
40% Menengah	69.14	2.17	3.14	64.88	73.40
20% Teratas	90.48	2.45	2.71	85.67	95.29
Total	56.91	1.65	2.91	53.66	60.16

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2023

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah No. 36-38 Paseban Senen Jakarta Pusat, 10440

Telepon: (021) 31928493; Fax: (021) 3152004

Email: bps3100@bps.go.id; Homepage: <https://jakarta.bps.go.id>